

EVALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PEDESAAN (PIIP) DI DESA WONOREJO, KECAMATAN

PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata 1 (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dengan Minta Reformasi Pemerintahan

Disusun oleh :

IFTA FIA

145120601111059



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**EVALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN (PPIP) DI DESA WONOREJO, KECAMATAN
PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Ifta Fia

NIM.145120601111059

Telah Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si
NIK. 2013048811042001



Laode Machdani Afala, S.IP., M.A
NIK. 2016078703181001

LEMBAR PENGESAHAN**EVALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN (PPIP) DI DESA WONOREJO, KECAMATAN
PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG****SKRIPSI****Disusun oleh:****Ifta Fia****NIM.145120601111059****Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan
Pada Tanggal 10 Desember 2018****Tim Penguji****Ketua Majelis Penguji****Sekretaris Majelis Penguji**
Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si
NIK. 2012096704092001
Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
NIK. 2018078912271001**Anggota Majelis Penguji 1****Anggota Majelis Penguji 2**
Irma Fitriana Ulfah, S.IP, M.Si
NIK. 2013048811042001
Laode Machdani Afala, S.IP., M.A
NIK. 2016078703181001**Malang, 10 Desember 2018****Mengetahui****Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik****Prof. Dr. Unto Ludigdo., SE., M.Si, Ak**
NIK. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN**Nama: Ifta Fia****NIM: 145120601111059**

Dengan ini saya menyatakan bahwa SKRIPSI berjudul *EVALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PPIP) DI DESA WONOREJO, KECAMATAN PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG* adalah benar-benar merupakan karya sendiri. Beberapa hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya peroleh di Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Malang, 10 Desember 2018**Yang Membuat Pernyataan,****Ifta Fia****145120601111059**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat dan nikmat yang Allah SWT berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang”. Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan menempuh gelar Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Skripsi ini merupakan sebuah karya yang tidak sempurna, maka dari itu selama proses penyelesaian peneliti telah banyak mendapat masukan. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat, kekuatan serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga menjadikan hamba dapat menyelesaikan masa studi ini. Terimakasih karena telah menuntun hamba menyelesaikan studi ini dengan jalan yang Engkau ridhoi.
2. Kepada Ibu saya Khotimah. Terimakasih telah mendidik dan membesarkan saya, Terimakasih untuk doa dan dukungan secara moril maupun materil. Terimakasih untuk segala yang engkau berikan. Sehingga saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Semoga dengan ini saya bisa membanggakan Ibu.
3. Keluarga besar saya terutama kakak-kakak dan Adik-adik saya yang sudah membantu baik dari segi moril maupun materil. Terimakasih atas segala doa

dan dukungannya sehingga membuat saya selalu semangat mengerjakan skripsi saya. Terimakasih yang tak terhingga untuk semua yang sudah diberikan.

4. Selaku dosen pembimbing skripsi saya ibu Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si dan Bapak Laode Machdani Afala, S.IP, M.A. Beliau adalah dosen yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah sabar dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi saya untuk selalu berusaha lebih baik lagi.
5. Dr.Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si, Ahmad Zaki Fadlurohman, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris majelis penguji dalam sidang skripsi saya. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi saya dan memberikan saran, masukan dan pertanyaan yang membangun dan membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
6. Ketua Program Studi dan Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah mengajarkan ilmu yang sangat berarti bagi saya, selama berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
7. Kepada Bapak Kepala Desa Wonorejo yakni Bapak Sokeh selaku Informan penelitian skripsi saya, terimakasih banyak atas semua kesempatan dan bantuan yang sudah diberikan.
8. Kepada seluruh informan penelitian saya dan Masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, terimakasih sudah mau memberikan informasi yang menunjang skripsi saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

9. Sahabat-sahabat saya sedari maba serta teman seperjuangan yang saya sayangi “BOWBOWDATS” (Oberina Begal, Silvi Anjellina, Carolina Diah Kwaid Wadhin, Fellida Simanjuntak, Hotma Yani Manik, Yenni Vianathalia BR Ginting). Terimakasih telah mengajarkan dan memberikan pengalaman luar biasa yang sangat berharga dalam kehidupan saya. Semoga persahabatan kita terus berlanjut hingga maut memisahkan. You’ll always be my best friend forever however the way.
10. Terimakasih Untuk Kamu (Agp), atas kesempatan dan pengalaman yang tak terlupakan selama awal hingga akhir perkuliahan. Terimakasih telah mengajarkan banyak hal yang sangat berharga. Semoga selalu diberikan yang terbaik oleh Allah S.W.T.
11. Sahabat-sahabat saya di Kos Panjaitan gang 19 (Nita Pramastuti, Siska Uswatun, Ninda, Rosa, Aini, Bika, Ajeng). Terimakasih banyak selalu menjadi tempat persinggahan paling nyaman. Terimakasih selalu mau menerima saya dan selalu menjadi orang-orang yang mau direpoti. Terimakasih selalu menampung curhatan dan memberikan motivasi yang membangun untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. May Allah always Bless our way to be a good and success one.
12. Sahabat-sahabat saya “TRIO WEK-WEK” (Dyah Ayu Sutraningrum, Sikha Qomaruzzaman, Rosa Linda). Terimakasih banyak selalu menjadi orang yang paling perhatian, paling cerewet, paling gila yang selalu membuat hari-hari saya penuh dengan kebahagiaan. Semoga kita semua selalu dilindungi

oleh Allah S.W.T dan di masa depan diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk dapat bertemu kembali.

13. Teman sekaligus Adik-adik kos Kertosentono 200 W (Novia Aulia, Kristina, Aulia Hurun). Terimakasih sudah menjadi bagian di kehidupan saya. Semangat kuliahnya, tetep jadi pribadi yang selalu baik.
14. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2014, terutama untuk Kelas C untuk semua kesempatan serta dukungannya baik selama perkuliahan maupun sampai siding skripsi saya selesai.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan manfaat dalam melakukan relasi aktor di level desa.

ABSTRAK

Ifta Fia. Evaluasi Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Skripsi. Pembimbing I: Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si. Pembimbing II: Laode Machdani Afala, S.IP., M.A. Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak-dampak sosial yang terjadi setelah adanya pembangunan jembatan dan jalan rabat beton yang dilaksanakan melalui dana bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebesar Rp. 250 Juta Rupiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan akses pelayanan infrastruktur dasar di pedesaan. Program ini didasarkan pada masih minimnya infrastruktur dasar yang dapat di akses oleh masyarakat pedesaan sehingga menyebabkan keterbatasan dalam melakukan kegiatan termasuk kegiatan perekonomian sehingga menjadi salah satu penyebab kemiskinan di daerah pedesaan. PPIP diselenggarakan oleh pemerintah dimulai pada tahun 2007 dan berada dibawah payung hukum PNPM Mandiri dengan dibawah oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya. PPIP dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang pada Tahun 2014-2015. Pelaksanaan PPIP bersifat *Bottom Up* dimana masyarakat ditunjuk langsung sebagai pelaksana program mulai dari perencanaan hingga kegiatan selesai dilakukan. Pemilihan Jenis infrastruktur yang akan dibangun juga ditentukan sendiri oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan konsep evaluasi dampak Samodra Wibawa yang menjelaskan tentang 4 indikator evaluasi yakni, dampak individual yang terdiri dari dampak psikis, dampak lingkungan, dampak ekonomi, dampak sosial dan personal, kedua berkenaan dengan dampak organisasional, ketiga dampak pada masyarakat, dan keempat dampak pada lembaga dan sistem sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPIP di desa Wonorejo sudah berjalan dengan sangat baik terbukti dari berbagai dampak sosial yang terjadi pada masyarakat cukup besar sehingga membuat berbagai perubahan pada masyarakat kearah yang positif. Walaupun masih ada kekurangan pada segi pemeliharaan akibat pembuangan sampah yang sembarangan di area jembatan. Rekomendasi pada penelitian ini adalah meninjau ulang pemeliharaan infrastruktur dasar yang telah dibangun sehingga dapat terus dimanfaatkan keberadaannya dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Kemiskinan, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Evaluasi Dampak sosial.

ABSTRACT

Ifta Fia. Impact Evaluation of Rural Infrastructure Development Program in Wonorejo Village, Poncokusumo District, Malang Regency. Essay. Lecture I: Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si. Lecture II: Laode Machdani Afala, S.IP., M.A. Government Science. Faculty of Social Science and Political Science. Barijaya University.

This study aims to determine the extent of the Social impacts that occurred after the construction of bridges and concrete rebate roads carried out through the Rural Infrastructure Development Program (PIIP) funds of Rp. 250 million Rupiah. This study uses qualitative research methods with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation studies. The Rural Infrastructure Development Program is one of the poverty alleviation programs through the provision of access to basic infrastructure services in rural areas. This program is based on the lack of basic infrastructure that can be accessed by rural communities, causing limitations in carrying out activities including economic activities, which is one of the causes of poverty in rural areas. PIIP organized by the government began in 2007 and is under the legal umbrella of PNPM Mandiri under the auspices of the Ministry of Public Works, Directorate General of Human Settlements. PIIP in this study was conducted in Wonorejo Village, Poncokusumo District, Malang Regency in 2014-2015. The PIIP implementation is Bottom Up where the community is directly appointed as the program implementer from the planning until the activity is completed. Selection The type of infrastructure to be built is also determined by the community. This study uses the concept of impact evaluation Samodra Wibawa which describes 4 evaluation indicators, namely, individual impacts consisting of psychological impact, environmental impact, economic impact, social and personal impacts, second with regard to organizational impact, third impact on society, and fourth impact on institutions and social systems.

The results of this study indicate that PIIP in the village of Wonorejo has been running very well as evidenced by the various social impacts that occur in the community that are large enough to make various changes to the community towards a positive direction. Although there are still shortcomings in terms of maintenance due to careless garbage disposal in the bridge area. The recommendation in this study is to review the maintenance of basic infrastructure that has been built so that its existence can continue to be utilized as well as possible.

Keywords: Poverty, Rural Infrastructure Development Program, Social Impact Evaluation.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Studi Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kajian Konseptual	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Evaluasi Kebijakan Publik	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Fungsi Evaluasi Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Evaluasi Dampak menurut Samodra Wibawa	Error! Bookmark not defined.
defined.	
2.2.7 Alur Pikir Peneliti	Error! Bookmark not defined.

BAB III	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3 Teknik Pemilihan Informan.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Jenis data	Error! Bookmark not defined.
3.5 Teknik pengumpulan data	Error! Bookmark not defined.
3.5.1 Wawancara.....	Error! Bookmark not defined.
3.5.2 Observasi.....	Error! Bookmark not defined.
3.5.3 Studi Dokumentasi.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Analisa Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM	Error! Bookmark not defined.
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Deskripsi wilayah	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Kependudukan	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
4.1.4 Kondisi Ekonomi	Error! Bookmark not defined.
4.1.5 Aparatur	Error! Bookmark not defined.
4.1.6 Sarana dan Prasarana Desa	Error! Bookmark not defined.
4.2 Gambaran Umum Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.....	Error!
	Bookmark not defined.
4.2.1 Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.

4.2.2 Organisasi dan Pembagian peran	Error! Bookmark not defined.
4.2.3 Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pencairan Dana .	Error! Bookmark not defined.
4.2.4 Kriteria Teknis Infrastruktur	Error! Bookmark not defined.
4.2.5 Tahapan Pelaksanaan	Error! Bookmark not defined.
4.2.6 Pengawasan dan Pelaporan	Error! Bookmark not defined.
4.2.7 Penanganan Pengaduan dan Masalah	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
5.1 Dampak Terhadap Individual	Error! Bookmark not defined.
a. Dampak Psikis.....	Error! Bookmark not defined.
b. Dampak Lingkungan.....	Error! Bookmark not defined.
c. Dampak Ekonomi	Error! Bookmark not defined.
c.Dampak Sosial Serta Personal	Error! Bookmark not defined.
5.2 Dampak Organisasional	Error! Bookmark not defined.
5.3 Dampak Pada Masyarakat	Error! Bookmark not defined.
5.4 Dampak Pada Lembaga dan Sistem Sosial ..	Error! Bookmark not defined.
BAB VI	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
6.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
6.2 Rekomendasi	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR ISTILAH

- APBN : Merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR, APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
- BLM : Merupakan singkatan dari Bantuan Langsung Masyarakat. Bantuan ini merupakan bantuan langsung yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
- Evaluasi : Merupakan serangkaian tahapan dari kebijakan publik. Evaluasi merupakan tahap akhir dalam sebuah proses kebijakan.

Infrastruktur : Merupakan sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya, yang mana sarana ini dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial.

Karang Taruna : Merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

LPMD : Merupakan kepanjangan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. LPMD adalah lembaga yang bertugas menyusun rencana pembangunan partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

PPIP : Merupakan singkatan dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Program ini merupakan program yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah kemiskinan berkaitan dengan akses pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

PNPM : Merupakan singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program ini merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan.

SK : Merupakan singkatan dari Surat Keputusan. SK adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan persentase penduduk miskin Menurut daerah, Maret 2014-Maret 2017.....	1
Tabel 1.2	Data kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016.....	6
Tabel 1.3	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Malang 2011-2015.....	7

Tabel 1.4	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan bersama dan Kantor Pusat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Tahun 2014.....	9
Tabel 1.5	Kegiatan Proyek PPIP Desa Wonorejo tahun 2014-2015.....	11
Tabel 2.1	Daftar Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian.....	33
Tabel 4.1	Jumlah penduduk Desa Wonorejo menurut kelompok umur tahun 2016.....	41
Tabel 4.2	Tamatan Sekolah Masyarakat.....	42
Tabel 4.3	Mata Pencarian Penduduk Tahun 2016.....	44
Tabel 4.4	Struktur Pemerintahan Desa Wonorejo.....	45
Tabel 4.5	Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonorejo.....	46
Tabel 4.6	Sarana Pendidikan yang ada di Desa Wonorejo.....	46
Tabel 4.7	Sarana kesehatan di Desa Wonorejo.....	47
Tabel 4.8	Struktur Organisasi dan PPIP tahun 2014.....	49
Tabel 5.1	Daftar Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA. 2014 Kabupaten Malang.....	68
Tabel 5.2	Perbandingan dampak Psikis sebelum dan sesudah dibangun Jembatan dan Jalan.....	78
Tabel 5.3	Perbandingan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah pembangunan jembatan dan jalan.....	88
Tabel 5.4	Kesejahteraan keluarga di Desa Wonorejo.....	99
Tabel 5.5	Perbandingan kondisi ekonomi sebelum dan sesudah pembangunan jembatan dan jalan.....	100
Tabel 5.6	Perbandingan kondisi Sosial dan Personal sebelum dan sesudah adanya jembatan dan jalan.....	107
Tabel 5.7	Perbandingan kondisi organisasional sebelum dan sesudah pembangunan jembatan dan jalan.....	114
Tabel 5.8	Perbandingan kondisi Sosial dan Personal sebelum dan sesudah adanya jembatan dan jalan.....	119
Tabel 5.9	Perbandingan kondisi lembaga dan sistem sosial sebelum dan	

sesudah pembangunan jembatan dan jalan.....121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Desa Wonorejo.....	39
Gambar 4.2	Luas wilayah Desa Wonorejo dalam grafik.....	40
Gambar 5.1	Piagam penghargaan Desa Wonorejo.....	72
Gambar 5.2	Kondisi Jembatan sebelum dan sesudah dibangun.....	81
Gambar 5.3	Kondisi drainase sebelum dan sesudah dibangun jembatan.....	84
Gambar 5.4	Sebelum dan sesudah jalan rabat beton dibangun.....	86
Gambar 5.5	Kondisi Jembatan saat ini.....	88
Gambar 5.6	Kegiatan masyarakat dalam pengangkutan hasil panen.....	93
Gambar 5.7	Tanaman di ladang sekitar jembatan.....	98

Gambar 5.8	Kegiatan musyawarah.....	103
Gambar 5.9	Anggota Karang Taruna yang terlibat dalam PPIP.....	112
Gambar 5.10	Kerja Bhakti pelaksanaan PPIP.....	116





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda.¹ Salah satu negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi adalah Indonesia.

Berdasarkan data dari hasil survey penduduk pada tahun 2014-2017, menunjukan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2014-Maret 2017

Periode	Penduduk Miskin (Juta Orang)			Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Maret 2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25
September 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96
Maret 2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22

¹Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008 : 1 – 11, Hlm: 02.

September 2015	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13
Maret 2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86
September 2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70
Maret 2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64
September 2017	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12

Sumber : Bps.go.id (berita resmi statistik No. 86/09/Th. XVIII, 15 September 2015, No. 05/01/Th. XX, 3 Januari 2017, No. 05/01/Th. XXI, 2 Januari 2018).

Berdasarkan tabel dapat diketahui jumlah dan persentase kemiskinan di Indonesia. Sebagian besar penduduk miskin bertempat tinggal di perdesaan. Hal tersebut diikuti dengan angka kemiskinan di perkotaan yang masih cukup besar pula. Meski demikian, baik di perkotaan maupun di perdesaan jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dan penurunan. Namun yang menjadi permasalahan adalah jumlah penurunan belum menunjukkan angka yang cukup besar. Jika dilihat dari tabel, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2014 berjumlah 14,17 persen dan hingga September 2017 mengalami penurunan menjadi 13,47 persen. Artinya, dalam kurun waktu ± 4 tahun persentase penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,70% secara keseluruhan. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 sebesar 17,77 mengalami penurunan menjadi 16,31 juta jiwa, turun sebesar 1,46 juta jiwa.

Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidak-mampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan

partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum; kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Kompleksitas kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengertian dan dimensi saja namun berkaitan juga dengan metode yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan.² Sejalan dengan permasalahan kemiskinan yang multidimensi dan kompleks, penyebab kemiskinan pun juga berbeda-beda dan sangat kompleks. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran yang cukup tinggi karena lapangan pekerjaan sedikit, tingkat pendidikan yang masih rendah, tingkat kesejahteraan yang disebabkan oleh pendapatan yang rendah dan sebagainya.

Ginanjari Kartasmita juga menyebutkan Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya; rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian.³ Sementara, dalam laporan yang dikeluarkan dari *WorldBank*, diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu; Pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur dan lokasi

²Ibid,

³ Ibid, Hlm: 05

geografis.⁴ Berkaitan dengan faktor penyebab permasalahan kemiskinan yang ada, keterbatasan infrastruktur merupakan salah satu hal yang pokok yang harus mendapatkan perhatian serius. Hal ini tidak lain dikarenakan infrastruktur merupakan kunci utama menuju pelayanan dasar dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Istilah infrastruktur merupakan salah satu kata yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan dalam pembangunan ekonomi kawasan, baik perdesaan maupun perkotaan serta pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan sarana publik yang primer atau pokok dalam menjalankan perekonomian baik dalam wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan. Keberadaan infrastruktur akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah atau wilayah dimana keberadaan infrastruktur yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Selain berfungsi memfasilitasi, keberadaan infrastruktur dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan distribusi aliran barang. Adanya infrastruktur yang memadai akan menciptakan berbagai kemudahan serta menjadi salah satu penunjang baik dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah perdesaan yang paling banyak menghadapi permasalahan keterbatasan infrastruktur. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan harus terus diupayakan untuk mengurangi berbagai kesenjangan.

⁴ Ibid,

Pembangunan perdesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 70% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah perdesaan. Oleh karena itu pembangunan masyarakat perdesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di perdesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.⁵

Salah satu jenis infrastruktur yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah jembatan dan jalan, dimana menurut UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan di mana jalan berperan sebagai prasarana transportasi yang memiliki peran penting dalam ekonomi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagai prasarana distribusi barang dan merupakan kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat wilayah Republik Indonesia. Pengaturan mengenai jembatan masuk kedalam bagian daripada jalan disamping jalan tol, jalan umum, dan jembatan tol berdasarkan Perpres nomor 122 tahun 2016. Salah satu program pembangunan yang secara khusus menangani pembangunan infrastruktur dasar adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

⁵Raharjo, Adisasmita, 2013, *Pembangunan Perdesaan (pendekatan partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm: 63

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan atau yang lebih dikenal sebagai PPIP, dicanangkan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2007. PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat di bawah payung PNPM Mandiri. PPIP merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Tujuan diciptakan PPIP adalah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas ke pelayanan infrastruktur dasar permukiman perdesaan yang mendukung pengembangan potensi desa dengan berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.⁶ PPIP dilaksanakan dengan menggunakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), merupakan dana stimulan sebesar Rp 250 juta, untuk membiayai upaya peningkatan kualitas dan akses pelayanan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi kawasan.⁷

Lokasi PPIP tersebar di 32 (tiga puluh dua) Provinsi, dengan sasaran lokasi mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum. Salah satu Provinsi lokasi sasaran PPIP adalah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur memiliki jumlah angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari BPS hasil sensus tahun

⁶Buku Pedoman PPIP Tahun 2014.

⁷Yemim Krenhazia, dkk, *Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Ppip) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara (Studi Kasus: Desa Korobonde, Korowou, Wawopada)*, Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 12, Desember 2016 hlm 184.

2015-2016 menunjukkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur berdasarkan daerah-daerah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Kabupaten Malang	292900	293740	283960
2.	Jember	269500	265100	266.90
3.	Sampang	240400	227800	225.13
4.	Probolinggo	237000	240470	236.72
5.	Sumenep	216800	216140	211.92

Sumber : Data diolah oleh penulis berdasarkan 5 daerah Jawa Timur dengan penduduk miskin terbanyak berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2015-2016 (Bps.go.id)

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin tertinggi berada di wilayah Kabupaten Malang dengan jumlah sebesar 292,9 ribu penduduk. Sementara itu, dibawah Kabupaten Malang terdapat Kabupaten Jember dengan 269,5 ribu penduduk miskin, Kabupaten Sampang dengan 240,4 ribu, Kabupaten Probolinggo dengan 237,0 ribu penduduk, terakhir Kabupaten Sumenep dengan 216,8 ribu penduduk miskin. Salah satu yang menjadi sorotan adalah wilayah Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang merupakan daerah terbesar kedua di Jawa Timur dengan luas wilayah 3.534,86 km² atau 353.486 ha. Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33

Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 378 Desa.⁸Selain menjadi Kabupaten pertama yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur, data menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Malang mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tabel 1.3

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Malang 2011-2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Penduduk Miskin (%)
2011	287430	12
2012	274600	11
2013	287400	11
2014	280310	11
2015	292870	12

Sumber: malangkab.bps.go.id (diakses pada tanggal 04 November 2017)

Berdasarkan tabel, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Hal yang memprihatinkan adalah penurunan jumlah yang terjadi tidak besar namun kenaikan jumlah penduduk miskin melebihi jumlah awal pada tahun 2011. Data pada tabel diatas menunjukan bahwa kebijakan ataupun program pemberantasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Malang perlu dipertanyakan dampak ataupun efektifitasnya. Hal tersebut dikarenakan program atau kebijakan tersebut tujuannya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun yang terjadi justru angka kemiskinan tidak menurun secara signifikan yang berakibat pada masih banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis

⁸Informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD) Kabupaten Malang tahun 2014, hlm: 1.

kemiskinan. Termasuk juga dengan adanya program PPIP, perlu dilakukan evaluasi dampak agar pelaksanaannya dapat dinilai serta diketahui dampak yang dihasilkan.

Berdasarkan Surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor B.025/Sesmen-PDT/I/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Verifikasi dan Updating Status Desa tahun 2010 dan berdasarkan surat Bupati Malang Nomor 050/999/421.203/2010, tanggal 15 April 2010, perihal Updating Desa Tertinggal dan Maju, terdapat 110 desa tertinggal dari 390 desa/kelurahan atau 28%, sedangkan berdasarkan Surat Kepala BPM Kabupaten Malang Nomor:414.56/1478/421.208/2012, tanggal 22 Nopember 2012, perihal hasil Self Assesment Penentuan Desa Tertinggal terdapat 51 Desa Tertinggal dan pada tahun 2013 terdapat 22 Desa Tertinggal. Selanjutnya pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/478/KEP/421.013/2014 tentang Penetapan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Malang Tahun 2014 terdapat 15 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal serta pada tahun 2015 ditargetkan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal akan ditingkatkan menjadi status desa maju atau sangat maju.⁹ Oleh sebab itu maka beberapa desa di kabupaten malang mendapatkan dana bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Tabel 1.4

Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman oleh Kantor Pusat Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Tahun 2014

⁹LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) 2014 <http://www.malangkab.go.id>, diakses pada tanggal 04 November 2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran	%	Keluaran
1	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan pemukiman	600.000.000	100	Infrastruktur Perdesaan (PPIP) (6 Desa)
2	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan.	4.200.000.000	100	Infrastruktur Air Limbah (12 Kawasan)
3	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum	800.000	100	SPAM Perdesaan (4 Desa)
4	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung dan rumah negara	9.523.750.000	100	Keswadayaan Masyarakat (98 Desa/Kelurahan)
TOTAL		15.203.750.000		

Sumber: Diolah dari LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) 2014 <http://www.malangkab.go.id>, diakses pada tanggal 04 November 2017.

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 Desa penerima Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Kabupaten Malang berjumlah 6 desa yaitu Desa Pajaran, Ngebruk, Wonorejo, Ngingit, Pandanajeng, Kidal. Masing-masing terbagi atas 2 kecamatan yaitu Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Poncokusumo. Salah satu desa yang menerima program bantuan PPIP adalah Desa Wonorejo kecamatan Poncokusumo. Desa Wonorejo terpilih menjadi salah satu desa penerima bantuan PPIP pada tahun 2014.

Desa wonorejo merupakan Secara Administratif berada di wilayah Kecamatan Poncokusumo. Desa ini terletak di kaki gunung semeru. Kondisi yang demikian

menyebabkan wilayah desa memiliki iklim yang cukup dingin dan tanah yang subur sehingga sangat sesuai untuk kegiatan bercocok tanam. Desa Wonorejo terdiri dari 1265 KK berdasarkan dokumen desa tentang tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2017. Berdasarkan jumlah tersebut, sekitar ± 559 KK merupakan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Penduduk Desa Wonorejo sebagian besar bermata pencaharian sebagai seorang petani.

Pertanian di Desa Wonorejo merupakan komoditas unggulan, karena produksi hasil pertanian yang baik hingga dapat meng-suplay kebutuhan produk hasil pertanian ke luar desa, bahkan luar kabupaten malang. Kondisi yang demikian merupakan suatu potensi yang harus dikembangkan dengan terus memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di Desa. Namun, salah satu kendala yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Desa Wonorejo adalah sulitnya akses menuju ke tempat pertanian atau ladang. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi jalanan yang dilewati terlalu curam dan sempit sehingga masyarakat harus berhati-hati ketika menuju ladang. Ketika musim hujan kondisi jalan akan lebih memprihatinkan dan membahayakan keselamatan hingga tidak dapat dilewati sama sekali. Selain itu, kendaraan-kendaraan yang mengangkut produksi hasil pertanian tidak dapat langsung menuju ke tempat tujuan. Untuk dapat memasarkan produk ke tempat tujuan, bahkan kendaraan harus memutar ± 5 kali lipat dari jalan yang seharusnya.

Berdasarkan kondisi dan kendala yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat, dalam proses Rencana Kegiatan Masyarakat melalui program PPIP diputuskan untuk membangun jembatan dan jalan rabat beton yang menjadi akses bagi

masyarakat menuju tempat bekerja. Jembatan ini juga menghubungkan dua desa yakni Desa Wonorejo dan Desa Putuk. Pemilihan mengenai infrastruktur apa yang akan dibangun didasarkan pada kebutuhan pokok masyarakat itu sendiri, bukan keputusan dari pemerintah. infrastruktur yang akan dibangun juga harus benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat bukan hanya satu golongan tertentu.

Pelaksanaan PPIP di Wonorejo terbagi atas 2 tahapan. Tahap pertama berlangsung dari 20 Oktober 2014 hingga 7 Desember 2014. Sementara Tahap Kedua berlangsung dari bulan 6 Juli 2015 hingga 8 agustus 2015.¹⁰ Pada kedua tahap tersebut masing-masing melakukan pembangunan sebagai berikut:

Tabel 1.5
Kegiatan Proyek PPIP Desa Wonorejo tahun 2014-2015

No.	Jenis Kegiatan/Program	Volume/Dimensi
1	Pembangunan Jembatan	2,5 x 4,5 , t = 4 m
2	Pembangunan Jalan Rabat Beton	2,5 x 700 m, t = 10 cm

Sumber : Laporan Akhir Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Desa Wonorejo tahun 2015.

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa PPIP di Desa Wonorejo berlangsung selama 2 tahapan. Pada kedua tahapan tersebut telah dilakukan pembangunan Jembatan dan Rabat Beton. Pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangun berdasarkan atas usulan masyarakat dan infrastruktur yang dirasa paling banyak memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Pembangunan Jembatan dan jalan rabat beton bertujuan

¹⁰Berdasarkan Rencana Kegiatan Masyarakat PPIP tahun 2014 dan laporan akhir PPIP tahun 2015.

agar dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap bidang layanan publik serta meningkatkan potensi perekonomian masyarakat melalui perbaikan sarana prasarana tempat masyarakat bekerja.

Berdasarkan pada pembangunan jembatan dan jalan rabat beton tersebut, salah satu prestasi membanggakan pada tahun 2015 yang berhasil diraih oleh Desa Wonorejo adalah mendapatkan juara 3 dalam Lomba Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu penilaian yang dijadikan dasar dalam lomba PPIP tersebut adalah pada tingkat partisipasi masyarakat dalam PPIP. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat cukup baik.

Namun setelah beberapa tahun program pembangunan selesai, hingga saat ini, dari berbagai keberhasilan yang diraih masih banyak hal yang perlu dilakukan peninjauan ulang apakah program tersebut benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Tidak hanya berbentuk kemenangan penghargaan tertulis tapi lebih jauh lagi, bagaimakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Apakah dampak yang dirasakan besar atau hanya segelintir orang saja yang merasakan dampaknya. Kemudian bagaimana kondisi masyarakat setelah dibangunnya jembatan dan jalan baik dari segi fisik maupun sosial. Apakah pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan telah sesuai dengan apa yang dijadikan tujuan yang telah ditetapkan serta sejauhmana pembangunan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses pelayanan infrastruktur dasar. Sehingga kemudian perlu dilakukan evaluasi berkaitan dengan dampak yang dirasakan dan terjadi di masyarakat.

Evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai. Terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin pula disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya.

Evaluasi dampak yang terjadi memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. Dalam kaitannya dengan dampak, perlu dipahami, jika adanya dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Di antara dampak-dampak yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan.¹¹ Sementara untuk melihat dampak dari program pembangunan infrastruktur perdesaan pada penelitian ini didasarkan pada kelompok-kelompok atau unit-unit sosial yang terkena dampak tersebut. Diantaranya adalah individu, organisasional, masyarakat serta lembaga dan sistem sosial.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh dinamika dan kondisi penduduk. Dalam pembangunan, peran penduduk (manusia) adalah subjek sekaligus

¹¹ Samudra Wibawa, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm: 35.

objek pembangunan. Sebagai subjek, penduduk merupakan sumber daya penggerak pembangunan. Sementara itu sebagai obyek, penduduk adalah pihak yang dibangun sekaligus penikmat hasil pembangunan. Dengan demikian, penduduk adalah pelaku dan tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.¹² Dengan melihat kondisi Desa, permasalahan yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Wonorejo dengan mengangkat judul “Evaluasi Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. evaluasi dampak dalam penelitian ini akan diambil hingga pada tahun 2018 saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Evaluasi dampak Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Wonorejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian skripsi ini adalah untuk Menjelaskan Evaluasi mengenai dampak dari Program Pembangunan Infrastruktur pedesaan di Desa Wonorejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

¹²Bps.go.id, *Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas 201*, hlm:3

1. **Manfaat Akademik**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya yang berkaitan dengan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dalam pembangunan pedesaan dan juga sebagai referensi bagi penelitian sejenis.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi Pemerintah Desa terkait sekaligus Pemerintah baik daerah maupun pusat mengenai dampak yang dihasilkan dari Program Pengentasan Kemiskinan seperti Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan sekaligus memberikan pertimbangan mengenai kebijakan yang akan dibuat selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa rujukan sebagai bahan referensi serta pembandingan dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal ini mengingat ilmu pengetahuan terus berkembang dan berbagai penelitian terus mengalami pembaruan. Berikut daftar studi penelitian terdahulu yang dipilih oleh peneliti:

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	PERBEDAAN
Chris Wijayanti Puspita (2013)	Partisipasi Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2013 (Studi Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)	kualitatif deskriptif	Mengkaji tentang partisipasi masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui PPIP. Menggunakan konsep partisipasi masyarakat.
Muhammad Amin Cakrawijaya, dkk (2014)	Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman	Triangulasi (Mix-Method)	Mengkaji hubungan antara program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan neraca ekonomi sumberdaya lahan, peningkatan pendapatan, dan diversifikasi ekonomi.

Ahmad Sururi (2015)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak	kualitatif deskriptif	Mengkaji tentang hubungan antara PPIP dengan kesejahteraan masyarakat melalui konsep pemberdayaan yang terdiri dari 12 prinsip pemberdayaan oleh Dahatma dan Bhatnagar.
Yemim Krenhazia (2016)	Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara 2016 (Studi Kasus: Desa Korobonde, Korowou, Wawopada)	Deskriptif kualitatif	Mengkaji evaluasi di kecamatan Lembo, melakukan perbandingan di 3 Desa dan menggunakan indikator evaluasi Wiliam M. Dunn
Almas Firdausi, Indah Prabawati	Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Ppip) (Studi Pada Pembangunan Irigasi Petani Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)	Deskriptif kualitatif	Mengkaji dampak dari kebijakan PPIP dengan menggunakan indikator model dampak evaluasi kebijakan milik Thomas J. Cook dan Frank P. Schioli, Jr (1975)

Sumber : Berdasarkan rekapan penulis, 2018.

Pertama, Penelitian **Chris Wijayanti Puspita (2013)** tentang Partisipasi Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2013 (Studi Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). Penelitian ini berfokus pada keterlibatan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan desa dalam PPIP tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam PPIP di

Desa Parangargo tahun 2013, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, dan peranan pemerintah Desa Parangargo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Parangargo dalam PPIP tahun 2013 cukup baik. Partisipasi masyarakat dan LKD terbagi menjadi 3 yakni partisipasi dalam bentuk ide atau pemikiran, tenaga, dan konsumsi. Ada tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa parangargo yaitu kondisi masyarakat, kondisi LKD, dan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Ada tiga peranan pemerintah Desa Parangargo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Parangargo, yaitu mengadakan forum diskusi tingkat desa, mengaktifkan kembali PKK, dan mengaktifkan kembali karang taruna.¹

Berdasarkan penelitian Crist dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji mengenai Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Perbedaan terletak pada fokus penelitian, konsep dan indikator yang digunakan. Penelitian ini menggunakan konsep evaluasi dampak.

Kedua, penelitian **Muhammad Amin Cakrawijaya, dkk (2014)** tentang Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode *pendekatan triangulasi atau mix-method* dan *teknik sampling* multi-stage sampling. Penelitian berfokus pada hubungan antara program pembangunan

¹Chris Wijayanti Puspita (2013) tentang Partisipasi Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2013 (Studi Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

infrastruktur perdesaan dengan neraca ekonomi sumberdaya lahan, Program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, Program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan diversifikasi ekonomi di Desa Wonokerto.

Hasil dari penelitian ini infrastruktur yang dibangun melalui PPIP secara umum hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, dan bersifat sementara atau tidak berkelanjutan. Korelasi pembangunan infrastruktur PPIP terhadap pertumbuhan ekonomi perdesaan di Desa Wonokerto memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata desa dimana pembangunan infrastruktur oleh PPIP berkontribusi dalam meningkatkan 27,17% nilai lahan dan 10,13% pendapatan rata-rata masyarakat. Kedua meskipun pembangunan infrastruktur oleh PPIP berkontribusi secara positif, namun hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, serta bersifat sementara (tambahan pendapatan dari keterlibatan proses pelaksanaan infrastruktur). Ketiga mengingat penelitian ini menggunakan studi kasus, terdapat pendekatan-pendekatan yang mungkin tidak ditemui pada kasus lain sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir.²

Berdasarkan penelitian amin, terdapat persamaan mengenai program yang diteliti yakni PPIP. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus untuk meneliti tentang dampak yang dihasilkan dari program PPIP. Perbedaan juga terletak pada metode yang digunakan, fokus, dan indikator yang digunakan.

²Muhammad Amin Cakrawijaya, dkk, 2014, Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

Ketiga, penelitian **Ahmad Sururi 2015** tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam.

Hasil dari penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak sudah melaksanakan 10 dari 12 prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan Dahatma dan Bhatnagar dalam Mardikanto. Kedua, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak belum melaksanakan 2 prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dari 12 prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kesadaran, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, terakhir ada faktor budaya yaitu kepatuhan terhadap tokoh penguasa.³

Berdasarkan penelitian Ahmad, terdapat persamaan dengan penelitian ini, yakni berkaitan dengan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Perbedaan terletak pada fokus kajian yang diteliti. Ahmad menggunakan pemberdayaan

³Ahmad Sururi, 2015, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

sementara penelitian ini menggunakan evaluasi dampak untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari PPIP.

Keempat, penelitian **Yemim krahazia (2016)** tentang Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Ppip) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara (Studi Kasus: Desa Korobonde, Korowou, Wawopada). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi PPIP berdasarkan 5 prinsip evaluasi William N. Dunn dan mengetahui dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan PPIP ini mampu meningkatkan akses masyarakat menuju fasilitas umum melalui pembangunan infrastruktur fisiknya. Namun, program ini belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perdesaan, dikarenakan penerima manfaat PPIP lebih di difokuskan pada masyarakat umum dan tidak tepat sasaran yaitu pada masyarakat miskin.⁴

Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan PPIP dan evaluasi. Namun penelitian ini menggunakan konsep evaluasi dampak sedangkan penelitian Yemim Krahazia menggunakan evaluasi milik William N Dunn. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang diteliti dan metodologi dalam meneliti.

⁴Yemim krahazia (2016), Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara (Studi Kasus: Desa Korobonde, Korowou, Wawopada). Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 12, Desember 2016.

Kelima, Almas Firdausi, Indah Prabawati (2012) tentang Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Studi Pada Pembangunan Irigasi Petani Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah untuk mendeskripsikan dampak dari PPIP.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dampak yang diinginkan yaitu Bertambahnya Produktifitas Lahan Pertanian, Peningkatan Penghasilan Keluarga, Adanya Peningkatan Daya Beli, Adanya Peningkatan Pendidikan Anak ke Jenjang Yang Lebih Tinggi, Adanya Peningkatan Harga Jual Tanah, Mempererat Hubungan Persaudaraan Antar Petani. Dampak yang tidak diinginkan yaitu dalam Prosesnya Seringkali Terdapat Persaingan, Tanah Desa Kemasantani Banyak yang Menjadi Milik Orang Luar Desa.⁵

Penelitian almas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan PPIP. Perbedaan terletak pada fokus kajian yang diteliti, apabila almas menggunakan evaluasi dampak berkaitan dengan indikator dampak yang diinginkan dan dampak yang tidak diinginkan maka penelitian ini menggunakan milik samodra wibawa yang terdiri dari 4 bagian utama. Metode dan konsep yang digunakan juga mengalami perbedaan dengan penelitian almas.

2.2 Kajian Konseptual

Penelitian ini mengangkat judul “Evaluasi Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo,

⁵Almas Firdausi, Indah Prabawati (2012), Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Studi Pada Pembangunan Irigasi Petani Desa Kemasantani Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Malang”, sehingga kajian yang akan digunakan oleh penulis berkaitan dengan evaluasi dampak kebijakan.

2.2.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan public guna di pertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauhmana tujuan dapat dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”. Tujuan pokok dari evaluasi adalah bukan untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tujuan selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.⁶

Pengertian evaluasi kebijakan secara lengkap mencakup tiga pengertian berikut:

- 1) Evaluasi awal, yaitu proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan (ex-ante evaluation).
- 2) Evaluasi dalam proses implementasi dan monitoring.
- 3) Evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan (ex-post evaluation).⁷

Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam sebuah proses kebijakan publik.

Ada banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan evaluasi.

Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris

⁶Nugroho dalam Azwar Annas, 2017, *interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan*, Makassar: Celebes Media Perkasa, Hlm: 55.

⁷Said zainal abidin, 2012, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika, Hlm: 165.

terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.⁸ Menurut William N. Dunn, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*).⁹

Sementara itu, riset evaluasi menurut Wayne Parson membahas dua dimensi yaitu bagaimana sebuah kebijakan bisa diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan, dan dampak aktual dari kebijakan.¹⁰ Jadi dapat diketahui bahwa dalam melakukan sebuah evaluasi terdapat dua dimensi utama yang ingin dicapai. Dimensi pertama berkaitan dengan tujuan yang ditetapkan dimaksudkan adalah ketika mengevaluasi kebijakan didasarkan pada tujuan kebijakan itu sendiri. Sementara yang kedua adalah dimensi dampak aktual dari kebijakan yang dimaksudkan adalah evaluasi kebijakan menghasilkan dampak-dampak yang kemudian dijadikan tolak ukur keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan atau program.

Evaluasi dampak kebijakan merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan oleh seorang evaluator di dalam sebuah evaluasi kebijakan. Evaluasi dampak lebih berfokus pada output dan dampaknya dibandingkan pada prosesnya. Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Akibat yang dimaksud adalah baik akibat yang mampu menimbulkan pola perilaku baru kelompok sasaran (*impact*) maupun akibat yang tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effect*).

⁸Thomas R Dyee dalam Wayne Parson, 2008, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Kebijakan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Grup, Hlm: 547.

⁹Almas Firdausi, Indah Prabawati, 2012, *Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Ppip) Studi Pada Pembangunan Irigasi Petani Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto*, UNESA, hlm: 03.

¹⁰ Op Cit, Wayne parson, Hlm: 548.

2.2.2 Fungsi Evaluasi Kebijakan

Samodra Wibawa memberikan penjelasan mengenai fungsi evaluasi kebijakan. Menurut Samodra Wibawa, evaluasi kebijakan publik memiliki 4 fungsi yaitu:¹¹

1. Eksplanasi, Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan, Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standard dan prosedur yang diterapkan oleh kebijakan.
3. Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

2.2.3 Evaluasi Dampak menurut Samodra Wibawa

Menurut Samodra Wibawa evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada *output* dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya, sekalipun yang terakhir ini tidak di kesampingkan dari penelitian

¹¹ Riant Nugroho, 2006, Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Hlm: 156.

evaluatif. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Di antara dampak-dampak yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tak diharapkan. Pada akhir implementasi kebijakan menilai pula dampak-dampak yang tak terduga, yang di antaranya ada yang diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tak diinginkan.

Evaluasi dampak merupakan aktifitas yang dimulai dari input, proses, output kebijakan. Menurut Samodra Wibawa, di dalam evaluasi juga terdapat unit sosial yang dapat terkena dampak kebijakan, antara lain:¹²

1. Dampak Individual

Sebuah kebijakan dapat dilihat hasilnya atau dampaknya apabila kebijakan tersebut benar-benar telah selesai diimplementasikan. Hal tersebut dikarenakan, dampak yang dihasilkan tidak serta merta terlihat dalam kurun waktu yang singkat. Dampak tersebut berjangka waktu. Salah satu jenis dampak adalah dampak individu. Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek-aspek biologis, psikis, lingkungan hidup, ekonomi dan sosial serta personal.

a. Dampak Biologis dan dampak psikis

Dampak biologis biasanya menyangkut persoalan penyakit, cacat fisik dan kurang gizi. Sementara itu, dampak psikis dapat berupa alienasi, stress, depresi, kepercayaan diri, cinta dan emosi, dan lain-lain. Dampak Psikis merupakan suatu

¹² Samodra Wibawa, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm: 53-59.

dampak yang tidak dapat secara langsung dilihat, artinya perlu pendekatan lebih mendalam terhadap perasaan atau emosi seseorang.

b. Dampak Lingkungan

Sementara selanjutnya adalah berkaitan dengan dampak yang terjadi pada lingkungan. Lingkungan dalam hal ini berkaitan dengan keharusan untuk berpindahnya seseorang dari lingkungan tertentu karena adanya suatu proyek. Lingkungan tempat tinggal merupakan tempat yang harus terus dijaga dan dilestarikan kelangsungannya. Hal tersebut dikarenakan, di dalam lingkungan terdapat berbagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang. Lingkungan yang baik, bersih, dan aman merupakan tempat tinggal impian setiap orang. Lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi kehidupan baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Semakin baik lingkungan maka akan semakin besar pula dampak yang dirasakan. Dampak tersebut dapat terlihat secara langsung maupun secara tidak langsung.

c. Dampak ekonomi

Sementara untuk dampak ekonomi tidak hanya mengenai pekerja, tetapi juga konsumen dan pemilik modal, yaitu mengenai naik turunnya pendapatan, naik turunnya keuntungan dan naik turunnya harga dan kualitas barang. Dampak terhadap perekonomian merupakan salah satu dampak utama yang paling tampak.

d. Dampak Terhadap Sosial dan Personal

Terakhir dampak sosial dan personal merupakan dampak yang dapat dilihat atau dicontohkan dari kebebasan berpendapat, berkumpul, keamanan, dan lain-lain. Berkaitan dengan berpendapat, disini cenderung melihat bagaimanakah

keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam menyumbangkan atau mengeluarkan ide-ide serta keinginan yang hendak diwujudkan.

2. Dampak Organisasional

Dampak dari suatu kebijakan dapat dirasakan oleh suatu organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dapat berupa terganggu atau terbantunya pencapaian tujuan organisasi atau kelompok. Sementara itu, suatu kebijakan juga dapat menimbulkan dampak tak langsung terhadap sebuah organisasi atau kelompok, misalnya melalui peningkatan semangat kerja dan kedisiplinan dari anggota organisasi atau kelompok itu sendiri.

3. Dampak pada masyarakat

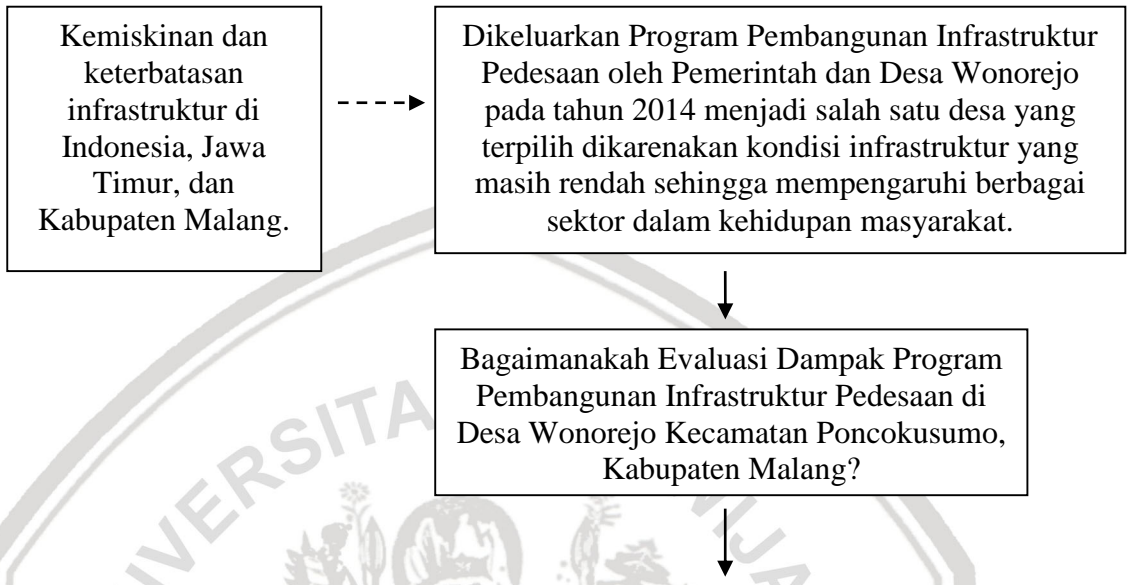
Masyarakat bukanlah unit sosial yang goal oriented seperti organisasi. Ia adalah suatu unit yang melayani para anggotanya. Jadi, walaupun ingin dikatakan bahwa masyarakat itu mempunyai tujuan tertentu, maka tujuannya adalah melayani individu-individu anggotanya sebaik mungkin. Oleh karena itu, dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Dalam hal ini masyarakat dianggap input yang menyediakan sumber daya tetapi sekaligus menampung tuntutan, sedangkan kualitas hidup para anggotanya merupakan output. Sementara itu, yang menjadi proses atau konversi dalam system ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengolah sumber daya guna memenuhi kebutuhan anggotanya.

4. Dampak pada lembaga dan sistem sosial

Dampak terhadap lembaga dapat berupa perubahan bentuk lembaga, sedangkan terhadap sistem sosial berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat serta berkaitan juga dengan perubahan sosial seperti isolasi desa. Dimaksudkan perubahan pada lembaga adalah apakah ada perubahan yang terjadi pada lembaga setelah kegiatan pembangunan selesai. Lembaga disini dapat berupa lembaga apa saja yang mengalami baik itu perubahan bentuk maupun perubahan struktur akibat dari pembangunan jembatan dan jalan. Sementara untuk perubahan sistem sosial mengacu pada tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan sosial yang ada di lingkungannya. Kedua hal tersebut penting dilihat dampaknya karena berkaitan dengan sejauhmana lembaga maupun sistem sosial yang ada di masyarakat mengalami perubahan setelah adanya kegiatan.

2.2.7 Alur Pikir Peneliti

Berikut alur pikir yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:



Hasil penelitian Indikator Evaluasi Dampak (Samodra Wibawa, 1994) :

1. Dampak Individual

- a. **Dampak Psikis** → Kemudahan akses menuju ladang sehingga memudahkan masyarakat.
- b. **Dampak Lingkungan** → Kondisi jembatan dan jalan menjadi semakin bersih karena sering dilakukan kerja bakti. Kondisi menjadi lebih aman, drainase sekitar jembatan di cor sehingga kuat dan aman ketika banjir datang. arus lalu lintas menjadi lancar dan polusi kendaraan dapat berkurang.
- c. **Dampak Ekonomi** → Biaya pengangkutan murah karena akses menuju ladang mudah. Peningkatan hasil produksi menjadi lebih banyak. Kenaikan harga jual tanah karena dibangun jembatan dan jalan sehingga posisinya menjadi startegis Meingkatkan peluang pekerjaan.
- d. **Dampak Sosial dan Personal** → Mengutamakan musyawarah dalam berbagai kegiatan, mulai perencanaan hingga selesai dan semua golongan termasuk yang masih muda. Masyarakat semakin terbuka dalam mengemukakan pendapat

2. Dampak Organisasional → Sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai, Meningkatnya kemampuan dan skill masyarakat dan organisasi yang ada di desa seperti karang taruna dan LPMD dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan suatu kegiatan. Kerjasama antar tim semakin erat dan semakin solid. Masyarakat, dan anggota karang taruna semakin aktif dalam berbagai kegiatan desa.

3. Dampak pada Masyarakat → Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan dan masyarakat semakin antusias.Meningkatkan semangat kerja masyarakat.

4. Dampak pada Lembaga dan sistem sosial → Mengurangi isolasi antar desa karena adanya jembatan penghubung antara desa, sehingga interaksi masyarakat semakin kuat. Berencana meningkatkan statusnya Menjadi desa wisata pertanian sehingga ada potensi sektor lain yang bisa dijadikan unggulan.

Sumber : Berdasarkan olahan Peneliti, 2018.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti tertarik untuk menggunakan metode ini karena dianggap paling sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, dengan metode kualitatif deskriptif, data hasil penelitian yang dihasilkan akan lebih jelas dan mendetail berdasarkan kondisi real di lapangan.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya. Oleh karena itu pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (fact finding). Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu.¹

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa bentuk penelitian yang bukan hanya disesuaikan dengan jenis data dan tujuan penelitiannya saja, tetapi dalam hal

¹Hadari, Nawawi, 2012, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm: 67.

paradigma berpikir, pendekatan masalah, batasan masalah, pertanyaan penelitian, hingga kegunaan dari hasil penelitian kualitatif sangat bervariasi dan fleksibel bergantung dari bentuk penelitian yang dipilih. Creswell dalam beberapa bukunya mengistilahkan bentuk-bentuk penelitian kualitatif ini dengan sebutan *model*. Atas dasar tersebut, maka pada buku ini istilah model digunakan walaupun hal tersebut hampir sama artinya dengan “bentuk” atau “jenis-jenis” penelitian kualitatif.²

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagian besar berada di Wilayah Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dan Kantor Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang.

3.3 Teknik Pemilihan Informan

Penelitian menggunakan teknik *purposeful sampling*. Teknik ini tergolong kedalam *non-random sampling* atau *non-probability sampling*. Teknik ini berdasarkan kepada cirri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena cirri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, teknik *sampling* yang sangat umum digunakan adalah teknik *Purposeful Sampling*. Dalam *Purposeful Sampling*, peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau memahami permasalahan pokok yang akan diteliti. Subjek penelitian dan lokasi penelitian yang dipilih dengan teknik ini biasanya disesuaikan dengan tujuan penelitian.³

²Haris herdiansyah, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, hlm: 60-61.

³Ibid, hlm: 106

Tabel 3.1

Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Abdul Fatah	Ketua OMS (Organisasi Masyarakat Setempat)
2.	Rawi	Ketua LPMD
3.	Ahmad Syaifudin Zuhri	Sekretaris PPIP
4.	M. Akmal	Kader Desa
5.	Moh. Sokeh	Kepala Desa Wonorejo
6.	Dian Laila	Anggota Karang Taruna
7.	Taman	Masyarakat
8.	Sudiksan	Masyarakat
9.	Sa'id	Masyarakat

Sumber : Olahan Penulis, 2018

3.4 Jenis data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu. Dalam penelitian apapun pasti melibatkan data sebagai “bahan/materi” yang akan diolah untuk menghasilkan sesuatu.⁴

Data kalau digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua: (1) data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden); (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, seperti biropusat statistik, departemen pertanian, dan lain-lain.⁵

⁴ Ibid, hlm: 116

⁵ Bagong, Suyanto, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm: 55-56.

3.5 Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pemilihan ketiga teknik tersebut didasarkan pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Wawancara, observasi, dan studi dokumentasi merupakan teknik yang paling baik karena untuk penelitian kualitatif deskriptif dapat membantu menjelaskan berbagai rangkaian peristiwa/kejadian dengan lebih detail dan mendalam. Selain itu, cara tersebut juga dinilai lebih mudah dan efektif dilakukan mengingat keterbatasan tenaga dan waktu peneliti. Sehingga diharapkan hasil penelitian yang akurat, mendalam, serta mampu menjelaskan kondisi dalam masyarakat secara nyata. Ada beberapa pengertian dari wawancara yang dikemukakan oleh para ahli. Dibawah ini merupakan pemikiran beberapa ahli berkaitan dengan teknik wawancara.

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua penelitian kualitatif. Karena seringnya wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif, seakan-akan wawancara menjadi ikon metode pengumpulan data penelitian kualitatif.⁶ Menurut Meolong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan tersebut. Gorden (dalam Herdiansyah, 2009) mendefinisikan wawancara, “interviewing is conversation between two people in which one person tries to direct the conversation to obtain information for some specific purpose”. Definisi menurut Gorden tersebut dapat diartikan bahwa

⁶Meolong dalam Haris, Herdiansyah, Op Cit, Hlm: 117.

wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Definisi wawancara berikutnya dikemukakan oleh Stewart & Cash (2008) yang didefinisikan sebagai berikut.⁷

An interview is interactional because there is an exchanging, or sharing of roles, responsibilities, feelings, belief, motives, and information. If one person does all of the talking and the other all of the listening, a speech to an audience of one, not an interview, is taking place.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Untuk itu, penguasaan teknik wawancara sangat mutlak diperlukan. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti ketika melakukan wawancara, jangan sampai subjek merasa seperti sedang diinterogasi oleh peneliti. Jika subjek merasa bahwa dirinya diinterogasi, maka subjek akan merasa tidak nyaman dan terancam karena dalam interogasi terkandung unsur tekanan dari salah satu pihaknya. Jika hal ini sampai terjadi, maka kejujuran dan keterbukaan subjek akan terganggu yang nantinya akan mempengaruhi validitas data yang diperoleh.⁸

3.5.2 Observasi

Metode pengumpulan data kualitatif lainnya yang juga sangat sering digunakan adalah observasi. Sebelum berkembangnya metode pengumpulan data seperti sekarang ini, metode observasi telah sering kali dilakukan sebagai metode pengumpulan data tradisional oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu.⁹ Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku

⁷Ibid, hlm 118.

⁸Ibid

⁹Ibid, hlm: 131

yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Karena mensyaratkan perilaku yang tampak, potensi perilaku seperti sikap dan minat yang masih dalam bentuk kognisi, afeksi, atau intensi atau kecenderungan perilaku tidak dapat diobservasi. Selain itu, observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu. Pengamatan yang tanpa tujuan bukan merupakan observasi. Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlihat dalam lingkungan tersebut beserta aktifitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.¹⁰ Teknik ini dipilih oleh penulis karena dianggap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta mendalam terhadap hasil data penelitian. Selain itu, melalui teknik observasi, peneliti dapat merasakan secara langsung dan nyata kondisi yang ada di lapangan.

3.5.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (herdiansyah, 2009).¹¹ Moleong (2008) mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan

¹⁰Ibid, hlm: 132

¹¹Ibid, hlm: 143

dalam studi dokumentasi ada dua yaitu : dokumen pribadi yang merupakan catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Tujuan dari studi dokumen pribadi adalah untuk memperoleh sudut pandang orisinal dari kejadian atau situasi nyata yang pernah dialami oleh subjek secara langsung disertai dengan situasi social yang melingkupinya dan bagaimana subjek mengartikan kejadian dan situasi tersebut. Terdapat dua dokumen pribadi yakni catatan harian (*diary*), surat pribadi, dan autobiografi. Sementara bentuk kedua dari studi dokumentasi adalah dokumen resmi yang terbagi kedalam dokumen internal dan eksternal.¹²

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut : Tahap pertama yakni pengumpulan data, tahap kedua yaitu reduksi data, tahap ketiga yaitu *Display* data, dan yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan dan/atau tahap verifikasi data.

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti

¹²Ibid hlm: 143-144

: komputer , dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi , maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Penarikan kesimpulan disusun berdasarkan pola-pola induktif yaitu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Setelah itu, makna-makna yang muncul dari data perlu diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya melalui *check* dan *crosscheck*.



BAB IV

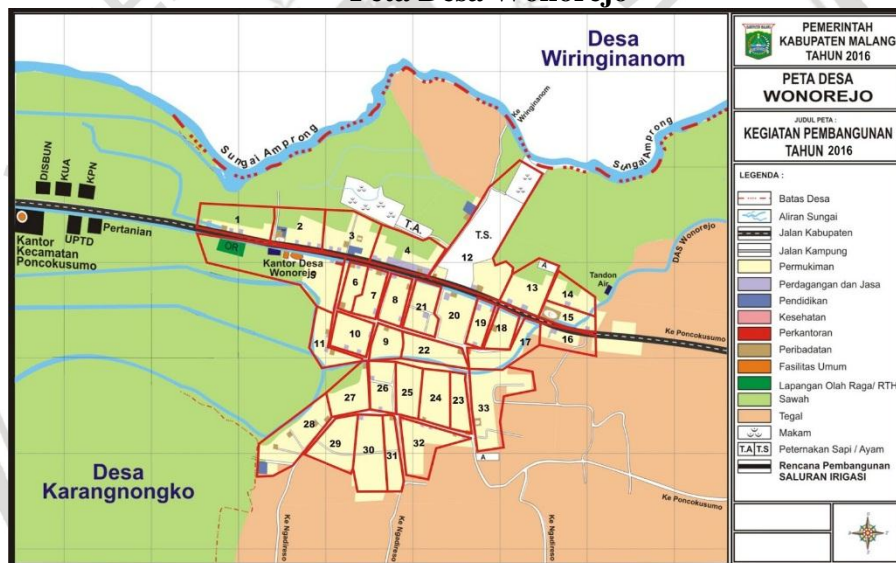
GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Deskripsi wilayah

Desa Wonorejo Merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Provinsi Jawa Timur. Adapun Desa Wonorejo secara administratif terdiri dari 1 dusun dengan jumlah RW sebanyak 6 dan jumlah RT sebanyak 33.

Gambar 4.1
Peta Desa Wonorejo



Sumber: Dokumentasi desa Wonorejo, 2018.

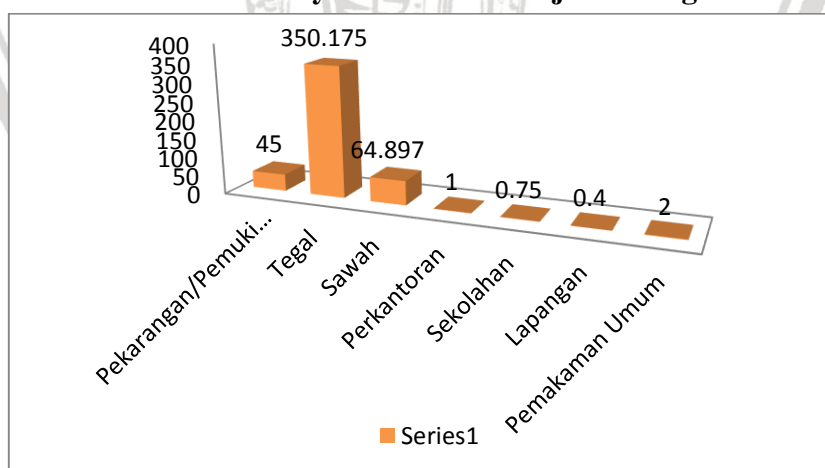
Desa ini dibatasi oleh Desa Wringinanom pada sebelah utara, kemudian sebelah selatan dibatasi oleh Desa Ngadireso, Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Poncokusumo, dan sebelah barat dibatasi oleh Desa Wonomulyo. Dilihat dari perkembangannya, Desa wonorejo merupakan salah satu desa tertinggal yang berada di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut:¹

- a. Secara geografis, Desa Wonorejo termasuk desa terpencil di Kecamatan Poncokusumo dengan kondisi prasarana jalan yang sangat jauh dari standart mutu, apalagi jalan yang menghubungkan antar dusun dan antar desa.
- b. Dusun-dusun dan kampung-kampung masih banyak yang terisolir, prasarana perhubungan yang tersedia sangat terbatas dan dapat dijangkau hanya pada hari tertentu, penduduk sebagian besar tergolong petani yang berekonomi lemah (masyarakat miskin) sehingga tidak mampu membangun jalan yang layak dengan demikian masih perlu bantuan dari pemerintah.

Desa Wonorejo merupakan ibu kota kecamatan, untuk sampai ke kantor kecamatan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 25 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit. Luas Wilayah Desa Wonorejo adalah 468,772 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Gambar 4.2
Luas wilayah Desa Wonorejo dalam grafik



Sumber: LPPD Desa Wonorejo Tahun 2016

¹ Laporan Pertanggungjawaban OMS PPIP Tahun 2014 Desa Wonorejo, Hlm: 1

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui besaran wilayah dan penggunaannya. Pekarangan/Pemukiman memiliki luas 45 Ha, kemudian Tegal seluas 350,175 Ha, Sawah seluas 64,897 Ha, Perkantoran seluas 1 Ha, Sekolah seluas 0,75 Ha, Lapangan seluas 0,4 Ha, dan Pemakaman Umum seluas 2 Ha. Wilayah desa Wonorejo sebagian besar digunakan untuk lahan tegal (ladang). Berdasarkan Topografi , Desa Wonorejo memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 900 mdpl dengan suhu rata-rata 24°C.

4.1.2 Kependudukan

Penduduk merupakan unsure terpenting dalam suatu wilayah. Hal-hal yang menyangkut aspek kependudukan menjadi kunci utama bagaimana suatu wilayah dapat berkembang maju ataupun sebaliknya. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur di Desa Wonorejo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah penduduk Desa Wonorejo menurut kelompok umur tahun 2016

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	186	122	308
2	5-9	210	240	450
3	10-14	205	198	403
4	15-19	240	168	408
5	20-24	255	196	451
6	25-29	206	167	373
7	30-39	398	422	820
8	40-49	241	231	472
9	50-59	222	276	498
10	60+	123	135	258
Jumlah		2286	2155	4441

Sumber : LPPD Desa Wonorejo Tahun 2016

Jumlah penduduk Desa Wonorejo hingga tahun 2017 berjumlah 2270 orang laki-laki dan 2143 orang perempuan dengan total 4413 orang, jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 2286 orang untuk laki-laki dan 2155 orang perempuan dengan total 4441 orang. Komposisi penduduk berdasarkan umur memiliki jumlah yang hampir sama mulai usia 0 sampai usia 60 keatas. Jumlah penduduk terbanyak berada pada usia 30-39 tahun dengan jumlah 820 orang.

4.1.3 Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat Kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka akan bisa meningkatkan kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program Pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematis berpikir atau pola pikir individu, sehingga mudah menerima informasi dan teknologi yang lebih maju. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Wonorejo.

Tabel 4.2
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	438	9,86%
2	Masih Sekolah SD /SLTP/SLTA	941	21,19%
3	Tamat Sekolah SD	1605	36,14%
4	Tamat Sekolah SMP	495	11,15%
5	Tamat Sekolah SMA	132	2,97%

6	Tamat Sekolah PT/ Akademi	42	0,95%
7	Tidak Sekolah/ Belum Sekolah	788	17,74%
Jumlah Total		4441	

Sumber : LPPD Desa Wonorejo Tahun 2016

Data diatas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Wonorejo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) masih belum memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan. Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Wonorejo tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat juga sangat berpengaruh. Sarana pendidikan di Desa Wonorejo baru tersedia di level pendidikan dasar Saja, sementara untuk akses pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain.

4.1.4 Kondisi Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Wonorejo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.880 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 672 orang, yang bekerja di sektor industri 458 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 62 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.072 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4.3

Mata Pencarian Penduduk Tahun 2016

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pertanian	1880 orang	61,20 %
2	Jasa/ Perdagangan	672 orang	21,88 %
	1. Jasa Pemerintahan	8 orang	
	2. Jasa Perdagangan	533 orang	
	3. Jasa Angkutan	20 orang	
	4. Jasa Ketrampilan	15 orang	
	5. Jasa lainnya	96 Orang	
3	Sektor Industri	458 orang	14,91 %
4	Sektor lain	62 orang	2,02 %
	Jumlah	3.072 orang	100 %

Sumber: LPPD Desa Wonorejo Tahun 2016

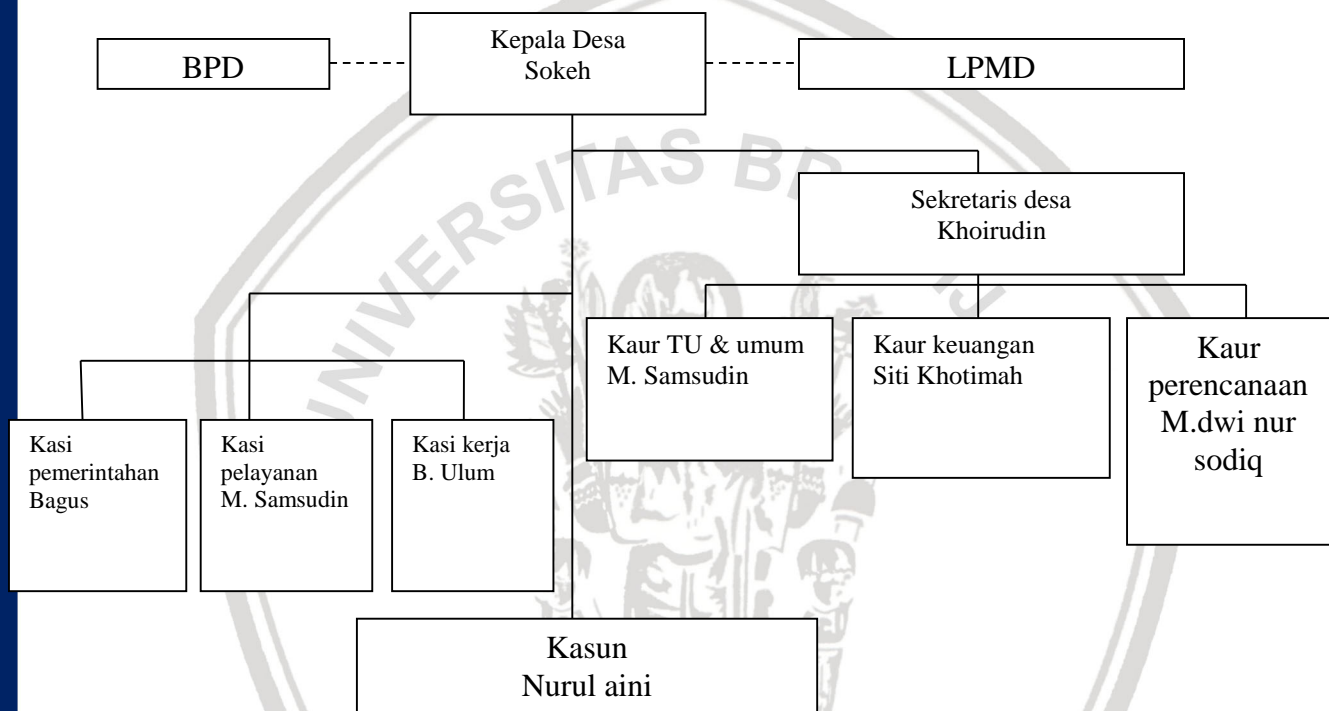
Berdasarkan data diatas dapat diketahui mata pencarian penduduk desa wonorejo sebagian besar bertumpu pada di sektor pertanian dengan persentase 61,20%. Selanjutnya diikuti dengan sektor jasa sebesar 21,88%, Industri 14,91%, dan sektor lain sebesar 2,02%. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 17 – 55 yang belum bekerja berjumlah 236 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 2404 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Wonorejo.² Sementara itu, disisi lain Desa Wonorejo memiliki beberapa potensi unggulan yang bisa dikembangkan antara lain berupa; Usaha pertanian berupa jagung, padi , jeruk dan Sayuran, Usaha Perkebunan Tebu Usaha industri , tusuk sate, Usaha peternakan (sapi, kambing).

² LPPD Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2016.

4.1.5 Aparatur

Sebagai unit pemerintahan yang terkecil, Desa Wonorejo juga memiliki aparat yang menjalankan roda pemerintahan di Desa Wonorejo. adapun aparatur yang memimpin jalannya pemerintahan Desa Wonorejo sebagai berikut:

Tabel 4.4
Struktur Pemerintahan Desa Wonorejo



Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan foto Papan Pajangan di Kantor Desa, 2018.

Desa Wonorejo dipimpin oleh seorang Kepala Desa Bernama Bapak Sokeh yang telah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 periode ini. Kepala Desa dibantu oleh aparat pemerintah lain seperti yang terlampir di tabel diatas. Selain aparatur pimpinan, pemerintahan Desa Wonorejo juga dilengkapi dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Adapun daftar anggota BPD Desa Wonorejo sebagai berikut:

Tabel 4.5**Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonorejo**

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs.H imam turmudi	Ketua	
2	Subandi	Anggota Satu	
3	H.M. Mawardi	Anggota Dua	
4	Zainal arifin	Anggota Tiga	
5	Ngatipan	Anggota Empat	

Sumber : LPPD Desa Wonorejo Tahun 2016

4.1.6 Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur terpenting guna membantu mempermudah jalannya pemerintahan dalam berbagai kegiatan. Selain dapat mempermudah, dengan sarana dan prasaran yang lengkap maka baik pemerintah maupun masyarakat dapat melakukan berbagai peayanan publik dengan baik. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Adapun sarana dan prasana yang dimiliki oleh Desa Wonorejo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6**Sarana Pendidikan yang ada di Desa Wonorejo**

No.	Tingkatan Pendidikan	Keterangan
1.	TK/RA/PAUD	1 Unit
2.	SD/MI	2 Unit
3.	MTS	1 Unit

Sumber: LPPD Desa Wonorejo Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui Sarana pendidikan yang ada di Desa Wonorejo, yakni terdapat TK satu unit, RA satu unit, dan Paud satu unit. Untuk jenjang SD terdapat satu unit, dan Untuk SMP sederajat ada satu Unit. Kondisi sarana pendidikan tersebut sudah termasuk cukup baik karena Desa Wonorejo sudah memenuhi 9 Tahun Pendidikan Dasar. Sementara, sarana lain

selain pendidikan adalah sarana kesehatan Desa. Adapun sarana kesehatan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Sarana kesehatan di Desa Wonorejo

No.	Jenis fasilitas	Keterangan
1.	Polindes, Tenaga Kesehatan	1 Unit
2.	Posyandu	4 Unit
3.	Ambulan	1 Unit

Sumber: LPPD Desa Wonorejo Tahun 2016

Sarana kesehatan di Desa Wonorejo berdasarkan tabel diatas dapat diketahui ada beberapa tempat pelayanan kesehatan yang mencakup polindes 1 unit dan terdiri dari 3 orang tenaga kesehatan, posyandu 4 unit mencakup posyandu melati, posyandu anggrek, posyandu bougenfil, dan posyandu mawar. Sementara juga terdapat ambulan desa yang berjumlah 1 Unit.

4.2 Gambaran Umum Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

4.2.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di perdesaan, Kementrian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program, antara lain : Progeam Kompensasi Pengurangan Subsidi bahan bakar Minyak di bidang infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) pada tahun 2005, Rural Infrastructure Support (RISP) pada tahun 2006, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang telah dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 termasuk Program Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman (P4IP Perdesaan) pada tahun 2013. Program Percepatan dan Perluasan pembangunan infrastruktur permukiman (P4IP Perdesaan)

merupakan salah satu program Kompensasi Bahan Bakar Minyak pasca kenaikan BBM 1 Juni 2013.³

PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat di bawah payung hukum PNPM Mandiri, yang komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar. PPIP dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).⁴ Tujuan PPIP adalah untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas ke pelayanan infrastruktur dasar permukiman perdesaan, yang mendukung pengembangan potensi desa dengan berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.⁵

4.2.2 Organisasi dan Pembagian peran

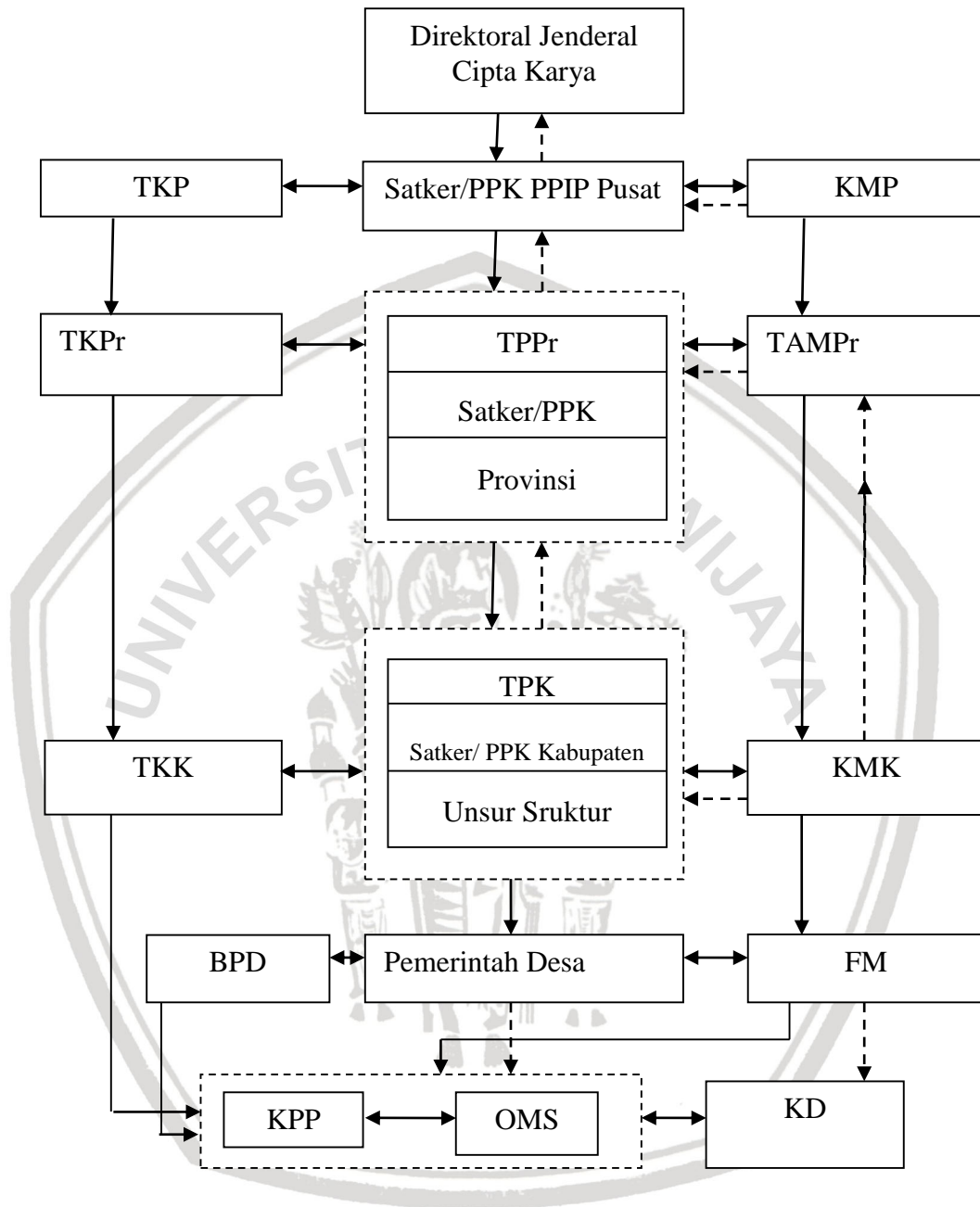
Berikut dibawah ini merupakan tabel struktur organisasi dan pembagian peran mengenai tugas dan fungsi masing-masing lembaga dalam proyek kegiatan PPIP.

³ Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP tahun 2014, Hlm: 5

⁴ Ibid, Hlm: 6

⁵ Ibid, Hlm: 7

Tabel 4.8
Struktur Organisasi dan PPIP tahun 2014



Sumber: Buku Pedoman PPIP Tahun 2014

Keterangan Singkatan:

TKP : Tim Koordinasi Pusat
KMP : Konsultan Manajemen Pusat
TKPr : Tim Koordinasi Provinsi
TPPr : Tim Pelaksana Provinsi
TAMPr : Tenaga Ahli Manajemen Provinsi

Satker/PPK : Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen
TKK : Tim Koordinasi Kabupaten
TPK : Tim Pelaksana Kabupaten
KMK : Konsultan Manajemen Kabupaten
BPD : badan Permusyawaratan Desa
FM : Fasilitator Masyarakat
KPP : Kelompok Pemanfaat dan Penyelenggara
OMS : Organisasi Masyarakat Setempat
KD : Kader Desa

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan kawasan Permukiman bertugas selaku Tim Pelaksana Pusat (TPP). Tim Pelaksana Pusat merupakan institusi penyelenggara PPIP yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan program. Selain TPP, penyelenggaraan di tingkat pusat berada pada Satuan Kerja Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Satker PPIP) dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Inti Satuan Kerja tersebut ditunjuk dan diangkat oleh Menteri PU. Penyelenggaraan PPIP tahun 2014 di tingkat pusat dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPK PPIP). PPK PPIP di tingkat pusat bertugas untuk mengelola anggaran PPIP Tahun 2014 di tingkat pusat yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011, Tanggal 14 November 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, SK Menteri PU dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan Program di tingkat Provinsi, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini Gubernur adalah penanggung jawab pelaksanaan program di wilayah provinsi dimana kabupaten tempat lokasi sasaran PPIP berada.

Selanjutnya Sebagai bagian dari PNPM Mandiri, maka koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan PPIP dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui SK yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Tim Koorniasi Provinsi terdiri dari Bappeda Provinsi sebagai Ketua, dengan anggotanya terdiri dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMPD Provinsi), Dinas PU Provinsi, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

4.2.3 Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pencairan Dana

Sumber dana PPIP diperoleh dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN dengan nilai sebesar Rp. 250 Juta per desa. Selain dana dari APBN ada beberapa perolehan sumber dana lain yang digunakan dalam proyek kegiatan PPIP. Berikut rincian sumber dana PPIP yaitu:

- a. Dana Pemerintah (APBN), dipergunakan untuk membiayai BLM, gaji dan pelatihan fasilitator serta operasional satker PKP Provinsi dalam pengendalian dan pengawasan yang teralokasi di DIPA di tingkat Provinsi.
- b. Dana Pemerintah Provinsi (APBD) sebesar 1% dari total BLM yang diterima untuk membiayai operasional Tim Pelaksana dalam penyelenggaraan program yang teralokasi di DIPA SKPD di tingkat Provinsi.
- c. Dana Pemerintah Kabupaten (APBD) minimal sebesar 5% dari total BLM yang diterima untuk membiayai operasional Satker PIP Kabupaten, Tim Pelaksana Kabupaten dalam pengendalian dan pengawasan yang teralokasi di DIPA SKPD di tingkat Kabupaten.

d. Dana Swadaya Masyarakat untuk mendukung pelaksanaan musyawarah dan rembug-rembug desa, pemeliharaan dan pengembangan manfaat infrastruktur yang dibangun melalui PPIP.

4.2.4 Kriteria Teknis Infrastruktur

PPIP memberikan pilihan menu-menu peluang investasi bagi masyarakat. Pengecualiannya adalah aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam Negative list yang dilarang yaitu: semua program yang akan melibatkan perubahan lingkungan yang sensitif, kegiatan yang berbahaya dan kegiatan merusak, dianggap sebagai bagian dari daftar larangan dan tidak akan diizinkan. Adapun kegiatan yang dilarang adalah:⁶

- a. Program yang berlokasi di dalam atau sekitar daerah peka seperti taman nasional, cagar alam, cagar budaya nasional, tamau laut, dan daerah-daerah yang dilindungi.
- b. Setiap kegiatan di dalam cagar alam atau daerah lain yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pengelolaan dan/atau perlindungan keanekaragaman hayati, kecuali secara eksplisit sebelumnya sudah ada persetujuan tertulis dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan/atau perlindungan yang ada di daerah.
- c. Pengadaan yang berbahaya seperti contoh pengadaan produk apapun yang mengandung asbestos, dan pengadaan pestisida atau herbisida.
- d. kegiatan destruktif seperti, pertambangan dan penggalian karang hidup, pembangunan jalan menuju hutan lindung, produksi, pengolahan, penanganan, penyimpanan atau penjualan tembakau atau produk yang mengandung tembakau, pembangunan sumber daya air pada sungai-sungai yang masuk atau keluar dari Negara-negara lain, dan pengubahan aliran sungai.
- e. lain-lain, seperti reklamasi tanah yang lebih besar dari 50 hektar (ha), konstruksi penampungan atau penyimpanan air dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dari 10.000 meter kubik, penggunaan dana untuk pembelian tanah apapun, dan kegiatan ekonomi yang melibatkan perputaran dana.

Jenis infrastruktur yang akan dibangun ada beberapa macam dan telah ditentukan terlebih dahulu. Adapun beberapa infratsruktur fasilitas publik yang

⁶ Buku Pedoman PPIP Tahun 2014, Hlm: 52.

dapat dibangun berupa prasarana jalan, jembatan, dan jalan setapak, infrastruktur air minum, infrastruktur irigasi perdesaan, infrastruktur sanitasi perdesaan, sementara untuk daerah pesisir dapat berupa tambahan perahu.

4.2.5 Tahapan Pelaksanaan

Penyelenggaraan pelaksanaan PPIP dilaksanakan melalui serangkaian tahapan kegiatan yang saling terkait. Adapun tahapan yang harus dilalui dalam PPIP oleh desa yaitu:

a. Tahap penyiapan dan mobilisasi masyarakat, terdiri atas kegiatan:

Dalam kegiatan PPIP, masyarakat Desa merupakan aktor utama pelaksana kegiatan di tingkat desa. Oleh sebab itu perlu dilakukan persiapan yang matang bagi keterlibatan masyarakat. Melalui tahapan ini diharapkan agar di dalam diri masyarakat dapat tumbuh rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap program. Selain itu agar masyarakat dapat benar-benar mengerti akan tujuan, sasaran, dan prinsip-prinsip serta nilai-nilai program. Ada Beberapa tahapan yang dilakukan dalam tahapan penyiapan dan mobilisasi masyarakat yang pertama adalah rembug desa.

Rembug penyiapan warga dilakukan melalui serangkaian kegiatan-kegiatan rembug/rapat atau pertemuan-pertemuan baik kelompok, keagamaan, arisan, maupun pertemuan lain yang ada di desa sasaran. Rembug warga dilakukan melalui beberapa kali pertemuan dengan melibatkan perempuan dan masyarakat miskin. Adapun tujuan dari rembug penyiapan warga adalah sebagai sarana pengenalan FM (Fasilitator Masyarakat) dan warga dampingan, penyebarluasan informasi awal program, penyiapan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan di desa sasaran tidak hanya

ditetapkan oleh perangkat desa atau tokoh-tokoh masyarakat, namun melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan, identifikasi calon-calon anggota OMS, KPP, dan kaum perempuan, penjelasan tentang pakta integritas, penyepakatan rencana jadwal pertemuan selanjutnya (sosialisasi desa).

Fasilitator Masyarakat pada tahap ini memberikan penjelasan-penjelasan mengenai ketentuan umum dan Prinsip-prinsip PPIP, penjelasan mengenai penandatanganan pakta integritas, penjelasan mengenai proses pembentukan dan kriteria OMS, KPP, dan KD (Kader Desa), serta penjelasan mengenai pelaksanaan sosialisasi dan Musdes 1. Selanjutnya, peserta rembuk penyiapan warga merupakan masyarakat umum, terutam kaum miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas. Tokoh masyarakat, perangkat pemerintahan, kelompok/organisasi masyarakat yang ada di desa sasaran.

Sosialisasi adalah upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai PPIP kepada masyarakat, sebagai penerima program dan pelaksana kegiatan di tingkat di tingkat desa, serta kepada para pelaku dan instansi atau lembaga pendukung program. Kegiatan sosialisasi di tingkat desa dipersiapkan dan dilaksanakan oleh kepala desa dengan didampingi oleh FM dan Tim Pelaksana Kabupaten. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang unsur pemerintahan desa (Kepala Desa, BPD), Pemerintah Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok/Organisasi Masyarakat serta anggota masyarakat secara luas. Narasumber dalam kegiatan sosialisasi tingkat desa adalah FM, Pihak Kecamatan dan Tim Pelaksana Kabupaten. Pada saat pelaksanaan sosialisasi dilakukan juga sosialisasi Pakta Integritas, yaitu kesepakatan masyarakat dalam melaksanakan program. Pakta Integritas ditandatangani oleh Kepala Desa, OMS, KPP, KD, dan

wakil-wakil masyarakat. Aparat pemerintahan desa dan seluruh masyarakat termasuk OMS, Kader Desa dan KPP yang terbentuk harus menaati kesepakatan dalam pakta Integritas.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan dalam penyiapan dan mobilisasi adalah Musyawarah Desa I yang dikenal dengan sebutan Musdes. Musdes I merupakan forum pertemuan masyarakat desa yang dilaksanakan Kepala Desa dan dibantu oleh FM, untuk memilih OMS, KPP, dan memilih KD serta menandatangani Pakta Integritas. Forum ini juga masih bagian dari kegiatan sosialisasi program. Narasumber dalam Musdes I adalah Tim pelaksana Kabupaten. Tujuan kegiatan Musdes I adalah untuk memilih dan menetapkan OMS sebagai penanggung jawab operasional kegiatan desa, KPP sebagai pengawas pelaksana kegiatan dan penanggung jawab operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun, satu orang kader sebagai koordinator peran serta masyarakat. Menetapkan lokasi sekretariat OMS, KPP, dan lokasi pemasangan papan informasi untuk kegiatan PPIP. Menyepakati dan menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah desa II. Pembuatan berita acara musyawarah desa I dan penandatanganan Pakta Integritas. Peserta kegiatan Musdes I adalah masyarakat umum termasuk kaum miskin dan perempuan, tokoh masyarakat, kelompok/ organisasi masyarakat yang ada di desa sasaran. Aparat desa, perangkat pemerintahan kecamatan, pemerintah kabupaten, satker PIP Kabupaten dan konsultasn sebagai narasumber.

b. tahap perencanaan partisipatif

Pada tahapan ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Pada tahapan perencanaan partisipatif ini dilakukan oleh masyarakat di tingkat desa (OMS

bersama dengan KD dan FM serta relawan masyarakat dari masing-masing Dusun/RW). Adapun kegiatannya meliputi:

- Survey kampung sendiri

Survey kampung sendiri (SKS) dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi desa, kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan, kondisi kependudukan, sampai dengan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM). Data dan informasi yang akan digali melalui Survey Kampung Sendiri (SKS) ini adalah: Kondisi Wilayah, dilakukan dengan membuat peta sederhana kawasan desa, yang berisi: tata letak tapak, status tanah dan status penguasaan, peta jaringan dan profil kondisi prasarana dan sarana lingkungan yang ada, kondisi dan permasalahan sarana dan prasarana desa. Kedua yakni Kondisi demografi, dilakukan dengan pengumpulan data dan peutakhiran data kependudukan, pengumpulan data social masyarakat seperti tingkat peendidikan, strata ekonomi, dan sebagainya. Pengumpulan data permasalahan kependudukan yang mencakup permasalahan social seperti konflik antar penduduk. Ketiga yakni, Kondisi Kemiskinan, dilakukan dengan identifikasi kelompok miskin yang potensial menjadi sasaran program.

- Identifikasi permasalahan dan pemetaan kemiskinan (Rembug Pra Musdes II)

Dari hasil SKS, kemudian OMS, KD dan didampingi oleh FM melakukan identifikasi permasalahan dan pemetaan kemiskinan yang terdapat di desa. Hasil identifikasi permasalahan, kemudian dicermati bersama oleh OMS dan KD yang didampingi oleh FM untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dan pemetaan dilakukan melalui penyusunan daftar identifikasi masalah, yang dilakukan dengan mengkompilasi data dan permasalahan yang kemudian disatukan menyeluruh untuk mengetahui permasalahan infrastruktur permukiman dan permasalahan kemiskinan. Kedua adalah penyusunan akar permasalahan, dilakukan dengan pemetaan permasalahan dengan menyusun pohon masalah, agar dapat diketahui permasalahan yang ada secara komprehensif. Ketiga adalah penentuan prioritas masalah, penentuan prioritas masalah diidentifikasi dari hasil pohon masalah yang disusun kemudian dinilai skala prioritasnya dengan menggunakan metaplan. Dengan metaplan, penerima manfaat program dan penanganan dapat dilakukan secara optimal. Keempat adalah prioritas alternative pemecahan masalah, disusun dari hasil penentuan prioritas yang kemudian diverifikasi dalam Musdes II.

- Musyawarah desa II

Setelah dilaksanakan identifikasi permasalahan ataupun SKS penyalarsan Program dengan RPJM Desa, langkah selanjutnya adalah melakukan musyawarah desa II. Mudes II disiapkan oleh OMS dengan dukungan KD dan FM. Musdes II dilaksanakan dalam bentuk diskusi terbuka yang diharapkan mampu merumuskan prioritas permasalahan dan rencana kegiatan sebagai masukan RKM (Rencana Kerja Masyarakat).

Musdes bertujuan untuk merumuskan prioritas permasalahan yang terdapat di desa sasaran, menentukan jenis infrastruktur yang akan dibangun, menyusun calon pekerja untuk konstruksi fisik, dan merumuskan rencana kegiatan untuk penyusunan RKM.

- Penyusunan usulan RKM

Penyusunan usulan RKM dilakukan oleh OMS dan KD dengan pendampingan dari FM. Usulan RKM akan memuat rencana kerja pembangunan infrastruktur, rencana operasi dan pemeliharaan, termasuk rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan. Usulan RKM harus selaras dengan rencana pembangunan pemerintah daerah, kriteria teknis yang ada dan prioritas pembangunan daerah, dengan demikian tidak terjadi pendanaan pembangunan yang tumpang-tindih. FM bertugas membimbing proses penyusunan usulan kegiatan ini secara teknis dan mendorong partisipasi dari kaum perempuan dan penduduk miskin. Selain hal tersebut, peran FM diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah pemecahan permasalahan yang ada di desa. Penyusunan RKM diwujudkan dalam bentuk Proposal yang terbagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya dilakukan verifikasi RKM yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Pada tahap terakhir, dilakukan Finalisasi RKM. Usulan RKM yang telah diverifikasi difinalisasi oleh OMS dan KD dengan pendampingan dari FM dan Tim Pelaksana Kabupaten. Kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Setelah difinaslisasi kemudian dilakukan penyusunan Rencana Teknis dan RAB. Yang dilaksanakan oleh OMS, KPP, KD dan dibantu oleh FM. Hasil dari kegiatan ini harus melalui persetujuan Pemerintah Desa.

c. tahapan pelaksanaan fisik

Tahapan pelaksanaan fisik dimulai dengan melaksanakan Musdes III, penandatanganan kontrak kerja, dan pelaksanaan fisik infratsruktur. Dalam pelaksanaan fisik dilakukan supervisi yang terdiri atas pemantauan kegiatan dan pelaporan. Setelah pelaksanaan fisik infrastruktur selesai dilakukan penyelesaian kegiatan (finalisasi) dan serah terima hasil infrastruktur terbangun. Tahap pertama adalah musyawarah Desa III, pada tahapan ini bertujuan untuk menetapkan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur, penetapan rencana operasi dan pemeliharaan, serta memilih dan menetapkan Tim Pengadaan Barang/ Jasa. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur disepakati secara swakelola (tidak menggunakan pihak ke tiga/kontraktor). Pada tahap Musdes II ini dilakukan penandatanganan kontrak kerja berupa surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (SP3) antara OMS dengan PPK PPIP Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten. Pengajuan dana untuk pekerjaan dilakukan dalam 3 tahapan yang pertama sebesar 40% dicairkan setelah penandatanganan kontrak, selanjutnya 30% pada saat pelaksanaan kegiatan sudah mencapai 30%, dan sisanya 30% diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan mencapai minimal 60%.

Selanjutnya adalah tahapan paling penting yakni pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pada tahap ini dilakukan setelah penandatanganan kontrak. Proses pelaksanaan kegiatan meliputi: penyiapan lokasi, pengadaan material dan barang, pelaksanaan konstruksi, sewa alat dan jumlah tenaga kerja, jadwal pelaksanaan serta pengendalian pengeluaran dana oleh OMS. Selanjutnya juga dilakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi. Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan fisik agar sesuai denganj rencana dan tujuan

yang diharapkan. Setelah dilakukan pemantauan kemudian dilakukan pelaporan kegiatan. Laporan kegiatan tersebut terdiri atas catatan-catatan dan dokumentasi yang disusun secara sederhana dan ringkas dan dilakukan secara berkala. Tahapan terakhir dalam proses pelaksanaan fisik adalah rembug warga pelaksanaan. Kegiatan ini dilakukan untuk melaporkan dan membahas laporan pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta rencana agenda berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaan dana bantuan PPIP, OMS berkewajiban menyampaikan informasi dalam bentuk penempelan Papan Informasi dan pemasangan Papan Proyek. Penempelan tersebut dilakukan oleh OMS yang meliputi informasi tentang RKM, hasil musyawarah desa dan rembug desa, lapiran kemajuan pelaksanaan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya. Penempelan papan informasi harus dilakukan di tempat yang strategis, dalam bentuk dan ukuran yang dapat dibaca oleh masyarakat serta dilakukan penempelan informasi secara rutin 1 (satu) minggu sekali.

d. tahap pasca pelaksanaan fisik (tahap operasional dan pemeliharaan)

Pada tahapan ini terdiri atas kegiatan, musyawarah Desa IV (laporan pertanggungjawaban OMS tentang hasil pelaksanaan kegiatan), serah terima infrastruktur terbangun, operasi dan pemeliharaan. Musyawarah Desa IV bertujuan untuk memberikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil pengelolaan dana bantuan oleh OMS kepada masyarakat desa sasaran. Musdes IV dilaksanakan setelah pelaksanaan fisik selesai 100% atau pada saat batas waktu penyelesaian pekerjaan habis. Musdes IV merupakan penilaian akhir pelaksanaan program PPIP yang akan menjadi dasar dalam pemeriksaan Inspektorat Jenderal/BPKP/ Bawasda. Dalam musdes IV, OMS menjelaskan secara rinci dan

transparan laporan pertanggungjawaban OMS. Materi yang disampaikan adalah Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), dan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) disertai dengan foto-foto pelaksanaan. Hasil musdes kemudian disampaikan kepada pemerintah desa dan satker kabupaten sebagai pencatatan arsip.

Pada tahapan kedua setelah musdes IV, dilakukan serah terima hasil pekerjaan setelah pembangunan infrastruktur di lapangan selesai dan infrastruktur perdesaan yang dibangun sudah sepenuhnya dapat berfungsi dan bermanfaat. Serah terima satker PIP kabupaten melalui PPK PPIP, selanjutnya serah terima dari PPK Kabupaten kepada Pemerintah Desa (diwakili kepala desa) dan serah terima dari pemerintah Desa kepada masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh ketua KPP. Selanjutnya, pengelolaan infrastruktur terbangun diserahkan kepada KPP untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dilestarikan oleh masyarakat.

Tahap terakhir yakni operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat. Tahap ini merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menggunakan dan memelihara infrastruktur fisik yang sudah diselesaikan secara optimal dan berkesinambungan, dengan bimbingan dari pemerintah setempat. Kegiatan pemeliharaan ini sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan, menggunakan, dan memelihara infrastruktur yang ada. KPP harus mengembangkan prosedur yang akan diikuti pelaksanaannya, merumuskan peraturan, menetapkan hak dan kewajiban anggota dan pengelola, melakukan pemilihan pengurus dan pertemuan reguler. KPP juga berhak untuk memberikan sanksi bagi anggota organisasi atau penerima manfaat yang melanggar aturan bersama.

4.2.6 Pengawasan dan Pelaporan

Pengawasan pelaksanaan PPIP adalah proses yang dilakukan terus menerus sepanjang tahapan program mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan sampai dengan tahap operasi dan pemeliharaan. Hasil dari kegiatan pengawasan digunakan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan, serta menjadi input evaluasi pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku-pelaku PPIP dan masyarakat. Adapun pengawasan dilakukan oleh semua pihak, yakni pengawasan dari KPP, Perangkat Desa, BPD, Fasilitator Masyarakat, tingkat Kecamatan, hingga Tingkat Kabupaten. Selanjutnya adalah tahap pelaporan, pada tahapan ini dilakukan konsolidasi dari rencana kegiatan dan tindak lanjut pengawasan tentang proses dan hasil di lapangan. Laporan harus ditulis secara sederhana, ringkas, dan dilakukan secara berkala. Selain memuat data hasil dan proses pelaksanaan di lapangan, laporan juga memuat foto/dokumentasi kegiatan, permasalahan, hambatan, dan rekomendasi tindakan. Adapun tahap pelaporan dilakukan oleh Satker-Tim Pelaksana, yang dimulai pada tingkat desa yang dilakukan oleh OMS dan perangkat desa, di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh satker PIP kabupaten dan Tim pelaksana kabupaten, kemudian oleh Fasilitator Masyarakat-KMK-TAMPr-KMP. Setelah pengawasan dan pelaporan kemudian dilakukan evaluasi yang mengacu pada indikator dampak dan indikator kinerja. Evaluasi dilakukan pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan tingkat nasional berdasarkan Data penyelenggaraan program (data primer dan sekunder) di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi, hasil rapat koordinasi rutin, temuan-temuan dari pemantauan langsung ke lapangan, dan wawancara dengan para pelaku

program. Hasil evaluasi kemudian dituangkan dalam bentuk laporan rutin di semua tingkatan.

4.2.7 Penanganan Pengaduan dan Masalah

Persoalan bisa muncul pada berbagai tingkat pelaksanaan baik di tingkat masyarakat, kabupaten, provinsi atau bahkan di tingkat pusat. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya pertanyaan, keluhan, atau tuntutan yang lebih serius dari masyarakat. Banyaknya keluhan bukan berarti bahwa masyarakat menjadi lebih berdaya dan lebih sadar, peduli dan secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Hal terpenting adalah bahwa pengaduan tersebut benar ditangani dan diselesaikan segera. Pengaduan masyarakat merupakan bentuk dari pengawasan masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Keagamaan, Perguruan Tinggi, Warga Masyarakat, dan atau Media Massa.



BAB V

PEMBAHASAN

Pada Bab V ini akan dianalisis evaluasi dampak PPIP di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Penjelasan mengenai analisis evaluasi dampak ini akan dilihat berdasarkan analisis evaluasi dampak menurut Samodra Wibawa (1994). Samodra Wibawa dalam bukunya menjelaskan ada 4 aspek dampak yang dihasilkan oleh suatu kebijakan yaitu pertama, dampak individual yang meliputi dampak biologis/fisik, psikis. Kedua yakni dampak organisasional, yang ketiga dampak terhadap masyarakat yang meliputi aspek lingkungan hidup dan ekonomi, yang keempat adalah dampak terhadap lembaga dan sistem sosial.

5.1 Dampak Terhadap Individual

Sebuah kebijakan dapat dilihat hasilnya atau dampaknya apabila kebijakan tersebut benar-benar telah selesai diimplementasikan. Hal tersebut dikarenakan, dampak yang dihasilkan tidak serta merta terlihat dalam kurun waktu yang singkat. Dampak tersebut berjangka waktu. Salah satu jenis dampak adalah dampak individu. Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek-aspek biologis/fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi dan sosial serta personal. Dampak biologis atau psikis biasanya menyangkut persoalan penyakit, cacat fisik dan kurang gizi. Sementara itu, dampak psikis dapat berupa alienasi, stress, depresi, kepercayaan diri, cinta dan emosi, dan lain-lain. Dampak Psikis merupakan suatu dampak yang tidak dapat secara langsung dilihat, artinya perlu pendekatan lebih mendalam

terhadap perasaan atau emosi seseorang. Berkenaan dengan dampak terhadap psikis yang terjadi atau dirasakan oleh masyarakat Desa Wonorejo setelah adanya pembangunan jembatan, kurang lebih merupakan gambaran perasaan senang atau tidak masyarakat setelah pembangunan tersebut selesai. Selain perasaan senang, yang lebih penting adalah bagaimana tingkat kepuasan masyarakat setelah pembangunan jembatan dan jalan selesai dilakukan sehingga kemudian dapat dinilai apakah pembangunan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan atau tidak. Pada penilaian atas dampak, tidak selalu dapat diukur dengan angka sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat sudah cukup mewakili bagaimana dampak yang sebenarnya terjadi.

a. Dampak Psikis

Berkenaan dengan dampak psikis yang dirasakan, masyarakat desa wonorejo mengaku sangat senang dengan adanya PPIP ini, hal tersebut dikarenakan PPIP telah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terutama berkenaan dengan bidang pertanian. Dimana, berdasarkan penuturan Ketua LPMD yaitu Bapak Rawi, sekitar $\pm 90\%$ masyarakat desa Wonorejo bermatapencaharian sebagai petani. Masyarakat desa wonorejo benar-benar merasa terbantu dengan pembangunan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh narasumber yang merupakan petani juga sekaligus kader desa sebagai berikut :

“Setelah adanya jembatan...kami sangat lega mbak..dari masyarakat juga sangat dirasakan dampak positifnya mulai dari akses ,,akses untuk menghubungkan desa kami dengan desa sebelah itu lebih mudah...untuk...ke...bidang pertanian...juga aksesnya lebih mudah , lebih cepat..dan lebih...deket gitu...”¹

¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Akmal, kader desa Wonorejo pada 08 Agustus 2018/13:44.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa memang pada dasarnya sebagian besar masyarakat Desa Wonorejo menggantungkan hidup di bidang pertanian. Bagi masyarakat Kebutuhan akan sarana dan prasarana menuju tempat warga bekerja merupakan kebutuhan yang mendasar. Ketika akses menuju tempat bekerja mudah maka masyarakat akan sangat senang karena dengan begitu mereka dapat lebih mudah melakukan berbagai aktivitas ketika berkerja tanpa harus mengalami kendala. Berbeda dengan kondisi sebelum adanya pembangunan jembatan dan jalan, masyarakat mengalami kesulitan ketika akan berangkat ke ladang atau lahan tempat mereka bekerja. Kondisi dan medan yang sangat tidak memungkinkan membuat masyarakat harus memutar hingga 5 kilometer ketika hendak ke ladang. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber selaku kepala desa Wonorejo sebagai berikut:

“Kalo selama ini mbak,,terutama yang di sebelah selatan jembatan ...ini kita harus memutar karna...memutar sekitar 5 kilo...ini...jadi kalo panen gitu yaa...ee.. masyarakat desa wonorejo ini jalannya kan gak bisa dilalui oleh mobil. tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya program ppip kita buat jembatan..waktu itu ...dananya sekitar 100 juta kalo gak salah ...dari provinsi. setelah itu...ini sekarang...jadi masyarakat yang panen di sana...udah gak usah memutar lagi...lebih cepat juga..ee... transportasinya lebih murah”.²

Selain harus memutar jauh, kondisi dan medan yang sulit membuat masyarakat kesulitan ketika akan pergi ke ladang untuk bekerja. Masyarakat harus memutar lebih jauh lagi ketika hendak bekerja. Hal tersebut juga berlanjut ketika waktu panen tiba, masyarakat mengalami kesulitan untuk mengangkut hasil panen karena kondisi jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan sama sekali. Ketika panen tiba, masyarakat harus menyiapkan dana yang lebih banyak untuk mengangkut hasil

² Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Sokeh selaku Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 17 Juli 2018/09:30.

panen, apalagi jika harus menggunakan truk untuk mengangkut maka beban biaya akan jauh lebih besar lagi. Hal yang sama disampaikan oleh narasumber selaku warga desa yang juga menjadi bendahara PPIP sebagai berikut:

“Dulu itu...sangat...opo yo mbak...gak enak...jalannya kecil...terus tanah...mbak bayangkan sendiri...tanah terus kecil sekali sempit...(becek)...heem...kalau hujan becek...kalau panas yoo agak mendingan sih...terus setelah adanya ppip itu kan dilebarkan a..jadi sekarang mobil bisa masuk...truk pun juga bisa...”³

Kondisi dan medan yang sulit membuat masyarakat harus ekstra hati-hati ketika hendak pergi ke ladang. Kondisi tersebut diperparah ketika hujan. Hal ini mengingat Desa Wonorejo merupakan daerah yang masuk dalam kategori dataran tinggi dan berada di bawah dua Gunung yaitu Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Kondisi yang demikian menyebabkan Desa Wonorejo memiliki intensitas curah hujan yang lumayan tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain yang lebih rendah. Intensitas hujan yang cukup tinggi tersebut terjadi sewaktu-waktu. Kondisi tersebut menyebabkan akses jalan menjadi becek dan licin sehingga sangat sulit untuk dilewati.

Desa Wonorejo merupakan salah satu Desa penerima PPIP sesuai dengan SK Menteri Pekerjaan Umum nomor 386/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun anggaran 2014 bersama dengan 6 Desa lainnya yang tersebar di 2 Wilayah kabupaten Malang. Adapun daftar desa sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

³ Berdasarkan wawancara dengan Dian Laila, anggota Karang Taruna pada tanggal 25 Juli 2018/17:22.

Tabel 5.1

**Daftar Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA.
2014 Kabupaten Malang**

KABUPATEN MALANG			
NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1	Poncokusumo	Pajaran	
2	Poncokusumo	Ngebruk	
3	Poncokusumo	Wonorejo	
4	Tumpang	Ngingit	
5	Tumpang	Kidal	
6	Tumpang	Pandanajeng	

Sumber: Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang, 2018.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan atau yang lebih dikenal dengan PPIP dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur layanan publik yang memadai dan mudah di akses. Infrastruktur yang dibangun harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah serta menjadi kebutuhan masyarakat desa sasaran yang paling dasar atau pokok. Program PPIP merupakan salah satu program pemerintah yang bersifat Top Down. Sehingga Penentuan jenis infratsruktur yang akan dibangun juga berdasarkan atas musyawarah mufakat yang dilakukan oleh masyarakat desa sasaran. Berbagai perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan pembangunan dilakukan oleh masyarkat dengan didampingi oleh pemerintah. Jadi, masyarakat yang menjadi kunci utama berjalan atau tidaknya program tersebut.

Berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum tersebut, Desa Wonorejo merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana bantuan program PPIP pada tahun 2014. Untuk wilayah Kabupaten Malang sendiri, ada 6 Desa yang mendapatkan PPIP. Ke enam Desa tersebut tersebar di dua Wilayah Kecamatan yakni kecamatan Tumpang dan Kecamatan Poncokusumo.

Untuk wilayah Kecamatan Tumpang terdapat 3 Desa yaitu Desa Ngingit, Kidal, dan Pandanajeng. Sementara itu, untuk Wilayah Kecamatan Poncokusumo terdapat 3 Desa yaitu Desa Pajaran, Ngebruk, dan Wonorejo. Seperti yang disampaikan oleh kepala desa Wonorejo sebagai berikut:

“Kalau desa wonorejo ini...kondisi penduduknya...yang banyak menengah kebawah...terus terang aja...jadi waktu itu kita dapat program PPIP memang...ini memang... betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat desa wonorejo karena...waktu itu jalan itu...Cuma satu meter...terus kita musyawarah dengan seluruh warga terutama yang mempunyai lahan disana...e...lahan pertanian ini...masyarakat antusias...ya pak kebetulan kalau ada program ppip, sebetulnya kabupaten itu waktu itu dinas cipta karya...tidak percaya krn melihat lahannya terlalu tinggi tebingnya trus pelebarannya harus sampai 5 meter. Ya.. tp dg ee..semangat warga waktu itu juga kita musyawarahkan....ee..terus warga ada antusias untuk pelebaran..juga yg mempunyai lahan juga menghibahkan waktu itu pada desa...boleh kalo dibuat jalan...akhirnya kita e..dalam waktu satu minggu...ini...satu..jalan yang semula 1 meter ini sudah bisa terlihat 5 meter”.⁴

Berdasarkan hasil keputusan bersama yang dilakukan, masyarakat Desa Wonorejo telah menyepakati akan membangun Jembatan dan Jalan Rabat Beton. Hal ini dikarenakan 2 infrastruktur tersebut merupakan akses vital masyarakat dalam kegiatan sehari-hari sekaligus menjadi akses menuju tempat bekerja sebagian besar masyarakat Desa Wonorejo. Pembangunan dilakukan dalam dua tahapan. Hal ini dikarenakan proses penurunan dana yang sedikit telat sehingga menyebabkan pembangunan dibagi ke dalam dua tahap. Pada tahap pertama, masyarakat Desa Wonorejo melakukan pembangunna jembatan yang menjadi akses warga menuju ladang.

Proses pengerjaan proyek jembatan tersebut berlangsung mulai 20 Oktober 2014 hingga 7 Desember 2014. Pada tahap pertama dilakukan pembangunan

⁴ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Sokeh selaku Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 17 Juli 2018/09:30.

jembatan gelagar beton yang selama ini menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Desa Wonorejo. Hal ini dikarenakan, jembatan tersebut tidak hanya memudahkan masyarakat menuju ladang tetapi juga sekaligus menjadi penghubung antar dua desa yakni Desa Wonorejo dan Desa Puthuk. Sementara Tahap Kedua berlangsung dari bulan 6 Juli 2015 hingga 8 Agustus 2015. Pada tahapan kedua, masyarakat Desa Wonorejo memutuskan untuk melakukan pembangunan jalan atau lebih dikenal dengan rabat beton. Disebut demikian karena memang jalannya merupakan rabat atau dicor jadi bukan aspal. Latar belakang pembangunan jalan tersebut disampaikan oleh narasumber sebagai berikut :

“Itu dibangun rabat beton itu karena apa, karena gini sebelumnya itu kan makadam, la...macadam...mengangkut pupuk kan kalo macadam ,itu kan ada ketinggian...ya jurang...itu mempermudah pengangkutan pertanian itu,,kan sekarang semuanya itu, jadi untuk mempermudah semuanya diharuskan pertama macadam, kedua rabat beton, nanti kelanjutannya itu akan diadakan pengaspalan, ya hampir sama”.⁵

Pembangunan rabat beton hampir sama fungsinya dengan pembangunan jembatan gelagar beton karena sama-sama saling mempermudah petani dalam kegiatannya sehari-hari. Panjang jalan rabat beton yang dibangun berdasarkan keterangan dari informan kurang lebih 700 Meter dan letaknya terpisah dari jembatan. Medan yang sulit membuat petani cukup kesulitan karena memang letak desa Wonorejo yang berada di daerah dataran tinggi menyebabkan jalanan naik turun. Hal tersebut tentu berbahaya bagi siapa saja yang melewatinya. Karena selain susah dilewati, juga ketika hujan turun dapat membahayakan.

⁵ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rawi, Ketua LPMD pada tanggal 08 Agustus 2018/16:27.

Setelah kegiatan pembangunan selesai, masyarakat mulai merasakan dampaknya. Mulai dari hal kecil hingga ke hal-hal yang besar seperti saat mengangkut hasil panen. Bahkan ketika cuaca tidak mendukung sekalipun, masyarakat tetap bisa pergi ke ladang karena kondisi jembatan yang sudah aman dan kondisi jalan yang sudah bagus. Apabila dibandingkan dengan dahulu, kondisi saat ini diakui jauh lebih baik. Masyarakat dapat melakukan aktivitas tanpa adanya kendala yang berarti. Masyarakat sangat senang dan terbantu dengan adanya jembatan yang menjadi penghubung ke tempat mereka bekerja.

Masyarakat juga sangat antusias dengan adanya program PPIP. Hal tersebut dibuktikan melalui berbagai kegiatan pembangunan mulai dari musyawarah hingga saat pembangunan sudah selesai masyarakat selalu dilibatkan. Hal tersebut membuat masyarakat senang karena bisa langsung turun memberikan sumbangan ide dalam membangun desa. Hal tersebut juga disampaikan oleh kepala desa Wonorejo sebagai berikut:

*“Ya...masyarakat desa wonorejo terutama senang dengan adanya jembatan itu tadi...gitu lo...waktu itu...kita...program PPIP mendapatkan juara 3...mewakili kabupaten malang se provinsi...ini...jadi...temen temen terutama panitia pelaksana ini juga sangat antusias....karena kita melibatkan..ada orang tua.....juga ada anak muda....kita kolaborasi istilahnya,.....ada yang tua ada yang muda..intinya...iyaa...semua dilibatkan”.*⁶

Kegiatan PPIP yang dilakukan di Desa Wonorejo mendapat sambutan yang cukup baik di kalangan masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas dikatakan

⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Sokeh selaku Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 17 Juli 2018/09:30.

bahwa masyarakat benar-benar senang dengan adanya jembatan tersebut. Masyarakat bahkan sangat antusias dengan dibangunnya jembatan. Sehingga mulai dari awal perencanaan, masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama agar jembatan dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. peran serta seluruh golongan mulai dari golongan tua, golongan muda, maupun kaum perempuan membuat program tersebut cukup berhasil dan mengantarkan Desa Wonorejo maju untuk mewakili Kabupaten Malang dalam Lomba PPIP yang dilaksanakan di Surabaya pada tahun 2015.

Gambar 5.1
Piagam Penghargaan Desa Wonorejo



Sumber: Dinas Cipta Karya Kab Malang, 2017.

Berdasarkan hasil Lomba yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, Desa Wonorejo berhasil meraih juara 3. Hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri mengingat berbagai keterbatasan dan kendala masyarakat desa dalam proses pengajuan hingga proses pembangunan selesai. Namun dengan semangat yang luar biasa akhirnya dapat membawa pulang penghargaan. Alhasil, masyarakat berhasil mendapatkan 2 manfaat sekaligus karena selain dapat merasakan dampak adanya pembangunan jembatan dan jalan

rabat beton juga sekaligus mendapatkan juara 3 se Provinsi Jawa Timur. Hasil yang dicapai tersebut merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan dan diluar dari apa yang selama ini difikirkan oleh masyarakat dan pemerintah. Mengingat dalam lomba tersebut terdiri dan diikuti oleh banyak daerah se-Provinsi Jawa Timur dengan ribuan proyek. Hal ini disampaikan narasumber sebagai berikut:

“28 kab/kota dari macam 2000 proyek, satu provinsi itu 2000 proyek, 28 kab/kota, kita bertarung disitu...ya ndak sengaja itu mbak, kita ya.. hanya sekali itu, sebetulnya itu jembatan yg saya bangun dulu itu juga mau dilombakan, nggak jadi, ya...gitu kan yang milih dari cipta karya...untuk proyek yang layak dijual atau ditarungkan dengan kab/kota yang lain. Kalau hanya irigasi sama paving itu ndak begitu signifikan, signifikansinya kan sedikit, tapi kalo jembatan, tantangan itu, he em...pernah kita itu sama teman juga ditawari membangun jembatan yang lebih dalam lagi, trus lebih panjang lagi itu pernah...pernah itu,,,yang di pnpm..iya...bedanya dr pengalaman kita,,itu...”⁷

Lomba yang diadakan tersebut berhasil membawa nama Desa Wonorejo meraih urutan atau rangking ke tiga dalam lomba pelaksanaan PPIP oleh OMS tingkat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015. Berdasarkan pemaparan beliau ada kurang lebih 28 Kab/Kota yang mengikuti lomba tersebut dengan lebih dari 2000 proyek. Desa Wonorejo menjadi satu-satunya wakil dari Kabupaten Malang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Desa Wonorejo menurut beliau juga baru pertama kali mengikuti ajang atau lomba setaraf provinsi, dengan ditunjuknya sebagai perwakilan merupakan sesuatu yang sangat besar bagi pemerintah desa Wonorejo dan Masyarakat tentunya. Hal ini mengingat prosesnya yang cukup sulit dan sumbangan waktu serta tenaga yang dikeluarkan cukup banyak. Proses awal hingga akhir yang benar-benar terencana serta didukung dengan partisipasi masyarakat Desa Wonorejo yang begitu luar biasa.

⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rawi, Ketua LPMD pada tanggal 08 Agustus 2018/16:27.

Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari campur tangan Tim yang berangkat ke Surabaya untuk melakukan presentasi. Karena sebesar apapun proyek yang dilakukan tetap harus dipresentasikan sebagai bukti kuat bahwa masyarakat benar-benar terlibat secara langsung mulai dari bawah hingga ke jajaran pemerintah Desa. Melalui presentasi tersebut merupakan kunci dari penilaian yang paling utama dimana harus benar-benar dapat meyakinkan para juri dan membuat juri terkesan. Lebih lanjut Ditambahkan lagi oleh narasumber sebagai berikut:

“Nahh...kategorinya itu...penilaiannya dari kan 1. Itu dari administrasi, didetail itu pertanyaannya..yang interaksi itu yang kesana kan pak fatah itu...pelaksana tekniknya lapangan saya...jadi pertanyaannya beda-beda...nah disitu yang ditekankan, proyek ini harus dikerjakan sendiri..itu kategori sampe rangking 3 itu...itu, walaupun bagus kalo di jaitno orang lain, meminta bantuan konsultan, ya ndak bisa, makanya di situ, admin ditanya sendiri sama panitia, bagian tekniknya di lapangan ditanya sendiri..alhamdulillah kita bisa menjawab itu semuanya, konstruksinya secara detail kita jawab, kalo ndak bisa kan ketahuan, nek njaitno kan ketahuan a mbak... misalkan, misal ya,,ada apa itu gambar misalkan ...yang mana itu pondasi, yang mana itu kepala jembatan, yang mana plat beton, plat tumpu, yang mana rantainya, ukuran nya berapa, ketebalannya berapa, sampai kenapa itu kita pake sekian, yang... ketinggian nya berapa...dan banyak...itu kan ndak bisa di apusi..ya,,kita jawab apa adanya...”⁸

Penilaian pada saat lomba memang paling besar poinnya didasarkan pada penyajian atau presentasi tentu saja dengan bukti-bukti otentik yang sudah dilakukan oleh masyarakat selama proses kegiatan PPIP berlangsung. Dari beberapa perwakilan tersebut masing-masing mendapatkan pertanyaan, jadi jawaban yang dihasilkan sama atau tidak menjadi salah satu poin penting yang dinilai. Pertanyaan yang ditujukan lebih banyak bersifat administratif tentang proses pembangunan jembatan dan jalan serta seluk beluknya. Pertanyaan yang diajukan tersebut harus benar-benar terjawab dengan detail dan setepat mungkin

⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rawi, Ketua LPMD pada tanggal 08 Agustus 2018/16:27.

sesuai dengan tugas yang diemban oleh perwakilan tim. Bagian administrasi ditanyakan seputar administrasi selama proses pengerjaan, bagian tehnik juga ditanyai sesuai dengan teknisnya di lapangan seperti apa, hingga bagian lainnya juga. Apabila terdapat kecurangan, akan langsung dapat terlihat, karena masing-masing perwakilan tim akan diberikan pertanyaan satu per satu secara terpisah. Kecurangan disini dapat dicontohkan berupa proses pengerjaan Proyek yang tidak dilakukan oleh masyarakat melainkan meminta bantuan konsultan yang ahli dalam bidang pembangunan infrastruktur baik itu jembatan, jalan, dan sebagainya. Hingga akhirnya ditetapkan Desa Wonorejo sebagai Juara ke 3 dalam lomba PPIP tahun 2015.

Perolehan juara 3 tersebut tidak hanya membuat masyarakat bangga dan senang, hal ini juga membuat pemerintah senang dan merasa berhasil dalam mendorong masyarakat selama ini. Hal ini disampaikan narasumber sebagai berikut:

“ya senang...senang kita bisa memberikan kenang-kenangan sebagai warga masyarakat merasa terpanggil dengan adanya PPIP dan juga masyarakat menghendaki itu terjadi. Tapi kalo tidak senang maka tidak mungkin suatu bangunan itu terjadi..jadi kita terpanggil sama temen-temen panitia dan juga bapak kepala desa memberikan kenang-kenangan yg terbaik itu..untuk desa untuk masyarakat”⁹

Selain rasa senang dan haru karena bangga atas prestasi yang diraih,dari sisi masyarakat juga merasakan kemudahan setelah adanya pembangunan jembatan dan jalan. Kemudahan-kemudahan tersebut sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat Desa Wonorejo. Seperti yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rawi, Ketua LPMD pada tanggal 08 Agustus 2018/16:27.

“Untuk kemudahan...untuk...kita kan..disini mayoritas... kan..petani... untuk kemudahannya itu...anu.... apa ...jadi dalam... apa...itu .mbak... mengangkut2 barang itu lebih mudah... kan dulu memutar 3 kilo.... sekitar 3 kiloan sekarang 1 kilo...dan untuk..biaya imbal kayak pertanian...lebih terjangkau.”¹⁰

Mayoritas masyarakat Desa Wonorejo bekerja di bidang pertanian. Sehingga kemudahan dalam mengangkut barang ataupun mengangkut hasil panen merupakan salah satu yang dirasakan masyarakat paling memberikan dampak. Jika dulu harus memutar maka sekarang tidak perlu memutar untuk mengangkut hasil panen. Ketika memutar maka biaya pengangkutan maupun biaya produksi lainnya akan meningkat. hal ini cukup membuat masyarakat harus pandai mengelola serta memperkirakan hasil panen yang didapat dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Hal itu dilakukan agar ketika musim panen tidak terjadi defisit anggaran. Artinya agar pengeluaran tidak lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan.

PPIP di Desa Wonorejo memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat di bidang pertanian. Selain masyarakat Desa Wonorejo, ada masyarakat desa lain yang juga sangat merasakan dampak besar dari adanya pembangunan jembatan dan rabat beton tersebut. Desa tersebut adalah Desa Puthuk dan Desa Ngadireso. Jembatan yang dibangun melalui Dana Bantuan PPIP tersebut selain sebagai akses masyarakat Desa Wonorejo menuju ladang juga merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan Desa Wonorejo dengan Desa Puthuk. Dibangunnya kedua infrastruktur tersebut semakin mempermudah masyarakat. kemudahan tersebut berupa akses menuju infrastruktur pelayanan publik yang semakin dekat seperti disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Taman, masyarakat desa Wonorejo pada Tanggal 20 Oktober 2018 Pukul 08:37

“Untuk...untuk aksesnya yang paling ter anu...paling dampak positif itu...desa sebelah,,bisa melewati jembatan,,kan gini...pusat pemerintahan..pusat pendidikan kan ada di desa kami...kantor kecamatan...terus beberapa pendidikan sekolah terus puskesmas kan ada di desa...terus untuk desa sebelah ...untuk desa puthuk yang menghubungkan wonorejo dan puthuk kan ada jembatannya itu...jadi desa sebelah...untuk penerima aksesnya..lebih cepet...jadi gak usah muter...kalo untuk...aksesnya dari kami sendiri ini yang terdampak itu untuk pertaniannya aja...jadi lebih cepet gitu...”¹¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, ada beberapa Desa yang memang ikut merasakan dampak pembangunan Jembatan dan Jalan Rabat beton yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonorejo. Desa tersebut adalah desa Puthuk dan Desa Ngadireso. pembangunan Jembatan dan Jalan rabat beton membuat akses masyarakat Desa Puthuk dan Desa Ngadireso semakin mudah. Hal ini dikarenakan Jembatan tersebut selain mempermudah masyarakat Desa Wonorejo menuju ladang, juga merupakan Jembatan penghubung antar Desa. Desa Wonorejo sangat diuntungkan dengan kemudahan akses menuju lading dan ketika hendak pergi ke Desa Puthuk ataupun Desa Ngadireso untuk urusan lain-lain. Sedangkan Desa Puthuk dan Desa Ngadireso dimudahkan terutama ketika hendak pergi ke kantor Kecamatan dan juga menuju infrastruktur pelayanan publik lainnya seperti sekolah dan puskesmas.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Wonorejo sebagai berikut:

“Karena ini kan lahan yang kita garap kemarin lahannya...terutama lahan ...tidak ada perkampungan...itu lahan pertanian semua...jadi dampak untuk akses ke pelayanan publik tidak ada...pelayanan publik kan di daerah yang pemukiman...jadi gak dilewati...justru bukan masyarakat kita yang lewat...gitu...justru masyarakat desa lain...seperti masyarakat desa Puthuk...biasanya lewat situ...berantai...karena memang program dari kabupaten itu...biar antar desa itu,...jalan antar desa...kenapa sih kita tiap tahun kok dikasi jalan rabat beton...karena ini adalah jalan antara

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Akmal, kader desa Wonorejo pada 08 Agustus 2018/13:44.

desa...penghubung antar 2 desa...desa ngadireso sama desa wonorejo.....iya...jadi orang-orang desa Ngadireso...ini istilahnya kalo mau ke kecamatan....yg sebelah barat ya terutama...itu lewat jalan situ,,,lebih dekat..daripada kita memutar lewat...kepasar juga lewat sini...”¹²

Jembatan yang dibangun memang dikhususkan untuk mempermudah akses masyarakat Desa Wonorejo menuju ke ladang. Sehingga memang tidak ada permukiman warga yang berada dekat dengan wilayah jembatan tersebut. Namun, dampak dari adanya pembangunan Jembatan ini juga ikut dirasakan oleh masyarakat desa Puthuk dan Desa Ngadireso. Jadi, dapat dikatakan bahwa dampak yang dihasilkan dari adanya pembangunan Jembatan dan jalan Rabat beton tersebut berantai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya hal tersebut karena memang letak desa Wonorejo yang strategis yang menghubungkan antar beberapa Desa di wilayah Kecamatan Poncokusumo. Desa Wonorejo juga merupakan Desa yang paling dekat dengan Kantor Kecamatan.

Tabel 5.2

Perbandingan Dampak Psikis Sebelum dan Sesudah dibangun Jembatan dan Jalan

NO.	SEBELUM	SESUDAH
1.	Masyarakat kesulitan dalam akses menuju ladang.	Kemudahan akses menuju ladang.
2.	Masyarakat kesusahan dan resah.	Masyarakat senang dan lega.
3.	Akses dari dan menuju desa sebelah tidak ada.	Mempermudah akses ke desa sebelah sehingga memudahkan berbagai urusan dan membangun hubungan.

Sumber: berdasarkan olahan peneliti, 2018.

¹² Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Sokeh selaku Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 17 Juli 2018/09:30.

b. Dampak Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal merupakan tempat yang harus terus dijaga dan dilestarikan kelangsungannya. Hal tersebut dikarenakan, di dalam lingkungan terdapat berbagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang. Lingkungan yang baik, bersih, dan aman merupakan tempat tinggal impian setiap orang. Lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi kehidupan baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Semakin baik lingkungan maka akan semakin besar pula dampak yang dirasakan. Dampak tersebut dapat terlihat secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya, lingkungan yang bersih merupakan salah satu hal yang menandakan bahwa masyarakat peduli akan kesehatan. Termasuk juga peduli akan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kebersihan lingkungan seperti kerja bhakti dan berbagai aktifitas lainnya. Sementara untuk lingkungan yang aman merupakan suatu hal yang menandakan bahwa masyarakat hidup rukun dan damai. Lingkungan yang aman dapat digambarkan dengan kondisi yang kondusif. Hampir tidak terjadi atau bahkan tidak ada gangguan berarti yang mengancam keselamatan masyarakat.

Dampak terhadap lingkungan dapat terjadi setelah adanya suatu kegiatan atau program di suatu wilayah tertentu. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Begitu pula dengan tingkat agregasi dampak, dapat memberikan dampak yang besar ataupun sebaliknya. Dampak lingkungan yang dimaksud di sini adalah sebagai contoh keharusan untuk berpindahnya seseorang dari lingkungan tertentu karena adanya suatu proyek. Dampak terhadap lingkungan sekitar merupakan dampak yang dapat langsung dilihat atau dampak yang paling mudah diamati perubahannya. Berbeda dengan dampak sosial yang tidak tampak di

permukaan, dampak lingkungan merupakan dampak yang pertama kali langsung dapat dilihat.

Pembangunan Jembatan dan Jalan Rabat Beton memberikan perubahan yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat di Desa Wonorejo. Terutama berkenaan dengan kondisi lingkungan sebelum dan setelah pembangunan dilakukan. Perubahan kondisi tersebut membuat aktifitas masyarakat semakin mudah karena sebagian besar masyarakat melewati Jembatan dan Jalan tersebut, baik untuk menuju ladang maupun untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Perubahan kondisi tersebut sangat jauh berbeda dengan kondisi sebelum pembangunan jembatan dan jalan, seperti yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Untuk jalan dan jembatan...disekitar..kondisinya sekarang lebih baik mbak untuk aksesnya kan lebih mudah jadi jalannya lebih lebar...dari yang awalnya satu meter sekarang 4 meter lebih..itu...jadi lebih bersih juga ..lebih tertata ..dan lebih aman..dan yang pastinya..kan sekarang di makadam yo...dan rabat gitu...”¹³

Diakui oleh Akmal selaku masyarakat desa Wonorejo, kondisi jembatan kini jauh lebih baik. Hal ini mengingat dulu kondisinya sangat berbeda jauh baik dari segi kebersihan maupun dari segi keamanan. Jika dulu kondisi jembatan sangat sempit bahkan sangat sulit dilewati oleh perseorangan. Sehingga sedikit banyak memberikan hambatan bagi masyarakat yang akan melewatinya. Setelah dilakukan pembangunan, Kini kondisinya jauh lebih lebar. Awal jembatan yang ± 1 meter dilebarkan menjadi ± 4 meter. Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Untuk setelah adanya jembatan...kondisinya...alhamdulillah bagus...karena banyak...sering...sebulan sekali, dua minggu sekali

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Akmal, kader desa Wonorejo pada 08 Agustus 2018/13:44.

itu...kerja bakti masyarakat...dan gampeng-gampeng disana itu...agak rapi gitu lo...kalo dulu..gak...gak...rapi...dulu rungkut...sekarang (apa yaa bahasa indonesianya)... yaa...lebat gitu lo mbak...orahng kesitu ae gak berani..”¹⁴

Selain kebersihan ada satu hal lain yang menjadi salah satu faktor terpenting dalam pembangunan infrastruktur yaitu keamanan. Keamanan merupakan faktor paling utama yang harus benar-benar diperhatikan. Keamanan menjadi sangat penting mengingat kondisi jembatan yang sewaktu-waktu dapat rusak atau mengalami keadaan yang tidak terduga lainnya. keamanan juga berkaitan erat dengan keselamatan masyarakat. Oleh sebab itu, tidak boleh diabaikan berkaitan dengan keamanan Jembatan.

Gambar 5.2
Kondisi Jembatan Sebelum dan Sesudah Dibangun



Sumber: Dokumentasi Tim PPIP, 2018

Gambar di atas menunjukkan kondisi jembatan sebelum dan sesudah dilakukan pembangunan. Kondisi Jembatan tersebut sangat jauh berbeda apabila dilihat dari segi keamanan. Hal ini dapat dilihat dari kedua gambar di atas. Gambar

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudkisan, Masyarakat desa Wonorejo pada Tanggal 20 Oktober 2018 Pukul 10:24

diatas menunjukkan kondisi jembatan yang setiap hari harus dilalui oleh masyarakat ketika hendak pergi ke ladang. Jalan tersebut sempit dan menanjak sehingga harus ekstra hati-hati siapapun yang melewatinya. Disebelah kanan dan kiri jalan diapit oleh tebing setinggi ± 10 M. selain curam, kondisi sekitar jalanan juga dipenuhi oleh pohon bambu serta pohon-pohon besar lainnya yang sewaktu-waktu dapat tumbang.

Hal tersebut tentu sangat berbahaya bagi keselamatan masyarakat, terutama ketika musim hujan. Hal tersebut disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalo banjir... banjirnya biasanya kayak...kan itu... kami... jembatannya kan bukan jembatan di sungai ya mbak ya...mitu namanya curah...curah...air bah kalo saat hujan..jadi itu...air kiriman dari atas mbak...kalo diatas ...di desa atas atau dihutan...di tegalan itu...hujan deras...kan airnya langsung dibuang turun ke curah,,...la itu besar kalo waktu hujan...tapi musiman...ndak,,ndakk...tiap hari ada air...jadi kalo untuk musim kemarau ya ndak ada air...jadi kalo musim hujan sewaktu-waktu airnya besar”¹⁵

Kondisi jalan sekitar jembatan tersebut juga dapat berubah lagi ketika musim hujan datang. Hal ini dikarenakan letak jembatan yang memang berada pada wilayah yang curam dan diapit oleh tebing tinggi pada kedua sisi jembatan. Selain itu karena jembatan tidak berada pada wilayah datar, apabila hujan turun maka air bah kiriman dari wilayah yang lebih tinggi menyebabkan banjir. Semakin lama hujan turun maka semakin besar pula banjir kiriman dari wilayah yang lebih tinggi tersebut. Bahkan ketika banjir datang, masyarakat sama sekali tidak dapat menyeberang ungkapnya narasumber sebagai berikut:

“Kalo yang dulu...kalo belum adanya jembatan yaa..kalo ada air yaa ndak bisa menyeberang jadinya...jadi..kalo ndak muter jauh itu nunggu...nunggu sampai berjam-jam untuk air surut..kalo.. nyebrang gak berani....soalnya airnya disitu...airnya deras dan sampung-sampung kan

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Akmal, petani dan kader desa Wonorejo pada 08 Agustus 2018/13:44.

tebing gitu...sekarang adanya jembatan sewaktu-waktu bisa...sekarang motor pun lebih enak kan...untuk lebar jembatannya kan 4 meter itu truk bisa...untuk awalnya dulu rencananya bisa dilewati truk..tapi untuk sekarang masih belum ...kan jalannya jalan yg utara itu masih terlalu nanjak ...itu bertahap...tahun demi tahun dibangun...”¹⁶

Kondisi yang demikian sangat membahayakan apabila dilewati saat hujan deras. Jadi ketika hujan masyarakat hanya ada dua pilihan yakni menunggu atau memutar jauh untuk bisa sampai ke ladang mereka. Kondisi tanah yang berupa tebing tinggi sangat membahayakan ketika terjadi banjir karena dapat sewaktu-waktu tergerus oleh air dan ambles mengingat belum adanya penyangga yang kuat.

Hal ini diungkapkan oleh narasumber Sebagai berikut:

“Kalau..untuk..kondisi drainase itu...dulu...sebelum dibangun jembatane...sudah ada..sudah dibangun dulu..dadi...ada...tapi gak bagus...tapi skrg sudah ada itu mbak..jadi kalo untuk...hujan deras langsung...teratasi lah...itu...langsung...kebuan... kalo dulu kan...bukan jalan itu mbak...itu kan...biasa itu...itu kayak lewat sepedah ae gak bisa...”¹⁷

Kondisi drainase yang belum cukup baik membuat masyarakat cukup kesulitan ketika hendak pergi ke ladang. ketika hujan datang, air yang diterima di daerah tersebut cenderung besar karena terbawa dari daerah yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan banjir yang dapat membahayakan baik untuk lingkungan sekitar maupun untuk masyarakat itu sendiri.

¹⁶ Ibid,

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Syaifudin Zuhri, Sekretaris PPIP desa Wonorejo pada 08 Agustus 2018/12:55.

Gambar 5.3
Kondisi Drainase Sebelum dan Sesudah Dibangun Jembatan



Sumber: Dokumentasi Tim PPIP, 2018.

Untuk lingkungan, drainase yang kurang baik tersebut apabila terjadi banjir maka akan mengikis sedikit demi sedikit tanah yang ada di pinggiran jembatan. Apabila hal tersebut terus terjadi, bukan tidak mungkin tanah yang ada disamping jembatan akan ambles. Selain itu, tiang penyangga yang terbuat dari bambu akan hanyut terbawa arus banjir. Namun, setelah dibangun jembatan beton hasil dari program PPIP, kondisi sekitar jembatan menjadi jauh lebih baik. Saat ini ketika hujan deras datang, masyarakat tidak perlu lagi khawatir ketika akan menyeberang menuju ladang. tebing-tebing tinggi di sekitar jembatan sudah di cor semua sehingga ketika air bah ataupun banjir besar datang, tidak ada yang perlu dikawatirkan.

Banjir atau air kiriman , selain dapat membahayakan untuk lingkungan sekitar jembatan juga dapat membahayakan bagi manusia, seperti yang disampaikan oleh Ketua LPMD sebagai berikut:

“Kalau hujan itu...sekarang yaa enak...kalau hujan kan org lewat kan tinggal melihat aja..gak seperti dulu...kalau dulu kalau hujann...nunggu, 1. Nunggu airnya itu habis, 2. Pake bambu untuk melompat, iya sampai terjatuh,,tapi kalau skrg bawa sepeda bawa rumput dari sana ke sini itu

*dekat..karena wilayah yang sebelah selatan yang dibawah itu curah itu miliknya milik desa wonorejo, pajaknya masuk desa wonorejo, tanahnya milik org wonorejo, nah itu yang akhirnya kita bangun”.*¹⁸

Berdasarkan pemaparan beliau di atas, ketika musim hujan datang memang akan sangat menyulitkan masyarakat untuk ke ladang, bahkan pernah ada warga yang menjadi korban dan hanyut terbawa arus air banjir. Walaupun hanya satu korban namun hal ini cukup membuat masyarakat waspada dan ekstra hati-hati agar tidak sampai terulang kejadian yang sama. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat semakin yakin dan melatarbelakangi ide pembangunan jembatan beton di daerah tersebut. Setelah adanya pembangunan jembatan, masyarakat hingga saat ini terjamin keselamatan dan keamanannya bahkan ketika hujan deras sekalipun sudah tidak khawatir untuk melewatinya. Bahkan saat ini, jembatan tersebut sudah bisa dilalui oleh kendaraan sehingga banyak masyarakat baik yang pergi ke ladang maupun melakukan aktivitas lain dapat menggunakan sepeda dan sepeda motor. Selain efektif dan efisien, hal ini sangat sesuai dengan kebutuhan yang selama ini diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah.

Selain kondisi jalan yang lebar, ada hal yang dampak yang jauh berbeda berkenaan dengan lingkungan yakni berkaitan dengan kemacetan dan polusi. Hal ini disampaikan oleh kepala desa sebagai berikut:

*“Jauh berbeda...mbak...terutama...kan kmarin kita program ppip ada 2...yang satu jembatan...dan yang satu ada rabat beton...itu..jadi yang rabat beton juga...alhamdulillah...kalau dulu mobil itu sering,,ee,, istilahnya disana macet... disana...karena jalan waktu itu istilahnya...aset jalan masih anu...masih... makadam tapi ada yang udah rusak gitu...tapi dengan ditutup dengan ppip yang kmarin kita rabat,...sekarang sudah ..lumayan lah...ini..”*¹⁹

¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rawi, Ketua LPMD pada tanggal 08 Agustus 2018/16:27.

¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Sokeh selaku Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 17 Juli 2018/09:30.

Selain dapat dilewati kendaraan, jalannya yang sudah di makadam membuat lalu lintas menjadi lancar. Lalu lintas yang lancar serta kondisi jalan yang sudah baik membuat Mobilitas masyarakat sampai saat ini menjadi tinggi. Jalanan yang dulu sulit dilewati karena makadam sekarang sudah di rabat dan ketika musim hujan tidak akan membahayakan.

Gambar 5.4
Sebelum dan Sesudah Jalan Rabat Beton Dibangun



Sumber: berdasarkan dokumentasi penulis, 2018.

Makadam merupakan pembangunan jalan yang dibangun menggunakan batu-batu yang dilakukan sebelum jalan tersebut diaspal. Jadi, lama tidaknya jalan tersebut di makadam tergantung pada ketersediaan dana dari pemerintah maupun dukungan dari masyarakat. Hal tersebut sangat menghambat lalu lintas disana karena sering terjadi kemacetan. Selain menghambat laju kendaraan, kemacetan mengakibatkan polusi meningkat karena kendaraan jauh lebih lama berkutat di daerah tersebut dan semakin banyak mengeluarkan gas karbondioksida. Jika terus menerus seperti itu maka kondisi udara sekitar jalan akan tercemar jauh lebih berat lagi. Pencemaran udara tentu sangat tidak baik untuk kesehatan pernafasan manusia dan juga mempengaruhi kondisi tumbuhan yang ada di sekitar jalanan.

Terakhir, berkaitan dengan kondisi lingkungan atau dampak yang terjadi terhadap lingkungan akibat pembangunan jembatan dan jalan rabat beton berkaitan dengan sampah. Seperti yang sudah diketahui bahwa persoalan sampah merupakan persalan serius yang sering diabaikan oleh masyarakat. Padahal sampah merupakan salah satu penyumbang pencemaran lingkungan disamping polusi dan lain sebagainya. Pengelolaan yang kurang tepat mengakibatkan sampah menjadi satu hal yang mengancam ekosistem. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalo dampak lingkungannya ada..tapi ndak besar mbak..dan biasanya untuk masy kan itu ..ya sampah itu ajasampah dibuang soalnya sambil ke ladang ..biasanya bawa sampah..itu masih..PR juga buat kami....tapi ndak banyak...”²⁰

Masyarakat masih belum banyak yang menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah sehingga masih ada masyarakat yang setelah pembangunan jembatan dan jalan rabat beton justru membuang sampah sembarangan dengan dibuang kedalam jembatan maupun dibuang di pinggir jalan. Seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwa masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik disekitar jalan rabat beton dan jembatan gelagar beton. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar namun hal ini sedikit banyak merupakan tindakan yang tidak terpuji dan sangat memalukan.

²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Akmal, petani dan kader desa Wonorejo pada 08 Agustus 2018/13:44.

Gambar 5.5
Kondisi Jembatan Saat Ini



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018.

Tidak terlepas dari besar atau kecilnya sampah yang dibuang, tindakan tersebut merupakan tindakan yang wajib mendapatkan teguran dan arahan. Untuk mewujudkan Lingkungan yang bersih dan aman maka masyarakat bersama dengan pemerintah harus saling bekerjasama membangun kesadaran akan lingkungan sekitar mereka. Sehingga dimanapun dan bagaimanapun kondisi lingkungan yang ditempati dapat tetap terjaga kebersihannya. Hal ini dikarenakan kebersihan merupakan salah satu indikasi atau ciri-ciri dari lingkungan yang sehat dan merupakan dambaan setiap masyarakat.

Tabel 5.3

Perbandingan Kondisi Lingkungan Sebelum dan Sesudah Pembangunan Jembatan dan Jalan

NO.	SEBELUM	SESUDAH
1.	Kerja bhakti ada, namun tidak teratur dan terorganisir dengan baik.	Kerja bhakti rutin diagendakan setiap bulan, banyaknya tergantung kesepakatan.
2.	Kondisi sebelum dibangun jembatan dan jalan, kurang aman apabila dilewati karena curam dan ketika hujan turun dapat membahayakan	Kondisi saat ini aman dan ketika musim hujan sekalipun masyarakat dapat melewatinya dengan aman dan tidak

	keselamatan dan sebelumnya pernah ada korban hanyut.	kawatir ketika akan pergi ke ladang ketika hujan turun.
3.	Drainase masih tradisional, pada sisi jalan masih menggunakan tiang penyangga dari bamboo dan tidak begitu kuat karena sewaktu-waktu dapat hanyut dan rusak.	Drainase semakin baik, pada sisi kanan dan kiri jembatan dicor sehingga kuat dan aman bahkan saat air datang.
4.	Ketika makadam, sering terjadi kemacetan lalu lintas karena kendaraan menunggu antrian lewat dengan kendaraan lain sehingga mengakibatkan polusi karena gas buang kendaraan bertambah.	Arus lalu lintas normal dan lancar sehingga polusi kendaraan dapat berkurang.
5.	Warga membuang sampah sembarangan dibawah jembatan.	Masih ada warga yang membuang sampah dibawah jembatan.

Sumber: *berdasarkan olahan peneliti, 2018.*

c. Dampak Ekonomi

Sementara untuk dampak ekonomi tidak hanya mengenai pekerja, tetapi juga konsumen dan pemilik modal, yaitu mengenai naik turunnya pendapatan, naik turunnya keuntungan dan naik turunnya harga dan kualitas barang. Dampak terhadap perekonomian merupakan salah satu dampak utama yang paling tampak. Perekonomian dan pembangunan merupakan suatu perpaduan yang saling melengkapi satu sama lain. Perekonomian tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh infrastruktur ataupun pembangunan yang merata di berbagai bidang baik fisik maupun sosial. Begitu pula sebaliknya, pembangunan yang baik apabila tidak diimbangi dengan pola perekonomian dari masyarakat yang baik maka tidak akan berkembang dan tidak dapat terlihat dampaknya. Keduanya memainkan peran penting dan masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus dapat dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini mengingat, perekonomian selalu ditetapkan sebagai tujuan dari pembangunan guna mengatasi permasalahan terbesar yakni kemiskinan dan pengangguran.

Kemiskinan memang selalu menjadi musuh besar yang harus dihadapi dengan benar-benar serius. Apalagi jika kemiskinan di suatu wilayah baik itu negara maupun daerah-daerah. kemiskinan di suatu wilayah memiliki tingkatan, variasi serta penanganan permasalahan yang berbeda-beda. Artinya, suatu program penanggulangan kemiskinan di perkotaan contohnya, tidak akan sama dengan program penanganan kemiskinan di daerah terpencil, begitu juga sebaliknya. Sehingga ketika berbicara tentang kemiskinan maka tidak akan pernah terlepas dari pola perekonomian, Pembangunan fisik ataupun sosial dan sarana infrastruktur.

Pembangunan fisik maupun sosial merupakan salah satu langkah yang terus dilakukan guna mengatasi permasalahan kemiskinan terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mengingat wilayah Indonesia yang merupakan gugusan kepulauan yang masing-masing berjarak cukup jauh menyebabkan pembangunan tidak merata. Pembangunan di Perkotaan akan jauh berbeda dengan pembangunan di Perdesaan. Begitu juga Pembangunan di Pulau satu dengan pulau yang lainnya juga sangat jauh berbeda. Hal ini dikarenakan letak wilayah yang terpencil dan akses yang sulit menyebabkan distribusi pembangunan tidak merata.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan guna mendorong pembangunan adalah melalui kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk program. Kemudian dari program tersebut akan diperoleh dampak. Dampak tersebut dapat berupa dampak fisik maupun dampak sosial. Dampak fisik berkenaan dengan dampak yang terlihat secara nyata sementara dampak sosial merupakan dampak yang tak terlihat namun dapat dirasakan seperti dampak terhadap perekonomian. Tingkat agregasi dampak terhadap perekonomian pun dapat besar namun juga dapat juga berdampak kecil. Hal ini tergantung dari proses pelaksanaan program serta

dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat. Semakin besar dampak yang dihasilkan maka akan semakin besar pula tingkat keberhasilan suatu program.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonorejo berlangsung pada tahun 2014 dan baru selesai pada tahun 2015. Pembangunan dilakukan dalam 2 tahap yakni pada tahap pertama membangun jembatan dan yang kedua membangun jalan rabat beton. Pembangunan tersebut didasarkan atas keinginan dan kebutuhan seluruh masyarakat Desa Wonorejo. Hal tersebut diputuskan dalam berbagai musyawarah dan rapat baik di tingkat RW hingga pada rapat di Balai Desa. Pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai seorang petani. Perekonomian yang baik dan stabil merupakan suatu hal yang sangat diharapkan masyarakat terutama petani. Dengan adanya pembangunan, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian disamping mempermudah akses. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalo untuk perekonomian itu...dampaknya sangat besar mbak yaa...pertama itu..dibidang pertanian..hampir 75% warga desa wonorejo kan petani dan sebagian besar juga petani lahan kering atau dikebun, jadi untuk adanya jembatan yg awalnya muter untuk 3 kilo sekarang lebih dekat...untuk...biasanya gini...untuk petani tebu kan langsir..langsir itu diimbal-imbal gitu kan..jadi dilahan yg tengah di imbal-imbal kan membutuhkan biaya yang banyak. adanya jembatan bisa langsung lewat jembatan dan aksesnya lebih mudah dan lebih cepet..gitu..”²¹

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang juga merupakan salah satu petani di Desa Wonorejo diperoleh keterangan bahwa dampak yang dirasakan dari adanya pembangunan Jembatan dan Jalan Rabat Beton sangat dirasakan berdampak besar terhadap sektor perekonomian warga desa. Hal ini mengingat

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Akmal, petani dan kader desa Wonorejo pada 08 Agustus 2018/13:44.

sebagian besar warga desa bermatapencaharian sebagai seorang petani yang mencapai hampir $\pm 75\%$. Jenis tanah pertanian yang digarap oleh warga sebagian besar merupakan tanah lahan kering atau biasa disebut ladang/kebun. Untuk kondisi tanah yang demikian, pada umumnya letaknya biasanya agak jauh dari permukiman warga. Tanah lahan kering letaknya selain jauh juga di dataran tinggi, ada juga yang di lereng-lereng dan miring. Berbeda dengan persawahan yang harus dekat dengan sumber air, dekat dengan permukiman warga, dan di dataran rendah dekat sungai atau sumber air lainnya. Hal yang sama diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Untuk perekonomian... setelah jembatan itu... alhamdulillah semakin meningkat... untuk sektor pertanian... du.. dan... opo... itu lo... kan disitu kan..perat... pertanian semua... kebanyakan pertanian... dari segi... segi... opo... perjalanannya bagus... maksudnya... akses jalan e ke...pertanian iku bagus mbak...dulu kan...sistem e ngimbal gitu lo mbak...ngimbal itu dulu ngimbal e sampek nang..nang..opo...iku lo...ke jalan yang bisa di lahui...mobil kan...sekarang kan mobil langsung sudah bisa masuk jadi...pertanian...aksesnya lebih...lebih bagus dan harga jual e meningkat... mbak...kalo dulu...kalo dulu harus memutar ,,kalo lihat yang dekat dari embong gede..iku lo mbak..saiki kan sudah jalan semua..berarti...langsung ngimbal gitu mbak...”²²

Jarak yang ditempuh warga untuk mencapai ladang ± 1 Km bila melalui jalur terdekat dari permukiman warga. Namun, jalur tersebut hanya dapat dilalui oleh perseorangan jadi untuk kendaraan baik roda dua maupun roda empat tidak dapat melewati jalan tersebut. Apabila masyarakat hendak mengangkut hasil panen harus memutar terlebih dahulu sejauh $\pm 3-5$ Km. Hal ini menyebabkan biaya pengangkutan meningkat dan mempengaruhi efisiensi dan efektifitas pengangkutan

²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Syaifudin Zuhri, Sekretaris PPIP desa Wonorejo pada 08 Agustus 2018/12:55.

hasil panen. Terutama untuk hasil panen yang berada pada lahan kering seperti tanaman tebu. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Iya banyak...paling enggak sekarang itu...sekitar...40% sayur, 40% jeruk, 20% tebu...Banyak ini...termasuk pemasok kan sebetulnya...iya iyaa...jadi sekarang itu,,,paling tidak itu..di kecamatan poncokusumo itu..yaa pemasok terbesar lah desa wonorejo dari buah dan sayuran...mungkin luasan lahannya gak seberapa tapi tanaman sayur kan hampir mayoritas”²³

Sektor pertanian di desa Wonorejo di dominasi oleh hasil buah-buahan sekitar 40%, kemudian Sayuran yang kurang lebih 40%, dan tanaman tebu yang kurang lebih 20%. Berdasarkan ketiga komoditi tersebut, desa Wonorejo termasuk salah satu desa pemasok hasil produksi pertanian terbesar di wilayah Kecamatan Poncokusumo. Walaupun lahan tidak terlalu luas namun produktivitas pertanian di desa Wonorejo sangat baik sehingga mampu menghasilkan produk pertanian yang melimpah. Adanya pembangunan jembatan dan jalan rabat beton sangat membantu para petani ketika hendak mengangkut hasil panen.

Gambar 5.6
Kegiatan Masyarakat dalam Pengangkutan Hasil Panen



Sumber: dokumentasi penulis, 2018

²³ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Fatah, selaku Ketua OMS desa Wonorejo pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 09:30.

Untuk pengangkutan hasil panen tidak dapat dilakukan hanya dalam satu kali angkut, jadi perlu beberapa kali angkut. Istilah yang biasanya digunakan petani adalah langsir atau imbal. Langsir atau imbal merupakan kesamaan dari diangkut lebih dari satu kali agar dapat terangkut semua. Artinya semakin besar hasil panen maka semakin besar pula jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengangkutan. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Ya jauh...jauh berbeda mbak itu...berbeda 90 derajat itu perbedaannya... karena dulu kalau hujan itu masyarakat itu mengangkut hasil pertanian itu ya...memakai pick up itu ongkosnya 50 ribu tapi sekarang 30 ribu mau...jadi selisihnya 20 ribu, itu yang menjadi acuan daripada kita itu membangun. Itu yang pertama kan masyarakat itu harus senang...masyarakat senang trus ada dana, trus masyarakat itu sepakat ...nah partisipasinya yang sangat dibutuhkan oleh panitia ini..la berapapun kalau masyarakat gak setuju ya kita ndak mgkin bisa berangkat untuk membangun,,ya seperti itu...”²⁴

Biaya untuk sekali angkut dengan menggunakan *Pick Up* sebesar 50 ribu untuk sekali angkut ketika belum ada jembatan. Setelah adanya jembatan ongkos menjadi jauh lebih kecil yakni 30 ribu. Biaya tersebut belum termasuk kelipatan, jadi apabila hasil panen di langsir maka biayanya tentu juga akan bertambah tergantung berapa kali di langsir. Perbedaan yang cukup signifikan ini menjadi salah satu dampak yang paling berpengaruh bagi masyarakat. Sehingga pembangunan sebuah jembatan merupakan satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kondisi tersebut belum ditambah lagi ketika ada pengeluaran yang tak terduga seperti ketika ban bocor ataupun sebagainya. Pemilihan jenis kendaraan juga berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan, karena biaya untuk pengangkutan dengan Truk pasti berbeda dengan hanya menggunakan *Pick Up* seperti yang disampaikan narasumber sebagai berikut:

²⁴ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rawi, Ketua LPMD pada tanggal 08 Agustus 2018/16:27.

*“Iya,,,pertaniannya,,nah dengan adanya jembatan itu yaa sekarang...lahan misalkan itu harga tanah itu satu , sudah naik harganya, terus ongkos biaya operasional petani pengangkut tebu misalkan dari ladang itu berkurang mbak. Satu contoh, satu hektar itu ada 100 ton, untuk tebu misalkan, dulu sbelum adanya jembatan dan jalan itu ongkosnya sampe 10 rb per kwintal, berrti kalau 100 ton, setiap tahun kita harus mengeluarkan 10 juta, itu untuk ongkosnya saja.tapi kalo satu jembatan jadi...akhirnya susut untuk yang dikeluarkan itu hanya 6 juta...jadi setiap tahun itu kita bisa mengurangi operasional 4 juta. Nah itu senangnya petani dan juga itu menjadi satu tujuan dari lembaga kita...iya itu tujuannya”.*²⁵

Salah satu keuntungan yang dirasakan oleh petani dengan adanya jembatan dan jalan yang telah dibangun adalah biaya pengangkutan hasil panen semakin terjangkau dari tahun ke tahun. Mereka pun dapat memangkas biaya yang semula cukup tinggi menjadi biaya yang terjangkau. Biaya yang semula per tahun sebesar 10 juta kini hanya tinggal 6 juta dengan pemangkasan biaya sebesar 4 juta Rupiah. Biaya tersebut juga berlaku bagi para petani lain yang mengangkut hasil panen dengan menggunakan kendaraan seperti Pick Up dan Truk. Tentu hal ini menjadi sebuah dampak yang sangat positif dan merupakan suatu tanda bahwa adanya pembangunan infratsruktur fisik seperti jembatan dan jalan merupakan solusi dari permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para petani. Selain itu, tanah atau ladang sekita jembatan yang telah dibangun kini menjadi naik harga jualnya. Tentu saja hal ini merupakan satu hal yang menggembirakan bagi para petani. Kini setelah jembatan dan jalan selesai dibangun semuanya menjadi semakin mudah seperti yang disampaikan narasumber sebagai berikut:

*“Untuk biaya produksi jadi lebih murah mbak...biasanya yang transport nya muter kan membutuhkan truk yang banyak dan...lama gitu ya...mahal kan...lah untuk yang tadi langsir juga ndak ada...jadi untuk biayanya kan bisa lebih murah...ada pertambahan... dikurangi dari biaya transport”.*²⁶

²⁵ Ibid,

²⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudiksan, Masyarakat desa Wonorejo pada Tanggal 20 Oktober 2018 Pukul 10:24

Apabila biaya pengangkutan tinggi hal tersebut berdampak terhadap tingkat pendapatan yang harus diterima oleh masyarakat atau para petani. Belum lagi jika ditambah dengan anjloknya harga barang ketika panen. Setelah adanya pembangunan jembatan maka para petani dapat merasa lega karena dapat memangkas biaya pengangkutan yang cukup banyak. Walaupun ketika menyinggung tentang pendapatan yang mereka terima adalah relatif sangat tergantung situasi dan kondisi saat panen disampaikan oleh narasumber Sebagai berikut:

“Relatif...kalau pendapatan relatif...melihat hasil pertaniannya... bagus dan tidak kan tergantung...dan juga daerah situ sebelum kita bangun lahan pertanian murah mbak..murah hasilnya...karena kan kendalanya dengan ongkos, karena tanah kan kalau disewakan juga gak laku, karena biayanya terlalu tinggi apalagi sekarang petani,karena kan masa-masa sulit, hasilnya kan juga sulit, jadi kita sama-sama di pedesaan kan seperti itu”.²⁷

Apabila dikaitkan dengan jumlah yang diterima, memang untuk pendapatan sifatnya relatif jadi sewaktu-waktu dapat berubah tergantung dari harga pasar atau cenderung mengikuti harga pasar. Karena disamping kualitas produksi yang dihasilkan, harga pasar jauh lebih penting, keadaan yang bagus tidak selalu berharga mahal, apabila harga turun maka harga barang akan turun juga. Dengan memangkas biaya operasional maka satu keuntungan sudah didapatkan dengan begitu kendala lain seperti biaya tak terduga dapat ter-Cover dengan baik. Ditambahkan lagi, mengingat kondisi petani yang saat ini sedang dalam masa sulit mereka harus benar-benar berfikir strategi apa yang harus diterapkan untuk menyasati keadaan tersebut.

²⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rawi, Ketua LPMD pada tanggal 08 Agustus 2018/16:27.

Dampak terhadap perekonomian selanjutnya yang secara tidak langsung menguntungkan para petani adalah berkaitan dengan harga jual tanah. Tanah pertanian di desa Wonorejo terutama disekitar jembatan sebelum adanya pembangunan, harganya sangat murah bahkan untuk disewakan banyak yang tidak mau. Namun setelah adanya jembatan dan jalan, kondisinya berubah seperti yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Semua harga yang saya bangun jembatan itu sama masyarakat, harga pertanian dan juga tanah itu meningkat langsung...satu tahun langsung meningkat...disini apa itu...kabupaten malang memfokuskan untuk desa wonorejo itu disuruh mewakili kabupaten malang untuk lomba tingkat provinsi...sampai disitu kan....iya itu.jadi kita itu ndak anu...ndak tau...kalo seperti itu ndak tau..ya Cuma itu,,kita sebagai masyarakat kompak, kemudian terbentuk menjadi jembatan...itu..”²⁸

Kenaikan harga jual tanah menjadi salah satu keuntungan tersendiri bagi masyarakat, karena tanah di area tersebut sebelumnya tidak bernilai tinggi mengingat lokasi yang aksesnya sulit. Keterbatasan akses menuju lokasi juga menjadikan masyarakat enggan untuk menanam lahan tersebut. Jika ditanami maka biaya pengangkutan tinggi karena harus di langsir, tapi jika tidak ditanami maka masyarakat yang mayoritas petani tidak bisa panen akibatnya tidak bisa memiliki penghasilan yang cukup.

²⁸ Ibid,

Gambar 5.7
Tanaman di Ladang Sekitar Jembatan



Sumber: Dokumentasi penulis, 2018

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa setelah adanya pembangunan jembatan dan jalan rabat beton, Saat ini lahan disekitar jembatan sudah digarap dan ditanami oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat terus mengoptimalkan produksi hasil pertanian. Selain nilai perekonomian naik, dengan pembangunan jembatan dan jalan menjadikan masyarakat semakin giat melakukan aktivitas ke ladang. Kondisi jalan yang sudah dapat dilalui kendaraan menjadi alasan utama masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan narasumber berikut ini:

“Untuk peluang pekerjaan...yang dulu aksesnya kan sulit... jadi membutuhkan... ya muter-muter gitu..kalo sekarang dengan adanya jembatan jadi peluangnya lebih besar soalnya yang dulu males ke kebun...soalnya aksesnya yang sulit sekarang enak gitu mbak ...pakek motor, pakek mobil lebih enak jadi lebih semangat...ke kebun gitu lo...”²⁹

Jadi ketika akses semakin mudah, dampak lain akan bermunculan seperti pada peluang pekerjaan. Hal ini dikarenakan masyarakat semakin semangat pergi

²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Akmal, petani dan kader desa Wonorejo pada 08 Agustus 2018/13:44.

ke ladang ditambah dapat membawa kendaraan sendiri. Dengan begitu banyak petani yang mulai menggarap lagi di ladang mereka yang dulu terisolir dengan ditanami berbagai jenis komoditas pertanian. Semakin lama produksi hasil pertanian juga semakin meningkat. Peningkatan tersebut membuat para petani di Desa Wonorejo dapat men-*Suplay* lebih banyak sehingga dapat memenuhi pasokan kebutuhan baik sayuran maupun hasil komoditas pertanian yang lain. Sehingga jika hal tersebut terus menerus dilakukan maka perekonomian akan semakin berjalan kearah yang positif seperti yang n selama ini diharapkan dengan adanya pembangunan infatrstruktur jembatan dan jalan.

Tabel 5.4
Kesejahteraan Keluarga di Desa Wonorejo

No.	Kesejahteraan keluarga	Tahun 2014-2015	Tahun 2016	Tahun 2017-2018
1.	Keluarga pra sejahtera	353	332	324
2.	Keluarga sejahtera 1	265	247	234
3.	Keluarga sejahtera 2	614	656	679
4.	Keluarga sejahtera 3	15	17	20
5.	Keluarga sejahtera plus	7	8	8
Total jumlah kepala keluarga		1254	1260	1265

Sumber: Dokumentasi desa: tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2017.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat akibat perekonomian yang berjalan dengan baik dan stabil. Pada Tahun 2018 jumlah keluarga sejahtera di desa Wonorejo berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera berjumlah 324 kepala keluarga, keluarga sejahtera 1 berjumlah 234 kepala keluarga, keluarga sejahtera 2 berjumlah 679 kepala

keluarga, keluarga sejahtera 3 berjumlah 20 kepala keluarga, dan keluarga sejahtera plus berjumlah 8 kepala keluarga.

Tabel 5.5

Perbandingan Kondisi Ekonomi Sebelum dan Sesudah Pembangunan Jembatan dan Jalan

No.	SEBELUM	SESUDAH
1.	Biaya pengangkutan hasil panen sangat mahal dikarenakan kendaraan harus memutar jauh untuk melangsir hasil pertanian.	Biaya pengangkutan hasil panen menjadi lebih murah karena tidak perlu memutar jauh sehingga dapat menekan
2.	Hasil produksi pertanian tidak terlalu banyak karena akses yang sulit membuat masyarakat jarang ke ladang untuk menggarap lahan mereka.	Peningkatan hasil produksi karena mudahnya akses sehingga masyarakat mudah menggarap lahan dan pergi ke ladang sewaktu-waktu.
3.	Harga jual tanah pertanian rendah karena akses yang sulit bahkan jika disewakan banyak yang tidak mau.	Harga jual meingkat langsung karena akses yang mudah dan menjadi daerah strategis setelah adanya pembangunan jembatan dan jalan.
4.	Peluang pekerjaan minim karena masyarakat jarang yang pergi ke ladang dan banyak lahan yang tidak ditanami.	Peluang pekerjaan meningkat seiring mulai digarapnya lahan pertanian karena masyarakat sewaktu-waktu pergi ke ladang.

Sumber: diolah oleh penulis, 2018.

c. Dampak Sosial Serta Personal

Dampak sosial dan personal merupakan dampak yang dapat dilihat atau dicontohkan dari kebebasan berpendapat, berkumpul, keamanan, dan lain-lain. Berkaitan dengan berpendapat, disini cenderung melihat bagaimanakah keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam menyumbangkan atau mengeluarkan ide-ide serta keinginan yang hendak diwujudkan. Penyampaian keinginan dan ide-ide tersebutlah yang kemudian disebut sebagai pendapat. Berbagai macam pendapat tersebut kemudian boleh diutarakan dalam suatu forum atau rapat. Kemudian berbagai pendapat tersebut akan disaring dan diambil sesuai dengan keputusan terbanyak dan hasilnya disesuaikan dengan kebutuhan yang

diinginkan oleh seluruh masyarakat. Kebebasan dalam mengutarakan ide-ide dan keinginan tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah kebebasan berpendapat.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hal yang menandakan suatu kegiatan baik dalam organisasi maupun luar organisasi berjalan dengan baik. Kebebasan berpendapat sendiri di Indonesia sudah ada payung hukumnya. Jadi bagi siapa saja yang hendak berpendapat dimanapun kegiatannya tidak dilarang asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pasal mengenai kebebasan berpendapat tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang”. Adanya pengaturan tentang kebebasan berpendapat merupakan acuan bagi seluruh masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapatnya dan hal-hal penting secara bebas tanpa ada tekanan dari manapun. Hal ini berlaku untuk seluruh kegiatan terutama kegiatan atau forum yang menghadirkan elemen masyarakat sebagai aktor utamanya. Salah satu contoh Kegiatan atau forum yang melibatkan masyarakat sebagai aktor utama adalah kegiatan pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan guna meningkatkan kemampuan serta potensi masyarakat desa. Melalui kegiatan tersebut masyarakat dapat lebih mengembangkan potensi dan kemampuannya karena mereka dituntut untuk bekerjasama dan menyelesaikan suatu kegiatan dengan baik. Berawal dari kegiatan perencanaan hingga pemeliharaan seluruh elemen masyarakat dituntut untuk dapat memberikan hasil yang terbaik atau sesuai target yang ditetapkan. Pembangunan tersebut juga tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu ditransformasikan baik

dalam bentuk infrastruktur maupun layanan publik lainnya. Ketika pembangunan tersebut berjalan dengan baik maka infratsruktur pelayanan publik di desa akan semakin meningkat, hasilnyan masyarakat secara perlahan juga akan meningkat baik skill maupun pengetahuannya akan sesuatu hal.

Masyarakat Desa Wonorejo merupakan masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi yang berada dikaki gunung Semeru daan gunung Bromo. Tipikal masyarakat Wonorejo merupakan masyarakat perdesaan yang guyub rukun seperti masyarakat perdesaan lainnya yang hidup sederhana dan saling tolong menolong. Ketika ada kegiatan baik itu kegiatan pribadi maupun kegiatan desa yang membutuhkan bantuan banyak orang maka warga desa Wonorejo akan saling gotong royong membantu. Seperti kebanyakan tipikal masyarakat yang hidup di perdesaan, selain sederhana sebagian besar dari mereka juga belum begitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai seperti halnya di perkotaan. Begitu juga dalam hal infrastruktur yang masih sangat jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan di perkotaan.

Walaupun dari segi infratsruktur belum memadai tetapi banyak kelebihan lain yang hanya di miliki oleh masyarakat perdesaan. Salah satu nya yakni musyawarah mufakat yang dilakukan setiap kali akan mengerjakan sesuatu seperti dalam wawancara dengan narasumber berikut ini:

“Kita selalu berunding mbak, tanpa berunding kan kita gak bisa kalo membangun, salah itu kalo kita membangun tanpa berunding itu ndak pas, ya ndak pas, yang bagus itu kan musyawarah dulu,,kita musyawarah hasilnya dari kaupatenb itu dimusyawarahkan itu langunsg kita turun kebawah langsung ke RT, dari RT, RW, masyarakat kita guyubkan jadi satu,, itu smape empat kali atau lima kali ndak kapo-kapok...ya itu...la untuk apa, untuk membuka daripada kesepakatan dimana dia itu apa itu,

memberdayakan ataupun memberikan kesan memberika pesan untuk pembangunan”³⁰

Musyawarah selalu dikedepankan ketika akan mnengerjakan suatu kegiatan apapun baik itu pembangunan maupun ketika ada kegiatan desa yang lain. Pemerintah didukung oleh masyarakat saling membantu dalam berbagai kegiatan terutama setelah pembangunan jembatan dan jalan selesai dilakukan. Musyawarah dilakukan langsung diawali oleh pemerintah desa yang berinisiatif turun kebawah secara langsung, jadi istilahnya seperti menjemput bola. Hal ini dilakukan mengingat jika dikumpulkan langsung di Balai Desa maka semakin banyak orang dan semakin banyak pikiran atau ide yang masuk tetapi ada keterbatasan waktu. Oleh sebab itu pemerintah bersama jajaran dan perangkat turun mulai dari RT satu ke RT yang lain sampai selesai. Ketika RT sudah maka beralih ke tingkat RW, jadi pemerintah mengumpulkan masyarakat lagi kemudian ditanyai satu persatu apa yang menjadi permasalahan warga. Hal itu dilakukan hingga 4 sampai 5 kali sebelum pembangunan dilakukan hingga mencapai kesepakatan yang sama antar seluruh masyarakat.

Gambar 5.8
Kegiatan Musyawarah



Sumber: Dokumentasi Tim PPIP, 2018.

³⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rawi, Ketua LPMD pada tanggal 08 Agustus 2018/16:27.

Berangkat dari kegiatan tersebut, masyarakat menjadi semakin percaya diri, serta tidak malu ataupun minder ketika hendak menyampaikan pendapat dimuka umum. Hal ini dikarenakan pemikiran masyarakat sudah jauh lebih berkembang, lebih lanjut disampaikan narasumber berikut ini:

“Setelah jembatan dibangun, masyarakat pemikirannya lebih terbuka lagi...owh iki a maksdu e dibangun ...dadi petani untung, lembaga juga seneng karena memberikan kesan, memberikan kenang-kenangan yang terbaik untuk masy, nah akhirnya setelah itu terbukti semuanya hasil pertanian meningkat, terus operasionalnya sedikit, mengangkurt rabuk itu juga ongkosnya sedikit, lahan pertanian menjadi mahal, itu krn gara-gara jalan, nah setelah itu terbukti, masyarakat pemikirannya...la setelah terbuka skrg lembaga sm pemerintahan desa itu tidak susah-susah kalau ...apa itu...mau membangun di desa, masalahnya apa?? Buktinya sudah ada”.³¹

Setelah pembangunan jembatan selesai dilakukan, banyak sekali dampak positif yang diperoleh tidak hanya dari kemudahan dan perekonomian tetapi juga dari segi social personal. Masyarakat Desa Wonorejo menjadi lebih terbuka lagi terhadap jalannya pemerintahan. Jadi ketika ada permasalahan apapun masyarakat dengan sednirinya langsung mengadu ke pemerintah desa. Masyarakat langsung menyampaikan keluhan ataupun usulan kemudian dengan begitu pemerintah juga mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat menangani permasalahan dengan tepat. Sehingga hubungan antara masyarakat dengan pemerintah menjadi saling ketergantungan. Masyarakat membutuhkan bantuan pemerintah sementara pemerintah juga membutuhkan bantuan masyarakat agar roda pemerintahan berjalan dengan lanjut beliau berikut ini:

“.....Sekarang aja ada 10 titik yang mau dilebarkan, minta...kalau dulu kita yang minta, pemerintah desa yang minta, tapi sekarang enggak, masyarakat yang minta ...kan berarti sudah berjalan dengan pemerintah desa ...itu sulit,, sulit itu,..disini itu,..”.³²

³¹ Ibid,

³² Ibid,

Bahkan saat ini, masyarakat sudah dapat meminta sendiri apa-apa yang dibutuhkan. Jadi pemerintah tidak lagi berusaha payah menarik masyarakat untuk terlibat, tetapi masyarakat sudah sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya baik dari segi sosial maupun ke pemerintahannya. Hal ini dinilai menjadi hal yang sangat sulit dilakukan akan tetapi masyarakat dan pemerintah Desa Wonorejo dapat melakukannya. Satu prestasi yang mungkin sangat jarang ditemukan di daerah lain ataupun di Perdesaan lain. Mulai dari hal-hal kecil yang kemudian menjadi besar dan menjadi kebiasaan baik yang tumbuh dilingkungan masyarakat Desa Wonorejo. Lebih lanjut lagi narasumber menyampaikan sebagai berikut:

“.....itu kita terapkan seperti itu mbak...jadi rundingan...pemerintah desa masuk ke bawah sama lembaga itu langsung ke RT, ke RW, disini kan ada 6 RW,,itu dikumpulkan...(Pak RW 1, saya besok setelah ba'da maghrib mau kumpulan dirumah sampean...kumpulkan RT, kumpulkan tokoh masyarakat, kumpulkan guru ngaji kita berunding,,mana yang diperlukan) ..itu adalah untuk tingkat Pertama, menggali gagasan, ya omong2 an biasa kan nyantai... ngomong udah masyarakat... kan ndak takut...wes samean ngomong opo sing during...kita catet...satu satu...satu...wes dah selesai sudah cukup satu jam...pindah lagi ba'da isya'... ke gang yang sebelah sana...sama RW 2 kumpulkan anak buah sampean... dikumpulkan masyarakat, guru ngaji... suruh usul...usul... Sampai RW 6, 3 hari selesai wonorejo.....”³³

Jadi pemerintah selalu menupayakan untuk melakukan rundingan terlebih dahulu ketika hendak melakukan suatu kegiatan. Hal ini terus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat meraskan menjadi bagian yang sesungguhnya dalam proses pemerintahan di Desanya. Mulai dari tingkat bawah Kepala Desa berserta jajarannya mendatangi satu per satu. Hal ini merupakan satu terobosan yang baik yang terbukti sudah berhasil dilakukan oleh pemerintah Desa Wonorejo. masyarakat ssetelah pembangunan jembatan dan jalan sudah jauh lebih berkembang

³³ Ibid,

dari segi banyak hal, salah satunya berkaitan dengan personal mereka dan jauh lebih percaya diri lagi.

Setelah selesai musyawarah ditingkat bawah, kemudian pemerintah mengumpulkan keseluruhan masyarakat dalam satu pertemuan di Balai Desa, hal ini disampaikan narasumber sebagai berikut:

“nahh...jadi ndak kita bikin indikator lo ini...la...ndak kita bikin indikator,...setelah selesai semua kita tulis ulang kita undang masyarakat untuk ke balai desa namanya musdes, musyawarah desa, disitu ada kepolisian, adakoramil, ada dari kecamatan, nah 3 pilar kumpul disitu,,kita catat dibuka di LCD...sreeetttt...RW 1 usulannya ini..ini..ini...ada yg ketinggalan sampean??? Gak ada pak...ya sudah sampe RW 6, ada yg ketinggalan??? Gak ada.. nah kalo sudah gak ada,,kita bentuk Tim untuk membuat RAB, itu bersama sama dg kita-kita teman-teman ini ..itu gak ada yg ditutup-tutupi mbak dsini...”³⁴

Berangkat dari hal tersebut, masyarakat memiliki sarana atau wadah dalam mengeluarkan pendapat mereka. Bahkan ketika dikumpulkan dalam satu kegaitan besar di Balai Desa mereka sudah tidak malu lagi ketika ada usulan lagi atau ada yang terlewatkan meraka langsung menyampaikan dalam kegiatan tersebut. Hal ini sangat penting karena masyarakat biasanya cenderung malu atau tidak percaya diri ketika mengutarakan pendapat dimuka umum. Apalagi di lingkungan masyarakat perdesaan yang cenderung minder ketika akan mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek mereka ini menjadi satu bukti bahwa setelah pembangunan jembatan dan jalan secara tidak langsung masyarkat dapat jauh lebih berkembang melebihi apa yang diharapkan oleh pemerintah Desa Wonorejo.

Selain dapat mengutarakan pendapat dan menjadi terbuka pemikirannya, masyarakat juga dinilai dari segi kemananan lingkungan tempat mereka tinggal.

³⁴ Ibid,

Bagaimana kondisi keamanan setelah pembangunan jembatan dan jalan disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalo dampak negatifnya..ndak ada mbak....soalnya memang jembatan memang diharapkan adanya jembatan itu memang usulan dari masy...memang benar2 diinginkan adanya jembatan soalnya untukmenunjang perekonomian warga sekitar malah meningkat untuk yang negatifnya ndak ada...”³⁵

Lebih lanjut lagi ketika ditanya apakah ada dampak negatif setelah pembangunan jembatan dan jalan jawabannya tidak ada. Dampak negative disini seperti masalah keamanan yang sering muncul di lingkungan perdesaan salah satunya adalah begal motor. Kondisi jalan yang sudah bagus tidak luput dari tindak kejahatan. Oleh sebab itu, masyarkat sendiri sudah sangat menyadari akan pentingnya hal tersebut maka kondisi setelah dibangun jembatan dan jalan menjadi aman. Masyarakat saling mendukung untuk menjaga kemananan lingkungannya sehingga kegiatan negative dapat terhindarkan.

Tabel 5.6

Perbandingan Kondisi Sosial dan Personal Sebelum dan Sesudah Adanya Jembatan dan Jalan

NO.	SEBELUM	SESUDAH
1.	Musyawaharah sebagai hal yang sifatnya formalitas atau jika ada hal penting saja dilakukan.	Musyawaharah selalu dikedepankan dalam berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan hingga selesai suatu kegiatan apapun.
2.	Golongan tertentu yang mengikuti serta memberikan pendapatnya.	Melibatkan semua golongan, baik muda maupun golongan tua dan juga kaum perempuan selalu diikutsertakan.
3.	Masyarakat masih belum berani mengeluarkan ide atau berpendapat dimuka umum saat forum berlangsung.	Masyarakat sangat aktif dan sudah berani berpendapat dimuka umum serta semakin terbuka kepada pemerintah.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018.

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Akmal, petani dan kader desa Wonorejo pada 08 Agustus 2018/13:44.



5.2 Dampak Organisasional

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak. Dampak yang langsung adalah berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Jelasnya, karena misi suatu organisasi adalah mencapai tujuan tertentu, maka yang dimaksud dengan dampak organisasional dari suatu kebijakan adalah seberapa jauh kebijakan tersebut membantu atau mengganggu pencapaian tujuan-tujuan suatu organisasi. Sementara itu, suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak tak langsung terhadap organisasi, misalnya melalui peningkatan semangat kerja para anggota organisasi. Proyek kegiatan PPIP ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka dibutuhkan koordinasi dan pengaturan organisasi yang baik antar masyarakat yang terlibat baik individu maupun kelompok-kelompok organisasi masyarakat. Karena melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat maka seringkali terjadi berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian tujuan yang ingin dicapai antara satu organisasi masyarakat dengan organisasi masyarakat yang lain. Organisasi masyarakat yang terlibat terutama adalah LPMD dan Karang Taruna yang langsung ditunjuk untuk membantu menangani proyek pembangunan Jembatan dan Rabat beton.

LPMD ialah kepanjangan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan salah satu organisasi pokok yang ada di Desa. LPMD memiliki tugas pokok yakni menyusun pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Jadi, LPMD berdasarkan tugas pokoknya merupakan salah satu

Lembaga disamping Pemerintah Desa yang memiliki peran sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Desa terutama yang berhubungan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kegiatan pembangunan yang ada di Desa ditangani atau berada dalam naungan LMPD. Keberhasilan maupun kegagalan daripada pembangunan yang ada di suatu Desa juga merupakan tanggung Jawab dari LPMD. Hal tersebut dikarenakan LPMD merupakan Lembaga yang tidak hanya mengurus masalah pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. LPMD harus mampu menggerakkan masyarakat Desa agar ikut serta aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan Desa. Termasuk juga ketika ada kegiatan PPIP, LPMD menjadi aktor utama penggerak kegiatan dan penggerak masyarakat.

Adannya proyek kegiatan PPIP ini mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat Desa Wonorejo dan juga membuat disambut dengan baik oleh LPMD. Melalui Ketua LPMD beliau menyampaikan terkait PPIP sebagai berikut:

*“Ya senang...senang kita bisa memberikan kenang-kenangan sbg warga masy merasa terpanggil dengan adanya PPIP dan juga masy menghendaki itu terjadi. Tapi kalo tidak senang maka tidak mungkin suatu bangunan itu terjadi..jadi kita terpanggil sm temen-temen panitia dan juga Bapak Kepala Desa memberikan kenang-kenangan yg terbaik itu..untuk desa untuk masyarakat”.*³⁶

Berdasarkan proyek kegiatan PPIP, tidak hanya masyarakat secara umum saja yang merasakan dampaknya tetapi juga terhadap organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat salah satunya yakni LPMD. Menurut pemaparan beliau diatas menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat disambut baik dan beliau mengaku sangat senang dengan adanya kegiatan ini karena disamping banyak manfaat atau

³⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rawi, Ketua LPMD pada tanggal 08 Agustus 2018/16:27.

dampak positifnya juga beliau dan rekan-rekan merasa terpanggil. Selain terpanggil beliau dan rekan-rekan baik itu bapak Kepala Desa dan jajaran pemerintahan serta organisasi LPMD merasa ingin memberikan kenang-kenangan terbaik untuk warga masyarakat Desa Wonorejo. selain itu, kegiatan ini juga sesuai dengan apa yang selama ini menjadi tujuan LPMD seperti kutipan wawancara berikut ini:

*“Ya sesuai,,,sesuai membantu, sebelum ada dana desa kan sudah ada itu, Cuma itu kan termasuk rezeki daripada masyarakat dengan adanya PPIP, walaupun di dananya terjepit.. sedikit sekali , kita membantu, kita memberanikan ..akhirnya kita dg pengalaman membangun jembatan satu itu di sebelah sana dulu...waktu itu PPK, PPK itu ...sama dengan PNPM itu..juga terjepit dananya yang kita pegang itu...itu 58 juta itu anrentangnya 12 meter lebih panjang sana, terus lebarnya itu 4, 8 meter hampir 5 meter...jadi dulu juga seperti itu menghubungkan antar,, daerah...desa wonorejo sm desa puthuk...semua harga yang saya bangun jembatan itu sama masyarakat, harga prtanian dan juga tanah itu meningkat langsung...satu tahun langsung meningkat...disini apa itu...kab malang memfokuskan untuk desa wonorejo itu disuruh mewakili kab malang untuk lomba tingkat provinsi..sampai disitu kan....iya itu..jadi kita itu ndak anu....ndak tau...kalo seperti itu ndak tau..ya Cuma itu,,,kita sebagai masyarakat kompak, kemudian terbentuk menjadi jembatan...itu..”.*³⁷

Pembangunan jembatan dan jalan rabat beton dinilai sangat sesuai dengan apa yang selama ini menjadi tujuan daripada LPMD sebagai organisasi yang menangani pembangunan di desa. walaupun dengan dana yang sedikit, jika masyarakat mendukung maka pembangunan apapun hasilnya akan jauh lebih baik. Tingkat kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap pemerintah maupun organisasi yang ada salah satunya LPMD. Disamping merasa terpanggil serta untuk memberikan kenang-kenangan terbaik kepada warganya, LPMD juga merasakan dampak yang cukup baik bagi organisasinya setelah kegiatan PPIP ini selesai. Dampak tersebut membuat masyarakat yang terlibat didalamnya organisasi juga ikut merasakan. Ada beberapa dampak positif yang dirasakan sangat

³⁷ Ibid,

berpengaruh yaitu kemampuan atau skill, pengetahuan meningkat, organisasi semakin solid, dan semangat kerja para anggota yang tergabung dalam LPMD. berkaitan dengan skill atau keterampilan disampaikan narasumber sebagai berikut:

“Ya bagus...ndak papa kan membantu..kan yang di PPIP langsung pelaksana kan masyarakat...masyarakat anak-anak malahan, anak-anak yang masih muda-muda itu saya terjunkan, saya ajak bersama-sama,..belajar...akhirnya beliau mikir gini...ohh ini rupanya kok bisa membantu desa , akhirnya kita angkat, kita masukan di suatu lembaga... jadi membantu, kita membuat generasi yang baru lagi..itu juga ..iya meingkatkan skillnya”³⁸

Tidak hanya kepercayaan, skill atau kemampuan anggota LPMD dalam hal perencanaan hingga kemampuan-kemampuan berorganisasi dngan baik. Bahkan disamping meningkatkan skill atau kemampuan masyarakat, jajaran perangkat juga memasukan golongan muda untuk terlibat secara langsung. Dua keuntungan yang didapat sekaligus yang pertama meningkatkan skill atau kemampuan kemudian diimbangi dengan regenerasi. Hal ini tidak lepas dari peran para pemimpin yang ada di desa yang terus membrikan dorongan kepada para generasi muda untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan desa. Mereka juga melihat lebih jauh kedepan agar kesuksesan pemerintah saat ini tidak berhenti sampai pada pembangunan jembatan dan jalan ini saja tapi kedepan melalui generasi yang sudah ditata Desa akan jauh lebih maju lagi.

Proyek Kegiatan PPIP yang dilaksanakan di Desa Wonorejo, selain melibatkan LPMD sebagai pelaksana pokok kegiatan juga melibatkan kelompok organisasi lain seperti Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab

³⁸ Ibid,

sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.³⁹

Gambar 5.9
Anggota Karang Taruna yang Terlibat dalam PPIP



Sumber: Dokumentasi Tim PPIP, 2018

Karang taruna, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan organisasi social kemasyarakatan yang digunakan sebagai wasah atau sarana pengembangan diri oleh masyarakatat khususnya anak muda. Setiap anggota karang taruna harus ikut serta dalam berbagai kegiatan Desa baik itu dalam bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Karang taruna menjadi salah satu organisasi yang dinilai sangat potensial karena terdiri dari anak-anak muda yang masih dapat terus berkembang dalam hal skill maupun keterampilan mereka. Tidak hanya LPMD, karang taruna juga sejalan dengan pembangunan jematan dan jalan tersebut seperti disampaikan narasumber sebagai berikut:

“ya sesuai.. soalnya gini...kami...yang awalnya untuk sebelum merencanakan... sebelum dapat ppip kan ada...musdes, musyawarah RT..itu kan...ada beberapa usulan yang diusulkan itu buanyak dari kalangan ..la setelah dikumpulkan semua,,yang diprioritaskan untuk pembangunan jembatan... dan jembatan ini juga masuk di RPJM desa

³⁹ <https://kemsos.go.id/content/profil-karang-taruna>, Beranda Hlm:1. Diakses pada tanggal 11 September 2018.

Wonorejo...la ini jadi sangat sesuai dg tujuan organisasi dan tujuan desa...ya ..ini mbak... ”⁴⁰

Selain sesuai, dengan adanya pembangunan tersebut, para anggota karang taruna menjadi semakin meningkat dalam hal skill dan kemampuan terutama dalam berorganisasi. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“kita,,,sejak adanya ppip...kita menjadi...lebih mengenal organisasi...dan di masyarakat...kita bisa...berkoordinasi...lah...kan dulunya... sering sendiri-sendiri... sekarang...kan banyak ngumpul-ngumpul...organisasi dari PPIP itu lah... menjadi...kita menjadi...bisa berorganisasi... ”⁴¹

Perbedaan dirasakan sangat jauh berbeda keika sebelum dan sesudah pembangunan dilakukan. Molongan muda semakin paham bagaimana cara berorganisasi yang baik hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Disamping itu, jika dulu semua kegiatan berjalan sendiri-sendiri sekarang semuanya membaaur menjadi satu. hingga awalnya belum mengenal satu sama lain, saat ini sudah saling mengenal dan sering berkumpul antara masyarakat baik golongan muda maupun golongan tua. Hal ini memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi seperti disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalo dari organisasi itu...dampaknya lebih bisa itu kerja tim...lebih guyub lah,,,yang biasanya jarang kerja bareng...ini dengan adanya pembangunan jembatan kan...membutuhkan tenaga yang sangat banyak mbak...hampir tiap hari itu ada kerja bakti,,,mulai dr 10 orang...20 orang...gt 50 bahkan pernah 300...jadi semakin erat hubungan antar masyarakat itu ”. ⁴²

Kerjasama atau koordinasi yang baik antar anggota merupakan kunci utama keberhasilan suatu organisasi. Melalui kegiatan PPIP narasumber mengaku bahwa dari hal tersebut para anggota lebih meningkat atau lebih bisa kerhjasama antar tim

⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Akmal, petani dan kader desa Wonorejo pada 08 Agustus 2018/13:44.

⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Syaifudin Zuhri, Sekretaris PPIP desa Wonorejo pada 08 Agustus 2018/12:55.

⁴² Berdasarkan hasil wawancara dengan Akmal, petani dan kader desa Wonorejo pada 08 Agustus 2018/13:44.

dalam menangani suatu kegiatan. Selain itu juga lebih guyub atau rukun seperti sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. Karang taruna juga menjadi salah satu organisasi yang diperhitungkan dalam pemerintahan di Desa Wonorejo sehingga sering diikutsertakan dalam berbagai kegiatan seperti disampaikan oleh narasumberyaa,,,makin.. makin jadi makin....suka ikut-ikut program desa yg sperti itu,,,krg taruna juga dilibatkan skrg di dana desa itu a mbak...lalu jadi lanjut...gitu lo...⁴³selain itu ia juga menyampaikan bahwa dengan kondisi sekarang ini karang taruna memperoleh manfaat untuk menunjukkan bahwa Karang Taruna patut diperhitungkan dalam kegiatan desa.....manfaatnya ya bisa...menunjukkan... bisa menunjukkan kemampuan karang taruna itu..mbak.. (skillnya).. iyaa,,,bisa ikut itu..kadang-kadang kan disuruh mimpin rapat juga,,,jadi bisa berkembang ...⁴⁴

Tabel 5.7

Perbandingan Kondisi Organisasional Sebelum dan Sesudah Pembangunan Jembatan dan Jalan

NO.	SEBELUM	SESUDAH
1.	Antara pembangunan dan tujuan organisasi masih belum menyatu terutama dengan karang taruna karena masih dalam tahap berkembang	Antara pembangunan dan tujuan organisasu berjalan selaras, sesuai dengan paap yang ingin dicapai.
2.	Skill baik yang dimiliki oleh masyarakat, anggota LPMD maupun anggota Karang Taruna masih rendah.	Skill baik yang dimiliki oleh masyarakat, anggota LPMD maupun anggota Karang Taruna jauh lebih baik dan meningkat pesat dalam berbagai hal.
3.	Koordinasi dan kerjasama antar tim masih rendah dan kurang solid karena tidak terlalu mengenal satu sama lain.	Koordinasi dan kerjasama antar tim sangat baik karena membaur jadi satu sehingga dapat mengenal satu sama lain.
4	Banyak yang pasif di berbagai kegiatan desa.	Masyarakat semakin aktif di berbagai kegiatan desa.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018

⁴³ Berdasarkan wawancara dengan Dian Laila, anggota Karang Taruna pada tanggal 25 Juli 2018/17:22.

⁴⁴ Ibid,

5.3 Dampak Pada Masyarakat

Masyarakat bukanlah unit sosial yang goal oriented seperti organisasi. Ia adalah suatu unit yang melayani para anggotanya. Jadi, walaupun ingin dikatakan bahwa masyarakat itu mempunyai tujuan tertentu, maka tujuannya adalah melayani individu-individu anggotanya sebaik mungkin. Oleh karena itu, dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Dalam hal ini masyarakat dianggap input yang menyediakan sumber daya tetapi sekaligus menampung tuntutan, sedangkan kualitas hidup para anggotanya merupakan output. Sementara itu, yang menjadi proses atau konversi dalam system ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengolah sumber daya guna memenuhi kebutuhan anggotanya..

Berdasarkan penjelasan diatas, Dampak kepada masyarakat dapat dilihat dari kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya guna memenuhi kebutuhan anggota masyarakat itu sendiri secara keseluruhan. Hal yang dimaksudkan antara lain bagaimana pengelolaan ataupun pengaturan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan tersebut, setelah itu dampaknya bagaimana terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Dimana, hal tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan. hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Sangat luar biasa lah mbak..kalo tingkat partisipasi nya..kan kerja bakti..di liat dari kerja baktinya...pernah sampai 350 orang ... fotonya kan ada...tiap...hari itu kerja bakti ,,tapi digilir...per RT per RT...gitu mbak...itu menaklukkan tebing setinggi ...berapa meter...6 meter a?,,,Sembilan meter itu...anu...wong org diatas sana kayak gak percaya..mbak...gak percaya..kalo tebing itu bisa..bisa ditaklukkan ...alhamdulillah dengan partisipasi warga di...semua warga itu bis...gak

usah alat-alat berat seperti bego...trus semua alat e ya Cuma cangkul itu mbak..padas itu.....kayak tanah padas itu...luar biasa...iya...’’⁴⁵

Setiap kegiatan atau proyek apapun apabila tidak didukung oleh masyarakat maka tidak akan dapat berjalan dengan baik. Satu contoh yang sangat baik ditunjukkan oleh masyarakat Desa Wonorejo adalah tingkat partisipasi masyarakat yang sangat luar biasa. Dari kegiatan kerja bakti, bahkan satu hari kurang lebih terdapat 350 orang yang mengikuti kegiatan pembangunan Jembatan dengan sukarela dan berdasarkan kesadaran sendiri. Tentu ini menjadi modal sekaligus dapat dijadikan contoh bagi daerah lain apabila ingin membangun kesadaran bersama. Kegiatan tersebut juga tidak lepas dari kendala yang pada awal dihadapi oleh Desa Wonorejo yakni masalah awal yang dihadapi ketika masyarakat. Ketika dilakukan survey oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang, mereka mengatakan bahwa terlalu sulit dan hampir tidak mungkin diberikan bantuan proyek PPIP mengingat medan yang cukup sulit.

Gambar 5.10
Kerja Bhakti Pelaksanaan PPIP



Sumber : Dokumentasi Tim PPIP, 2018.

⁴⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Syaifudin Zuhri, Sekretaris PPIP desa Wonorejo pada 08 Agustus 2018/12:55.

Kondisi jalan yang hampir tidak memungkinkan untuk dibangun sebuah jembatan penghubung sempit membuat sebagian masyarakat ragu-ragu. Bahkan ketika ada survey kelayakan desa penerima bantuan PPIP dari pemerintah kabupaten Malang juga meragukan keberhasilan pembangunan infrastruktur penghubung tersebut. Namun, berkat kerja keras pemerintah Desa Wonorejo untuk meyakinkan masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten membuahkan hasil dengan ditetapkannya Desa Wonorejo sebagai Desa Penerima bantuan PPIP pada tahun 2014 bersama dengan 5 Desa Lainnya. hal ini disampaikan oleh Kepala Desa sebagai berikut:

“Ya,, dalam satu minggu....sebetulnya...e.. untuk cipta karya itu sudah...sudah ndak anu...gak mungkin gitu lo...tapi dengan antusias warga yang cukup semangat...karena ini pelebaran jalan.juga nanti kalo lebar jalannya itu lebar...kita mengangkut hasil ...ee...panen ini juga ee... enak gitu lo...kalo selama ini mbak,,terutama yg di sebelah selatan jembatan...ini kita harus memutar karna...memutar sekitar 5 kilo...ini...jadi kalo panen gitu yaa...ee.. masyarakat desa wonorejo ini jalannya kan gak bisa dilalui oleh mobil. tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya program PPIP kita buat jembatan..waktu itu ...dananya sekitar 100 juta kalo gak salah ...dari provinsi. setelah itu...ini sekarang...jadi masyarakat yang panen di sana...udah gak usah memutar lagi...lebih cepat juga..ee... transportasinya lebih murah.”⁴⁶

Pada awal penentuan layak atau tidaknya desa wonorejo sebagai desa penerima PPIP, dilakukan survey terlebih dahulu oleh Dinas Cipta Karya. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara data dengan kondisi yang ada di lapangan. Pada awalnya, setelah dilakukan survey, pihak Kabupaten mneragukan keberhasilan pembangunan jembatan tersebut. hal ini dikarenakan oleh beberapa hambatan yang ada dan tingkat kesulitan yang dihadapi mengingat dana yang diberikan oleh pihak kabupaten adalah 100 Juta pada awal pembangunan pertama.

⁴⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Sokeh selaku Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 17 Juli 2018/09:30.

Setelah itu kemudian para pimpinan pemerintahan Desa Wonorejo berserta perwakilan masyarakat dikumpulkan untuk memecahkan masalah tersebut karena ini merupakan satu masalah yang cukup krusial apabila proyek kegiatan tersebut tidak jadi dikerjakan. Hal ini disampaikan narasumber sebagai berikut:

“loh ada juga mbak, kendala itu ada...kendalanya antar masyarakat dan pemerintah itu kendalanya gini, masyarakat kan ndak tahu persis berapa harga, berapa nilai jembatan yang dibangun, sedangkan di pemerintahan kan ada fasilitator teknik, ya...dari cipta karya, nah yang di pemerintahan kan apa itu,...ngeman masyarakat jgan sampai proyek itu tidak terjadi,,tidak jadi...kalau gak jadi kan pertanggungjawabannya kan jauh lebih berat, kalau kita sudah ttd kepala desa, itu yang dijaga pemerintah,,ya pemerintah ngasi uang itu mau-mau aja,,la tapi kalo dananya gak cukup kan lebih baik dialihkan ke yang lain biar masyarakat ndak terlalu berat...kendalanya kan disitu, tapi kita itu posisinya ditengah, antara masyarakat antara pemerintahan desa sama kabupaten posisinya kita ditengah...kalo kita itu sudah posisinya ditengah terus masyarakat mau membangun jembatan dengan dananya sedikit, la...inilah kesan-kesan bagaimana utusan yang ada di pemerintahan desa dan ada di masy, nah akhirnya sepakat, kita siap untuk membangun itu, dengan swadaya, tapi membangun dengan swadaya harus sampe selesai. Ya siap,,kan gak ada masalah”.⁴⁷

Pemerintah pada awalnya juga sempat ragu dengan proses yang akan dijalani, mengingat dana yang dikeluarkan sangat sedikit dan mungkin sudah jelas tidak cukup apabila tidak didukung dengan swadaya dari masyarakat. Namun dengan kegigihan dan semangat untuk menjadikandesa lebih baik lagi masyarakat tetap melanjutkan proses pembangunan. Sehingga pada akhirnya pembangunan tetap dapat dilaksanakan hingga selesai. Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten tidak begitu besar tetapi dengan swadaya dan partisipasi dari masyarakat Desa Wonorejo, hal yang awalnya mustahil menjadi suatu yang berharga hingga saat ini dan untuk kedepannya. Begitu juga bagi pemerintah, tidak ada yang tidak mungkin selama pemerintah mau bekerja keras merangkul masyarakat, karena satu-

⁴⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rawi, Ketua LPMD pada tanggal 08 Agustus 2018/16:27.

satunya yang dimiliki pemerintah adalah kekuatan dan kepercayaan dari masyarakat.

Tabel 5.8

Perbandingan kondisi Sosial dan Personal Sebelum dan Sesudah Adanya Jembatan dan Jalan

NO.	SEBELUM	SESUDAH
1.	Tingkat partisipasi masyarakat baik, namun belum tinggi	Tingkat partisipasi masyarakat tinggi dan masyarakat antusias dalam berbagai kegiatan.
2.	Rendahnya semangat kerja masyarakat masih menjadi hambatan tersendiri.	Semangat kerja masyarakat meningkat dan semakin giat lagi dalam bekerja.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018.

5.4 Dampak Pada Lembaga dan Sistem Sosial

Dampak terhadap lembaga dapat berupa perubahan bentuk lembaga, sedangkan terhadap sistem sosial berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat serta berkaitan juga dengan perubahan sosial seperti isolasi desa. Dimaksudkan perubahan pada lembaga adalah apakah ada perubahan yang terjadi pada lembaga setelah kegiatan pembangunan selesai. Lembaga disini dapat berupa lembaga apa saja yang mengalami baik itu perubahan bentuk maupun perubahan struktur akibat dari pembangunan jembatan dan jalan. Sementara untuk perubahan sistem sosial mengacu pada tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan sosial yang ada di lingkungannya. Kedua hal tersebut penting dilihat dampaknya karena berkaitan dengan sejauhmana lembaga maupun sistem sosial yang ada di masyarakat mengalami perubahan setelah adanya kegiatan.

Setelah proses pembangunan jembatan selesai dilakukan, maka akses masyarakat menjadi semakin mudah ketika hendak melakukan kegiatan apapun. Mengingat Desa Wonorejo merupakan salah satu Desa dengan potensi yang cukup besar baik dari segi pertanian maupun dari segi ekonomi, maka pemerintah bersama

masyarakat berupaya terus meningkatkan status desanya. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“.....trus bapak kepala desa berunding dengan masyarakat... dan kebetulan yang digadang-gadang sama masyarakat itu dibentuk suatu ..apa itu...suatu jembatan...pelebaran jalan...itu untuk meningkatkan hasil pertanian masy,,, dengan adanya PPIP ,,nah masy sepakat untuk membangun suatu jembatan...kalo jembatan itu jadi maka hasil pertanian, hasil perkebunan itu meningkat dan juga lahan pertanian disitu juga harganya meningkat..ini untuk mensukseskan pertanian yang meningkat lagi menjadi desa wisata.....”⁴⁸

Lebih jauh, pemerintah bersama masyarakat ingin meningkatkan status Desa Wonorejo menjadi desa wisata. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai factor seperti desa penghasil pertanian, hingga aksesnya yang sekarang sudah mudah bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun kedepan Desa Wonorejo ikut menyusul daerah lain menjadi meningkat status lembaga menjadi Desa Wisata pertanian.....iyaa kesitu...posisi pertanian,,,desa wonorejo ini...posisi pertanian harus bisa dilalui minimal itu pick up ...karna menuju daerah agrowisata.....⁴⁹

Selain itu, dengan ditingkatkan menjadi Desa Wisata pada rencana kedepan, proyek ini menjadi satu proyek yang memiliki dampak luar biasa bagi Desa Wonorejo. Daerah pertanian yang didukung dengan infrastruktur yang baik menjadikan desa ini cukup ayak untuk diperhitungkan kedepannya. Apalagi Desa Wonorejo juga dikelilingi oleh Desa lain disekitarnya yang memiliki satu aset tersendiri yang sudah ada sejak dahulu seperti yang ada di Desa Ngadireso. jadi, melalui pembangunan jembatan dan jalan, selain meningkatkan hasil pertanian dan sebagiannya juga menjadikan isolasi antar desa berkurang karena jembatan tersebut juga menghubungkan antar desa.

⁴⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rawi, Ketua LPMD pada tanggal 08 Agustus 2018/16:27.

⁴⁹ Ibid,

“ada...,memang tujuan itu pertama itu adalah untuk jalan tembusan antara desa wonorejo dengan desa puthuk, desa puthuk itu masuk desa ngadireso,,,ya disitu...kalau disitu ditembus akhirnya ada jalan untuk kearah selatan itu ada pucung keris itu juga ada wisata agamis, iyaa ka nada itu di ngadireso...itu wisata agamis untuk ...apa ..itu... untuk agama Kristen...ya karmel itu..itu kan terbesar se-Asia Tenggara..langkahnya kesitu ...karena disitu pemandangannya bagus...desa puthuk itu bagus pemandangannya”.⁵⁰

Pembangunan jembatan dan jalan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terus berkembang meningkatkan dan menggali potensi yang ada dan juga diimbangi dengan kesadaran yang tinggi akan hubungan sosial antar anggota masyarakat. Pembangunan jembatan tersebut menjadikan isolasi desa berkurang dan masyarakat menjadi lebih sering berinteraksi dengan mudah dengan masyarakat desa lain. Adanya potensi pendukung lain menjadikan Desa Wonorejo menjadi semakin percaya diri untuk meningkatkan statusnya menjadi Desa Wisata kedepannya. Hal ini tentu menjadikan satu pelajaran berharga bahwa apapun yang dikerjakan dengan keyakinan akan membuahkan hasil yang baik.

Tabel 5.9

Perbandingan Kondisi Lembaga dan Sistem Sosial Sebelum dan Sesudah Pembangunan Jembatan dan Jalan

NO.	SEBELUM	SESUDAH
1.	Antara satu desa dengan desa lain masih ada isolasi jarak	Mengurangi isolasi antar desa sehingga interaksi masyarakat semakin kuat
2.	Desa masih berstatus sebagai desa pertanian, dan sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada hasil pertanian	Berencana meningkatkan status diubah menjadi desa wisata pertanian, sehingga ada potensi sektor lain yang bisa dijadikan unggulan.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018.

⁵⁰ Ibid,



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur Perdesaan pada dasarnya merupakan suatu pembangunan multidimensi yang menysasar pada berbagai dampak tertentu. Karena disamping sebagai salah satu solusi bagi permasalahan kemiskinan serta keterbatasan infratsruktur di berbagai daerah, ia juga dapat menjadi satu kekuatan tersendiri bagi masyarakat untuk terus berkembang. Melalui pembangunan infrastruktur yang diberikan, berbagai dampak sosial muncul sebagai reaksi atas diperolehnya suatu hal baru yang positif bagi masyarakat. Kemiskinan dan keterbatasan infratsruktur serta kendala lainnya selalu dapat diatasi apabila masyarakat dan pemerintah dapat saling bersatu.

Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa ada hubungan yang erat antara pembangunan dengan dampak sosial. Pembangunan bukan lagi dipandang sebagai infrastruktur fisik lebih jauh juga mempengaruhi atau turut serta dalam membangun kehidupan sosial di lingkungan masyarkat Desa Wonorejo, dampak-dampak tersebut antara lain dapat dilihat dari Dampak Psikis sangat baik dikarenakan masyarakat sangat senang dan juga dipermudah kegiatannya dalam berbagai hal. Dampak terhadap lingkungan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari perubahan lingkungan yang cukup besar walaupun masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dampak terhadap perekonomian sangat baik dikarenakan melalui kegiatan PPIP ini, permasalahan yang selama ini membatasi ruang gerak masyarakat sudah dapat dituntaskan dengan pembangunan jembatan

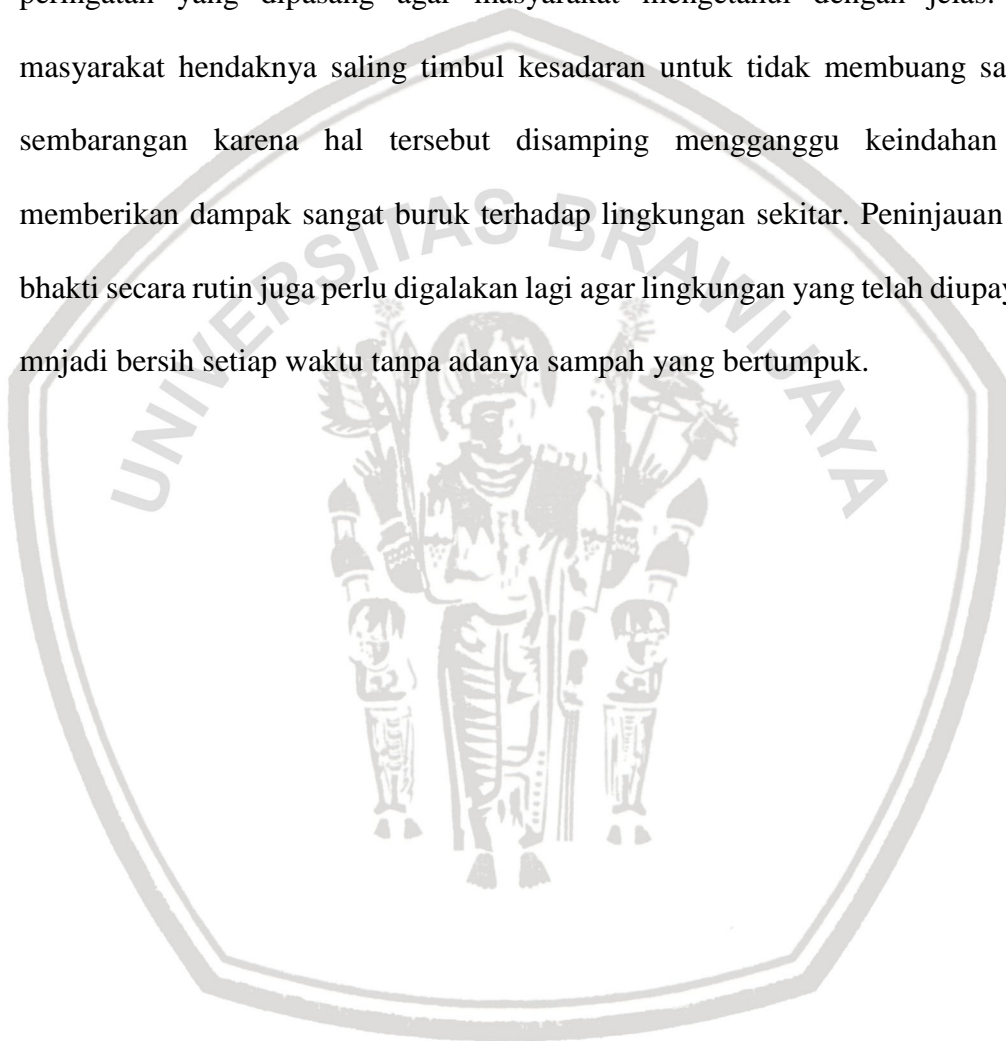
dan jalan rabat beton. Selain itu, petani menjadi lebih produktif, biaya pengangkutan menjadi lebih murah, serta harga jual tanah dan hasil produksi pertanian meningkat. Dampak terhadap sosial dan personal masyarakat sangat baik hal ini dikarenakan masyarakat sudah lebih percaya diri dalam mengeluarkan ide atau pendapat di muka umum pada saat kegiatan musyawarah.

Dampak terhadap organisasional yang ada sangat baik karena mampu meningkatkan *skill* atau kemampuan baik anggota masyarakat, anggota LPMD, maupun anggota Karang Taruna. Adanya PPIP membuat mereka mampu belajar dan mengasah kemampuan lebih dalam lagi sehingga banyak hal baru dan pengetahuan yang didapatkan. Dampak pada masyarakat sangat baik dikarenakan masyarakat menjadi berubah pola pikirnya, masyarakat yang dulunya awam dan sedikit tertutup, saat ini menjadi lebih terbuka serta mampu membaaur sehingga semakin akrab dan guyub. Tingkat partisipasi masyarakat juga meningkat dalam berbagai kegiatan apapun yang ada di desa serta meningkatkan semangat kerja dari masyarakat. Terakhir berkaitan dengan dampak terhadap lembaga dan sistem sosial juga sangat baik karena setelah PPIP selesai, pemerintah bersama masyarakat saat ini mengarahkan desanya dengan menggali peluang serta potensi yang ada di desa sehingga diarahakan menjadi desa wisata pertanian. Selain itu, dampak sosial lain yang timbul adalah berkurangnya isolasi jarak antara desa sehingga masyarakat antar desa dapat terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu ditinjau kembali terutama berkaitan dengan permasalahan sampah yang selama ini menjadi persoalan. Bagi pemerintah,

terutama KPP selaku organisasi yang menangani pemeliharaan dan pemanfaatan jembatan dan jalan sebaiknya ditinjau kembali secara berkala bagaimana kondisi sekitar jembatan dan jalan rabat beton mengingat sampah yang menumpuk dibawah jembatan. Sebaiknya warga terus menerus diberikan himbauan agar tidak membuang sampah di sekitar jembatan. Selanjutnya sangat diperlukan papan peringatan yang dipasang agar masyarakat mengetahui dengan jelas. Bagi masyarakat hendaknya saling timbul kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan karena hal tersebut disamping mengganggu keindahan juga memberikan dampak sangat buruk terhadap lingkungan sekitar. Peninjauan kerja bhakti secara rutin juga perlu digalakan lagi agar lingkungan yang telah diupayakan mnjadi bersih setiap waktu tanpa adanya sampah yang bertumpuk.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Said zainal, 2012, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Adisasmita Raharjo, 2013, *Pembangunan Perdesaan (pendekatan partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Annas, Azwar, 2017, *interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan*, Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Dunn, William N., 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Dye, Thomas R e dalam Wayne Parson, 2008, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Kebijakan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Herdiansyah, Haris, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Nawawi, Hadari, 2012, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant, 2006, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suharto, Edi, 2012, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabet: Bandung.
- Suyanto, Bagong, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Subarsosno, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno Budi, 2002, *teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Presindo.

JURNAL DAN SKRIPSI

Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008 : 1 – 11, Hlm: 02.

Ahmad Sururi 2015, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

Almas Firdausi, Indah Prabawati, 2012, Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Ppip) Studi Pada Pembangunan Irigasi Petani Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, UNESA.

Chris Wijayanti Puspita (2013) tentang Partisipasi Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2013 (Studi Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang).

Muhammad Amin Cakrawijaya, Bambang Riyanto dan Nuroji, Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 25, no. 2, hlm. 137-156, Agustus 2014.

Yemim Krenhazia, dkk, Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Ppip) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara (Studi Kasus: Desa Korobonde, Korowou, Wawopada), *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 12, Desember 2016.

LAPORAN

Buku Pedoman PPIP Tahun 2014.

Informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD) Kabupaten Malang tahun 2014.

LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) 2014 <http://www.malangkab.go.id>, diakses pada tanggal 04 November 2017.

Laporan Pertanggungjawaban OMS PPIP Tahun 2014 Desa Wonorejo.

Laporan Rencana Kegiatan Masyarakat PPIP tahun 2014 dan laporan akhir PPIP

tahun 2015. *Dokumentasi desa Wonorejo*, 2018.

Laporan Pertanggungjawaban OMS PPIP Tahun 2014 Desa Wonorejo.

Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang, 2018.

LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) 2014

PERUNDANGAN

Perpres nomor 122 tahun 2016

UU nomor 38 tahun 2004

INTERNET

Bps.go.id, *Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas 2015*

<https://kemsos.go.id/content/profil-karang-taruna>, diakses pada tanggal 11 September 2018.

<http://www.malangkab.go.id>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018

http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wpcontent/uploads/2015/12/dokumentasi_kab_kota_2015.pdf diakses pada tanggal 04 November 2017.

Pu.go.id, diakses pada tanggal 04 November 2017.

WAWANCARA

No.	Nama	Keterangan
1.	Abdul Fatah	Tanggal 07 Agustus 2018 Pukul 13:08
2.	Rawi	Tanggal 08 Agustus 2018 Pukul 16:47
3.	Ahmad Syaifudin Zuhri	Tanggal 08 Agustus 2018 Pukul 12:55
4.	M. Akmal	Tanggal 08 Agustus 2018 Pukul 13:44
5.	Moh. Sokeh	Tanggal 17 Juli 2018 Pukul 09:30
6.	Dian Laila	Tanggal 25 Juli 2018 Pukul 17:22
7.	Taman	Tanggal 20 Oktober 2018 Pukul 08:37
8.	Sudiksan	Tanggal 20 Oktober 2018 Pukul 10:24
9.	Sa'id	Tanggal 20 Oktober 2018 Pukul 14:21

